



**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH  
TAHUN 2017 - 2022**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH  
TAHUN 2019**





## KATA PENGANTAR

### KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

Rancangan Akhir Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menjadi dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk Periode 5 (*lima*) tahun kedepan yang mencakup materi *Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan* Pembangunan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJP, RPJM, dan RKPD. Di samping itu juga Rancangan Akhir Renstra ini disusun dengan menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2017-2022 ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur terkait, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya melalui dokumen Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2017-2022 secara optimal diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun para pelaku pariwisata/budaya, akademisi dan para tokoh masyarakat lainnya.

Keterpaduan, kerjasama, keterbukaan, komitmen dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan upaya yang sinergis dalam mengaktualisasikan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2017-2022.

Banda Aceh,     Maret 2019

### KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

**JAMALUDDIN, SE, M.Si.Ak**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750701 199903 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>01</b>
1.1. Latar Belakang.....	01
1.2. Landasan Hukum.....	07
1.3. Maksud dan Tujuan.....	09
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH.....</b>	<b>12</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	12
2.2. Sumberdaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	29
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH.....</b>	<b>36</b>
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	36
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	46
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	64
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	72
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>81</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	81
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>86</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2 (Kedua).....	86
5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 8 (Kedelapan).....	92
5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 9 (Kesembilan).....	97
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>110</b>
<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>116</b>
<b>BAB VIII : PENUTUP.....</b>	<b>118</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	16
Tabel II.2	Jumlah pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan .....	17
Tabel II.3	(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	27
Tabel II.4	(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	28
Tabel III.1	(T-B.35) Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
Tabel IV.1	(T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh .....	83
Tabel V.1	(T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	99
Tabel VII.1	(T-C.28) Indikator Kinerja SKPA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan .....	18
Gambar II.2	Jumlah pegawai berdasarkan keahlian/jurusan .....	19

## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel VI.1 (T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Aceh. Tugas pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Selain itu, dinas ini juga memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas-tugas pokok Dinas.

Panduan pelaksanaan kinerja Dinas dirancang dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (Renstra SKPA). Renstra Dinas adalah salah satu dokumen rencana resmi daerah yang wajib dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dinas selama 5 (lima) tahun. Renstra Dinas disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat Aceh melalui pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Dokumen Renstra juga ini juga mengacu pada dua kementerian yaitu Kementerian Pariwisata serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memajukan kebudayaan Aceh merupakan salah satu tujuan utama dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Kebudayaan Aceh yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah kebudayaan yang memiliki keunikan dan kebudayaan yang sudah hampir punah. Selain itu, diversifikasi kebudayaan juga menjadi penting karena memiliki nilai jual kebudayaan dan juga bertujuan untuk menggiatkan pelaku budaya dalam berkreasi.

Kebudayaan yang sudah ada dan hanya memerlukan sentuhan agar tetap memiliki daya tarik adalah warisan budaya. Warisan budaya yang telah ditetapkan di dalam undang-undang disebut dengan cagar budaya. Warisannya ada yang berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya yang diwarisi dan menjadi sejarah masa lalu (*cultural heritage*). Warisan budaya itu merupakan peninggalan masa pra sejarah, klasik, Islam, kolonial, serta peninggalan bencana gempa dan tsunami

(*smong*). Semua warisan peninggalan masa lalu tersebut terdiri dari budaya benda (*tangible*) seperti *situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman, Kerkhof Peutjoet, kapal apung* dan cagar budaya lainnya. Cagar budaya yang terdata sampai tahun 2017 berjumlah 909 buah yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh.

Seluruh warisan peninggalan tersebut memiliki keunikan dan kebesaran budaya serta mengandung nilai sejarah Aceh masa lalu. Nilai yang terkandung dalam warisan budaya itu dapat dijadikan sebagai media edukasi, penelitian dan daya tarik wisata, khususnya wisata budaya (*culture tourism*). Namun, peninggalan warisan budaya itu belum sepenuhnya dilestarikan dan dimanfaatkan sebagaimana pesan yang terdapat di dalam Undang-Undang RI tentang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010. Registrasi cagar budaya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan registrasi dunia oleh UNESCO merupakan hal yang paling penting dilakukan. Berdasarkan jenis cagar budaya yang tersebut di atas, 9 (sembilan) bangunan cagar budaya telah memiliki pengakuan sebagai situs budaya melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (*Registrasi Nasional*). Untuk pemeliharannya, terdapat 54 (lima puluh empat) situs/bangunan cagar budaya telah memiliki juru pelihara, sehingga kedepan perlu ditingkatkan jumlah dan kapasitas juru pelihara di berbagai situs cagar budaya yang ada di Aceh.

Aceh juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menarik lainnya, *seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual*. Keunikan lainnya adalah keberagaman suku/etnis yang terdiri dari 8 (delapan) etnis/suku yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simelue dan 13 (tiga belas) jenis bahasa daerah yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan. Keberagaman suku/etnis tersebut melahirkan seni yang beragam juga sehingga muncul seni tari dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing. Tarian yang ada di Aceh misalnya rapai, rapai debus, rapai geleng, likok pulo, meuseukat, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus, sastra, pantun, syair, hikayat, seumapa, seni lukis (kaligrafi), dalail khairat, meurukon, dan lain-lain. Keseluruhan tarian yang terdata di Aceh berjumlah 221 tarian.

Jenis tari-tarian tersebut juga terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau budayawan/seniman melalui pembentukan sanggar-sanggar kesenian yang ada di daerah. Jumlah sanggar kesenian yang terdata sampai 2017 mencapai 1.173 sanggar kesenian dan seniman/budayawan tahun 2016 berjumlah 8.214 orang. Sanggar-sanggar kesenian tersebut selalu mendapat pembinaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui alokasi bantuan dana hibah atau bantuan sosial lainnya.

Selain tari-tarian, Aceh juga memiliki 44 (empat puluh empat) kekayaan budaya tak benda lainnya yang bersifat tradisi atau adat istiadat yang berbeda penampilannya antara satu daerah dengan daerah lainnya di Aceh, seperti kenduri tolak bala, kenduri laot, kenduri blang, kenduri glee, adat perkawinan, turun tanah bayi, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, seumeuleng dan peumeunap pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno dan lain-lain. Semua budaya tak benda tersebut dapat dijadikan daya tarik wisata khusus, sehingga perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai khazanah budaya Aceh.

Selain kebudayaan, pembangunan pariwisata berdasarkan potensi yang dimiliki merupakan peluang besar untuk dikembangkan. Potensi yang dimiliki berdasarkan wilayah (DPN) Destinasi Pariwisata Nasional wilayah Aceh adalah DPN Banda Aceh-Weh dan sekitarnya. Kawasan pulau Weh merupakan kawasan yang sedang dikembangkan sebagai destinasi pariwisata, sehingga program-program yang dicanangkan sampai saat ini masih terus berlanjut. Sementara DPN Nias-Simeulue dan sekitarnya memiliki keunggulan panorama laut yang sangat indah dan juga dengan keunikan budaya masyarakat setempat. Sementara untuk KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional) wilayah Aceh adalah KPPN Banda Aceh Kota dan sekitarnya, KPPN Weh dan sekitarnya, KPPN Simeulue dan sekitarnya. Sementara di Sumatera Utara adalah KPPN Tangkahan-Leuser dan sekitarnya juga merupakan andalan destinasi wisata yang berpeluang untuk dikembangkan.

Selain wilayah DPN dan KPPN, dayatarik wisata alam; wisata budaya; wisata hasil buatan manusia juga memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan. Aceh memiliki sekitar 966 potensi objek wisata yang telah terdata dan telah dikembangkan, terdiri dari 568 objek wisata alam, 231 objek wisata budaya dan 167

objek wisata buatan. Seluruh objek wisata tersebut memiliki nilai tambah dan nilai jual secara ekonomi tersebar hampir di seluruh Aceh.

Seluruh objek wisata tersebut memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara dan mancanegara, sehingga menjadi potensi pengembangan pariwisata Aceh masa depan serta peluang investasi bagi investor dalam melakukan kerjasama investasi di sektor industri pariwisata. Untuk mendukung potensi destinasi wisata, maka aksesibilitas berupa prasarana, sarana, dan sistem transportasi perlu diperhatikan. Sampai saat ini aksesibilitas dan konektivitas transportasi darat yang menghubungkan antar ibukota provinsi, kondisi jalan nasional dapat dilalui lebih dari 60 km/jam. Sementara jalan provinsi yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota dan dapat dilalui lebih dari 63 km/jam. Namun ada jalan yang perlu ditangani terutama menuju lokasi wisata di wilayah tengah Aceh. Untuk transportasi udara yang tersedia saat ini adalah untuk domestik dari Banda Aceh ke 8 (delapan) daerah tujuan yaitu Medan, Jakarta, Batam, Kutacane, Nagan Raya, Simelue, Singkil, dan Blangpidie dengan pesawat Garuda Air, Lion Air, Batik Air, City Link, dan Susi Air. Dari Sabang, Lhokseumawe, dan Bener Meriah hanya menuju Medan dengan pesawat Garuda Air dan Wings Air. Untuk penerbangan internasional dari Banda Aceh dengan 3 (tiga) bandara internasional yaitu Kuala Lumpur, Penang, Jeddah dan masing-masing pesawat Firefly, Air Asia, dan Garuda Air.

Transportasi laut terdapat 9 (sembilan) pelabuhan laut yaitu Sabang, Malahayati, Kr. Geukuh, Kuala Langsa, Calang, Meulaboh, Sinabang, Tapaktuan dan Singkil. Untuk dermaga penyeberangan terdapat 6 (enam) buah yaitu Ulee Lheue, Balohan, Lamteng, Sinabang, Labuhan Haji dan Singkil. Diharapkan semua jenis transportasi baik darat, udara, maupun laut dapat lebih ditingkatkan kualitas dan juga kuantitasnya.

Selain aksesibilitas, amenities adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Penyediaan sarana/fasilitas pendukung wisata dan pelayanan jasa wisata lainnya pada tahun 2017 yang terdiri dari 33 hotel bintang (1.802 kamar) dan 450 hotel non bintang (6.564 kamar), 43 restoran, 749 rumah makan, 663 kafe dan 337 Biro Perjalanan Wisata (BPW), 307 toko souvenir dan industri pemanduan jasa wisata lainnya. Diharapkan sarana pendukung wisata itu dapat lebih ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Pendukung keberhasilan pariwisata yang paling penting adalah masyarakat. Peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat, peningkatan kesadaran, dan peran masyarakat perlu ditingkatkan. Dalam meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat, kesadaran, dan peran masyarakat dalam berperan aktif untuk membangun program pariwisata di Aceh sangat diperlukan. Pada saat ini, terdapat 131 kelompok wisata di seluruh Provinsi Aceh. Kelompok wisata tersebut terdiri dari kelompok-kelompok industri pariwisata, kelompok budaya, dan lain-lain. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam membangun kepariwisataan.

Untuk pelengkap pariwisata yang juga diperlukan adalah investasi berupa insentif investasi, kemudahan investasi dan promosi investasi. Salah satu market baru sektor pariwisata yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia adalah wisata halal (*halal tourism*). Hal ini didasarkan oleh pengeluaran pasar muslim global untuk sektor pariwisata sangat tinggi sehingga gaya hidup halal dapat dikatakan sudah menjadi trend wisata dunia. Aceh memiliki potensi besar untuk dikelola menjadi destinasi wisata halal karena menerapkan syari'at Islam.

Berdasarkan data lima tahun terakhir ini (2013-2017), angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh terus menunjukkan trend yang positif atau rata-rata meningkat 20,79% dari 1.118.178 wisatawan (2013), 1.428.262 wisatawan (2014), 1.717.116 wisatawan (2015), 2.154.249 wisatawan (2016), dan 2.364.383 (2017). Khusus untuk wisatawan nusantara rata-rata peningkatan jumlah yang berkunjung ke Aceh sebesar 20,97% per tahun. Sementara untuk wisatawan mancanegara rata-rata peningkatan jumlah yang berkunjung ke Aceh sebesar 16,49% pertahun. Diprediksikan trend kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan industri pariwisata Aceh.

Mengingat industri pariwisata Aceh baru masuk pada tahap pengenalan dan pengembangan produk, sehingga perlu dirancang berbagai program budaya dan pariwisata yang bersifat menarik dan *up to date* dalam rangka meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Aceh yang didukung dengan berbagai strategi marketing, baik melalui pendekatan *co-based marketing*, *IT-based marketing*, maupun *society-based marketing*. Pendekatan ini dianggap perlu dalam rangka memaksimalkan

kunjungan wisatawan ke Aceh, yang tidak hanya dilihat dari aspek jumlah kunjungan saja, melainkan juga aspek “*multiplier effect*” lainnya dari kunjungan tersebut, seperti berapa besaran pengeluaran wisatawan dan jumlah hari (lama tinggal) wisatawan di Aceh yang akan berdampak langsung secara ekonomi kepada masyarakat “*economic leakage*”.

Produk unggulan wisata yang akan dikembangkan berbasis alam terdiri dari wisata bahari, ekowisata, dan wisata petualangan. Sementara produk wisata berbasis budaya adalah wisata warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner, wisata kota dan desa. Produk wisata buatan manusia (*manmade*) terdiri dari wisata MICE dan event, wisata olahraga dan wisata kawasan terintegrasi. Portfolio produk wisata yang dikembangkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Indonesia.

Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan dapat memberikan kontribusi program pembangunan pemerintah Aceh. Program-program unggulan yang dituangkan dalam bentuk jargon pemerintah Aceh dalam periode 2017-2022 berkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melalui *Acèh Meuadab* dengan mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari yang akan bermuara pada wisata halal; *Acèh Kaya* yaitu merangsang tumbuhnya entrepreneur kepariwisataan yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan, dan pasar yang akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisata, dan *Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)* yaitu pengembangan sistem informasi dan database kebudayaan dan pariwisata Aceh yang terpadu.

Penyusunan Rencana Setrategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dilakukan dengan pembentukan tim Renstra Dinas. Menelaah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) yang dijadikan sebagai pijakan dalam melahirkan Renstra Dinas merupakan langkah awal dilakukan. Selain RPJMA, Renstra K/L, RTRW, dan KLHS juga menjadi bahan rujukan renstra dinas. Berikutnya adalah pengumpulan data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan potensi kebudayaan dan pariwisata untuk melihat potensi pembangunan daerah. Selain dokumen, data informasi juga diperlukan dari berbagai elemen untuk penyempurnaan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Aceh. Tujuan dilakukan penelusuran informasi adalah untuk menjaring isu-isu permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata. Data-data yang terkumpul dari berbagai unsur tersebut diolah dan dianalisis, kemudian dijadikan sebagai dokumen Renstra Dinas yang kemudian dijadikan sebagai bahan diskusi untuk mendapatkan masukan dari berbagai elemen. Hasil dari diskusi akan dianalisis kembali sampai akhirnya menjadi sebuah dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dokumen Renstra Dinas juga menjadi penting karena dalam masa lima tahun ke depan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan. Dokumen ini memiliki posisi yang sangat strategis dan penting dalam menjembatani transportasi pembangunan di Indonesia serta di ranah global, khususnya dalam membantu pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun urgensi penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 2017-2022 adalah sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, dan acuan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

## 1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mendasari Penyusunan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
13. Undang-undang RI Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (*RIPPARNAS*);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
19. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh No 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

- 
- Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;
21. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh;
  22. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
  23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk Periode 5 (lima) tahun dan menjadi sebuah dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2017-2022 ini adalah sebagai pedoman dan arah kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk jangka waktu 5 (*lima*) tahun ke depan. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program daerah dengan program nasional bidang kebudayaan dan pariwisata sehingga pelaksanaan program pembangunan akan berjalan secara efektif dan efisien. Sementara, tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas yang mengacu pada dokumen RENSTRA ini dan melalui dokumen RENSTRA ini tujuan akhir pembangunan 5 (*lima*) tahun bidang kebudayaan dan pariwisata dapat tercapai
2. Program/kegiatan setiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan

3. Peningkatan akuntabilitas unit kerja melalui perencanaan dan pelaksanaan yang bertanggung jawab
4. Peningkatan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *Stakeholders* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2017-2022 sebagai berikut:

#### **BAB I     PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

#### **BAB II    GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

Bab ini memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, sumberdaya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

#### **BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

Dalam bab ini Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh beserta indikator kerjanya.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar visi dan misi dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh hingga 5 (lima) tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif yang penyajiannya bersamaan dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat penjelasan tentang indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA.

#### **BAB VIII PENUTUP**

---

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata adalah salah satu dinas/instansi teknis yang berasal dari penggabungan 2 (*dua*) dinas teknis sebelumnya yaitu: *Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* dan *Dinas Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh* sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh, perlu lebih mendayagunakan pelaksanaan dan pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Qanun tersebut diatas dilakukan perubahan melalui Qanun nomor 15 tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, Perlu dilakukan penataan terhadap satuan kerja perangkat Aceh yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Sesuai dengan aturan terbaru tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diamanahkan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata secara islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di daerah;
4. Pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata kabupaten/kota;
5. Pemberian rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata lintas kabupaten/kota;

6. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan dan pariwisata;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (*UPTD*);
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terdiri dari: 1 (*satu*) orang Eselon II/a, 8 (*delapan*) orang Eselon III/a dan 24 (*dua puluh empat*) orang Eselon IV/a juga terdapat 3 (*tiga*) orang jabatan fungsional arsiparis dan 1 (*satu*) orang pustakawan dengan susunan struktur organisasinya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - Sub Bagian Program, Informasi dan Humas;
  - Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
  - Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Sejarah dan Nilai Budaya, terdiri dari:
  - Seksi Permuseuman dan Pelestarian Cagar Budaya;
  - Seksi Sejarah; dan
  - Seksi Nilai Budaya.
4. Bidang Bahasa dan Seni, terdiri dari:
  - Seksi Bahasa
  - Seksi Pembinaan SDM dan Lembaga Kesenian; dan
  - Seksi Warisan dan Diplomasi Seni Budaya.
5. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari:
  - Seksi Pengembangan Infrastruktur Pariwisata;
  - Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata; dan
  - Seksi Pengembangan Kawasan Wisata

6. Bidang Pemasaran, terdiri dari:
  - Seksi Pengembangan Komunikasi dan Strategi Pemasaran Pariwisata;
  - Seksi Atraksi Wisata;
  - Seksi Analisa dan Pengembangan Segmen Pasar.
7. Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan, terdiri dari:
  - Seksi Kemitraan dan Investasi Industri Pariwisata;
  - Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata;
  - Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Seni dan Budaya, terdiri dari:
  - Kepala UPTD
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Seksi Pengelolaan Taman Budaya
  - Seksi Pengelolaan Taman Sulthanah Shafiatuddin; dan
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Aceh, terdiri dari:
  - Kepala UPTD
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Seksi Koleksi dan Bimbingan Edukasi
  - Seksi Preparasi dan Konservasi
  - Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa bidang pekerjaan yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 5 (lima) bidang teknis (Bidang Sejarah dan Nilai Budaya, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pengembangan Destinasi, Bidang Pemasaran dan Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan) dan 2 (dua) Unit Pelaksana Tugas Teknis/*UPTD* (*UPTD* Museum Aceh dan *UPTD* Taman Seni dan Budaya Aceh).

**Sekretariat** mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata serta melakukan pengelolaan urusan

---

administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. **Bidang Sejarah dan Nilai Budaya** mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya, sejarah dan nilai budaya. **Bidang Bahasa dan Seni** mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian bahasa.

**Bidang Pengembangan Destinasi** mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata, Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Pariwisata serta Pengembangan Kawasan Wisata. **Bidang Pemasaran** mempunyai tugas melakukan komunikasi dan strategi pemasaran pariwisata, atraksi wisata dan analisa dan pengembangan segmen pasar. **Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan** mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi perizinan usaha akomodasi dan restoran, jasa dan standarisasi produk usaha pariwisata.

**UPTD Museum Aceh** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penelitian dan penerbitan, penyajian dan pemberian bimbingan edukatif benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang bersifat regional. **UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan dan eksperimen karya seni budaya, pagelaran dan pameran seni budaya, ceramah, temu karya, sarasehan dan lokakarya, dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran seni budaya, tata usaha dan urusan kerumahtanggaan pada Taman Budaya dan Taman Sulthanah Shafiatuddin.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa kendala yang bersifat tantangan, sehingga berdampak langsung pada upaya pencapaian keberhasilan kinerja bidang kebudayaan dan pariwisata. Seluruh kendala tersebut menjadi isu-isu strategis bidang kebudayaan dan pariwisata yang memerlukan perhatian dan prioritas penanganan melalui berbagai kebijakan dan strategi pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.

## 2.2. Sumberdaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki 191 (seratus sembilan puluh satu) pegawai tetap. Selain pegawai tetap, terdapat juga pegawai kontrak yang berjumlah 55 orang. Semua pegawai ditempatkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan juga UPTD yang berada di bawah pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Adapun rincian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Satuan Kerja/Bidang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat	35	18	53
2.	Sejarah dan Nilai Budaya	7	11	18
3.	Bahasa dan Seni	6	8	14
4.	Pengembangan Destinasi	13	6	19
5.	Pemasaran	7	4	11
6.	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan	5	8	13
7.	UPTD Museum Aceh	18	15	33
8.	UPTD Taman Seni & Budaya	20	6	26
9.	Jabatan Fungsional Tertentu	3	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>114</b>	<b>77</b>	<b>191</b>
10.	Kontrak			
	a. Administrasi	6	5	11
	b. Satpam	18	-	18
	c. Cleaning Service	26	-	26
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>5</b>	<b>55</b>
<b>Total</b>		<b>164</b>	<b>82</b>	<b>246</b>

Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – Juni 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada pegawai tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sudah mencapai

40%. Secara keseluruhan pegawainya, termasuk pegawai kontrak, maka keterwakilan perempuan yang bekerja di dinas tersebut mencapai 33%. Jumlah tersebut sudah dapat memenuhi target MDGs sebesar 33% terhadap kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan.

Jenjang kepangkatan merupakan hal penting dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Tujuan kepangkatan adalah untuk memenuhi jenjang karir dalam menjalankan roda kepemimpinan lembaga. Rincian jenjang kepangkatan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Satuan Kerja	Pangkat				
		I	II	III	IV	Jlh
1.	Sekretariat	1	17	34	1	53
2.	Sejarah dan Nilai Budaya	-	3	12	3	18
3.	Bahasa dan Seni	-	2	11	1	14
4.	Pengembangan Destinasi	-	2	15	2	19
5.	Pemasaran	-	1	8	2	11
6.	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan	-	-	12	1	13
7.	UPTD Museum Aceh	3	7	21	2	33
8.	UPTD Taman Seni & Budaya	-	6	16	2	26
9.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	3	1	4
	<b>Jumlah</b>	4	40	132	15	191

Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – Juni 2018

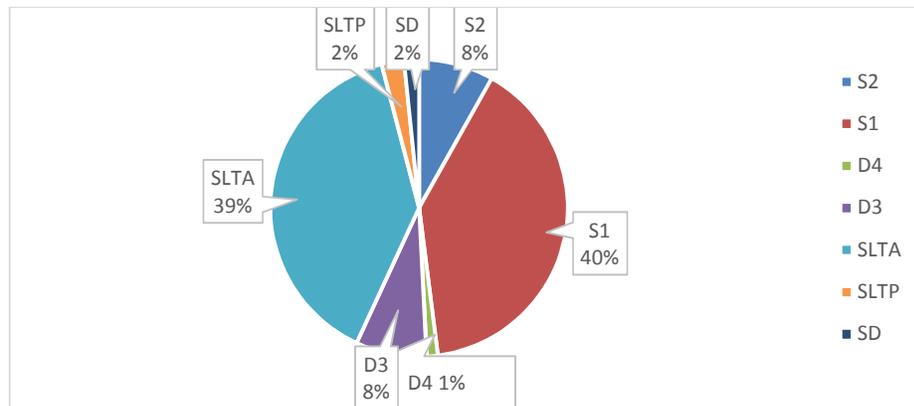
Dilihat dari kepangkatan pegawai dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, maka golongan III lebih mendominasi jenjang kepangkatan lainnya. Jenjang kepangkatan golongan tersebut terdiri dari golongan IV berjumlah 15 orang, golongan III 132 orang, golongan II 40 orang, dan golongan I berjumlah 4 orang.

Jenjang pendidikan pegawai merupakan indikator yang perlu mendapat perhatian dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Aceh. Adapun gambaran tentang jenjang pendidikan pegawai dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



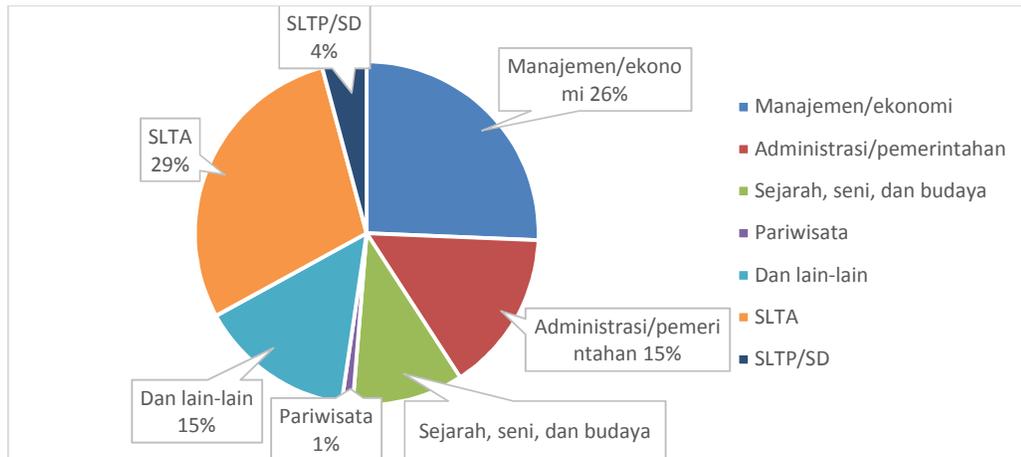
Jenjang pendidikan pegawai tetap dan kontrak berdasarkan diagram di atas secara keseluruhan didominasi jenjang pendidikan S1 sebanyak 40%. Berikutnya adalah jenjang pendidikan SLTA 39%, S2 dan D3 8% dan yang lainnya berada antara 2 dan 1%.

Keahlian seseorang dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh merupakan hal yang sangat penting dimiliki. Di dalam menjalankan sebuah lembaga pemerintahan, ada beberapa keahlian yang harus dipenuhi. Pertama ahli administrasi pemerintahan bertujuan untuk mengorganisir sistem administrasi perkantoran. Kemudian ilmu manajemen dan ekonomi bertujuan untuk mengelola lembaga dan juga menjalankan serta mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian lembaga.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menangani dua kementerian yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, keahlian kedua bidang tersebut sangat diperlukan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dinas. Ilmu kepariwisataan dan kebudayaan tentunya diperlukan dalam menjalankan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Adapun rincian keilmuan sumberdaya manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar II.2

## Jumlah Pegawai Berdasarkan Keahlian/Jurusan



Keahlian yang tertera pada diagram di atas menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki keahlian di bidang manajemen dan ekonomi berjumlah 26%, administrasi dan pemerintahan 15%, sejarah, seni, dan budaya 10%, pariwisata 1%, dan keahlian lain-lain berjumlah 15%. Keahlian lain-lain yang dimaksud adalah Sains Pembangunan, Pendidikan, Ilmu Hukum, Konservasi Sumberdaya Hutan, Ilmu Komputer, Ilmu Sosial, Politik, Perpustakaan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Teknik Mesin, dan ilmu Kimia. Pada rekapitulasi keahlian tersebut, SLTA mendominasinya yaitu 29%. Namun, pada level SLTA ini sebagiannya sudah memiliki keahlian dasar juga apalagi lulusan dari sekolah kejuruan.

Secara umum, keahlian yang dimiliki oleh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sudah mencukupi ditambah lagi dengan pengalaman dan pelatihan-pelatihan akan semakin memperkuat posisi dari masing-masing pegawai. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tenaga ahli dari perguruan tinggi dan juga menjalin kerjasama lintas sektoral dalam memperkuat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi instansi.

### 2.2.2 Asset/Modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki sejumlah aset/ modal berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan/mesin, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya (misalnya buku dan barang seni/budaya). Berdasarkan rekapitulasi barang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh hingga 31

---

Desember 2017, asset/barang modal berdasarkan kondisinya dalam keadaan baik, rusak berat dan tidak ditemukan fisiknya (TDF). Aset/modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan kondisi baik sebanyak 8.207 (delapan ribu dua ratus tujuh) unit dengan nilai perkiraan Rp 213.996.671.456,-. Untuk asset/barang modal dengan kondisi rusak berat sebanyak 14 (empat belas) unit dengan nilai perkiraan sejumlah Rp 592.369.000,-. Sedangkan asset/barang modal dengan kondisi belum teridentifikasi sebanyak 8.236 (delapan ribu dua ratus tiga puluh enam) unit dengan perkiraan sejumlah Rp 8.188.199.978,-.

Asset/barang modal yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berupa **tanah** sebanyak 10 (sepuluh) lokasi dengan perkiraan nilai aset sejumlah Rp. 87.450.677.500,-. Pada kategori **Gedung dan bangunan**, asset/modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang dimiliki sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) unit dengan total perkiraan aset sejumlah Rp. 113.392.869.879,- dengan kondisi baik. Selain itu ada sekitar 9 (sembilan) unit aset/modal berupa baliho dan rambu-rambu pada kategori bangunan/gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak ditemukan fisiknya (TDF).

Untuk asset/barang modal kategori **peralatan dan mesin** terdapat 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) unit dengan perkiraan nilai aset sekitar Rp. 8.548.626.666,- dengan kondisi baik, sedangkan dengan kondisi rusak berat ada 14 (empat belas) unit dengan nilai Rp. 592.369.000 serta dengan kondisi tidak ditemukan fisiknya (TDF) sekitar 604 (enam ratus enam) unit. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga memiliki asset berupa **jalan/irigasi/jaringan** sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan nilai perkiraan Rp 660.486.121,- dalam mendukung kerja-kerja di bidang kebudayaan dan pariwisata Provinsi Aceh. Aset tetap lainnya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh hingga akhir tahun 2017 berupa buku perpustakaan dan barang-barang bercorak seni/budaya. Aset tetap lainnya ini dari data yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terdapat 7.308 unit dengan nilai perkiraan Rp. 3.914.011.290,- dengan kondisi baik, sedangkan untuk asset yang tidak diketahui fisiknya sekitar 7.605 (tujuh ribu enam ratus lima) unit.

---

Dari sejumlah asset dan barang modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang telah diuraikan, terdapat kebutuhan strategis perencanaan relokasi gedung kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh kedepannya. Perencanaan relokasi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dinilai strategis guna mendukung tugas-tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Beberapa tahun belakangan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memperlihatkan kinerja dengan intensitas dan frekuensi tinggi. Kinerja yang dilakukan selama ini telah melibatkan banyak pihak pelaku kebudayaan dan pariwisata lokal/nasional/internasional. Untuk itu menghadirkan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh beserta fasilitas yang representatif dari segi kuantitas dan kualitas sangat strategis diwujudkan segera. Diharapkan dengan hadirnya kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang representatif akan mendukung kerja-kerja di bidang ini dalam mewujudkan Aceh Hebat.

### 2.2.3 Unit Usaha Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Unit usaha atas sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berupa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan bentuk lainnya. Gambaran umum berkenaan dengan unit usaha atas sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh selama ini telah menghasilkan profit berupa penambahan pendapatan daerah secara finansial oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Beberapa sumber daya yang telah menghasilkan profit seperti UPTD Taman Seni dan Budaya; Gedung Teuku Chik Ditiro; Taman Ratu Safiatuddin dan Museum Aceh. Sejauh ini profit tersebut belum dikelola dengan maksimal untuk mendatangkan pendapatan asli Aceh. Perlu perencanaan dan unit usaha yang kreatif dan tepat untuk memaksimalkannya.

Untuk UPTD dan unit lainnya milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh belum memberikan profit secara finansial berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun profitnya berupa nilai kebermanfaatan dan nilai multi efek di bidang ekonomi/sosial/budaya bagi masyarakat sekitar dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sendiri. Untuk beberapa hal lain berkenaan aset/modal yang masih dalam proses perencanaan hibah kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, telah direncanakan pula langkah-

---

langkah strategis untuk mengantisipasi bertambahnya aset/modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh**

### **2.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas dan Interpretasi gap pencapaian target kinerja**

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mengacu pada sasaran/target renstra perangkat daerah tahun 2012-2017. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2012-2017 merupakan turunan dari visi dan misi Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh serta visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Visi dan Misi tersebut dituangkan pada tujuan kegiatan, rencana capaian kegiatan dan hasil kegiatan yang meliputi berbagai langkah yang telah dilakukan serta skala prioritas program maupun kebijakan.

Adapun target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang terangkum pada Renstra 2012 - 2017 adalah sebagai berikut :

1. Terpeliharanya dan teramalkannya nilai-nilai budaya dan Dinul Islam dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pendayagunaan dan pemanfaatan warisan budaya, nilai-nilai Syariat Islam dan tersedianya kawasan wisata alam unggulan.
3. Peningkatan aktivitas pelestarian seni budaya yang berskala nasional dan internasional.
4. Tersedia dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terjalannya kerjasama para pemangku kepentingan serta terbangunnya jiwa kemandirian berusaha bidang kebudayaan dan pariwisata.
5. Terbangunnya kesadaran, kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungan situs budaya, peningkatan wawasan pengetahuan para budayawan dan seniman, komunitas dan tokoh adat, meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata dan masyarakat lingkungan objek wisata.
6. Terselenggara dan ikut serta pada berbagai event, serta promosi potensi budaya dan wisata.

---

Untuk mengetahui sasaran dan target renstra tersebut tercapai, maka capaian kinerja layanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh dapat dilihat penjelasannya sesuai dengan tabel T-C.23. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Jumlah Group Kesenian

Berdasarkan data tabel di atas membuktikan bahwa target dari indikator kinerja sasaran strategis pertama yang ditetapkan pada RPJMA pada tahun 2012-2017 terealisasi di atas 100%. Program kegiatan saling mendukung untuk mencapai target tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target pertama adalah pelibatan sanggar sebagai upaya pembinaan pada Pagelaran Taman Ratu Safiatuddin dalam kegiatan “Pagelaran TARASA”. Kegiatan ini melibatkan 50 sanggar dari 23 kabupaten dan kota se-Aceh. Kegiatan yang dilakukan selama 5 tahun telah berhasil membina dan melakukan penguatan sanggar berjumlah 360 sanggar dalam bentuk kegiatan berupa pemberian bantuan alat/perlengkapan sanggar dan pembinaan dalam kegiatan festival, pagelaran dan perlombaan yang melibatkan sanggar serta kelompok musik.

2. Pelestarian Situs dan Benda Cagar Budaya

Capaiannya telah melebihi target karena adanya kerjasama aktif dengan masyarakat yang memberikan masukan, usulan tentang benda dan situs cagar budaya yang layak dilestarikan. Jumlah benda dan situs cagar budaya yang dilestarikan sejak tahun 2013-2017 berjumlah 85 buah dari 909 benda dan situs cagar budaya yang terdapat di seluruh Aceh termasuk di Museum Aceh. Perlakuan terhadap benda dan situs berupa kegiatan fisik, kajian arkeologi, registrasi, dan dokumentasi objek peninggalan sejarah dan purbakala.

Jumlah benda dan situs yang terlestarikan setiap tahunnya terus meningkat merupakan suatu prestasi dan kebanggaan bagi pemerintah Aceh. Namun, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana benda dan situs tersebut menjadi berdaya setelah dilestarikan. Untuk itu, perlu dilakukan

---

program besar dalam merencanakan pengembangannya dengan konsep keterpaduan antara kawasan cagar budaya dan objek unggulan pariwisata, sehingga menjadi kawasan wisata budaya sebagai objek pariwisata terpadu. Situs yang dikembangkan akan terkoneksi dengan objek wisata lainnya di kawasan pengembangan wisata dan benar-benar layak ditawarkan sebagai objek wisata baru. Jadi, pada saat wisatawan mengunjungi objek wisata, keinginan wisatawan untuk melihat, mengerjakan, dan membeli dapat terpenuhi.

### 3. Penyelenggaraan Seni Budaya yang Berskala Nasional dan Internasional

Capaian kinerja pada penyelenggaraan seni budaya yang berskala nasional dan internasional dari tahun 2013-2017 terlaksana dengan baik. Persentase pelaksanaan kegiatannya selalu meningkat yaitu 182% tahun 2013, 26% tahun 2014, 93% tahun 2015, 37% tahun 2016, dan 111,11% tahun 2017. Rata-rata kegiatan yang terlaksana sebesar 89,82%. Pelaksanaan layanan kinerja tersebut yang paling berhasil adalah 2013 dan 2015. Keberhasilan program di tahun 2014 adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan internasional yang bertujuan untuk mempromosikan keunggulan Aceh sebagai destinasi wisata dunia. Adapun kekuatan program di tahun 2015 adalah pelaksanaan kegiatan yang melibatkan negara-negara asing yang dilaksanakan di Sabang dan Banda Aceh. Kedua tahun tersebut dapat memancing kedatangan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Kegiatan tersebut pada umumnya dapat meningkatkan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara serta dapat membuka peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha dan swasta untuk berkiprah dan melakukan investasi di sektor pariwisata.

### 4. Pengembangan Destinasi Wisata

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah objek wisata unggulan yang dikembangkan. Pada dasarnya Aceh memiliki 966 obyek wisata potensial tahun 2015, termasuk di dalamnya obyek wisata alam, wisata budaya serta wisata minat khusus yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Potensi tersebut telah menarik kunjungan wisatawan lokal maupun

---

mancanegara ke Aceh. Target capaian yang ditetapkan di dalam RPJMA selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan objek wisata unggulan dari objek wisata potensial sebanyak 120 lokasi. Namun, jumlah penambahan objek wisata dari tahun 2012-2014 sudah mencapai 144 lokasi objek wisata unggulan. Realisasi pada target inipun sudah melebihi dari amanah RPJMA. Aceh sampai saat ini memiliki 250 objek wisata unggulan di seluruh Aceh. Berdasarkan data tersebut, perlu pengembangan untuk penguatan terhadap objek wisata yang dijadikan sebagai objek wisata unggulan baik dari segi pembangunan, pembinaan, penataan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung objek wisata.

#### 5. Kenaikan Kunjungan Wisatawan

Dalam RPJMA 2012-2017 diharapkan kenaikan kunjungan wisatawan sebesar 20%. Pada tahun 2013 kenaikannya hanya 5,9%, namun tahun berikutnya kunjungan wisatawan ke Aceh naik menjadi 27,7%. Kenaikan ini akibat program pemerintah Aceh lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan pendidikan). Secara tidak langsung berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke Aceh. Meskipun anggaran investasi pembangunan sarana pendukung pada tahun 2014 diminimalisir. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan semakin meningkat sejak tahun 2015 dan 2016 sebesar 21% dari target renstra dinas 20%, kenaikannya setara dengan 80,18 % dari target jumlah kunjungan yang ditetapkan. Pada dasarnya, jumlah kunjungan wisatawan secara umum terus meningkat (2013-2017), rata-rata peningkatannya 19,83% pertahun. Demikian pula kontribusi sektor pariwisata Aceh, hal itu bisa saja diakibatkan adanya kebijakan nasional yang memicu kunjungan wisatawan ke Indonesia seperti pembebasan visa bagi sejumlah negara dan kemudahan izin singgah kapal pesiar dan yacht yang berdampak bagi peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh khususnya wisatawan asing. Sedangkan bagi wisatawan nusantara sangat dipengaruhi oleh pemusatan beberapa kegiatan nasional di Banda Aceh seperti yang dipaparkan pada poin nomor 3. Hal itu dapat ditafsirkan bahwa peningkatan kunjungan

---

wisatawan berpengaruh terhadap program-program yang berskala internasional dan nasional. Untuk itu, program selanjutnya juga menambah kegiatan yang berskala nasional dan internasional pada destinasi-destinasi yang akan dikembangkan.

6. Menambah jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan

Target selama 2015 dan 2016 sebanyak 14 objek dan terlaksana sebanyak 21 objek daya tarik wisata (ODTW) melalui kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung di obyek-obyek pariwisata unggulan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memang memberikan prioritas untuk peningkatan fasilitas pendukung di objek wisata unggulan sehingga kunjungan wisatawan dapat lebih meningkat dan stake holder pariwisata semakin bersemangat untuk mengembangkan industri pariwisata sebagai bentuk dukungan dan rangsangan bagi daerah untuk mengembangkan kawasan wisata unggulannya.

Tabel II.3  
(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPA Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>I</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>																		
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi																		
B	Fokus Kesejahteraan Sosial																		
C	Fokus Seni Budaya dan Olahraga																		
I	Kebudayaan																		
	1.1. Jumlah grup kesenian (buah)				50	50	30	60	50	50	91	110	109	126	100	182	360	182	252
	1.2. Jumlah gedung (buah)				4	4	4	4	3	1	-	4	-	25	-	125	100	-	
<b>II</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>																		
A	Fokus Pelayanan Urusan Wajib																		
17	Kebudayaan																		
	17.1. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)				34	27	27	27	27	62	7	25	10	30	182	26	93	37	111,11
	17.2. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)				2	5	5	5	6	5	5	2	4	-	250	100	40	80	-
	17.3. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (paket)				53	58	14	10	67	67	86	43	11	12	126	146	307	110	17,91
B	Fokus Layanan Urusan Pilihan																		
4	Pariwisata																		
	4.1. Kunjungan wisata				1.422.142	1.706.571	2.047.886	2.457.463	2.948.955	1.118.178	1.428.262	1.717.116	2.154.249	2.364.383	79	84	84	88	80,18
	- Wisatawan Nusantara				1.381.746	1.658.095	1.989.715	2.387.658	2.865.189	1.075.626	1.377.541	1.662.528	2.077.797	2.288.625	78	83	84	87	79,88
	- Wisatawan Mancanegara				40.396	48.476	58.171	69.805	83.766	42.552	50.721	54.588	76.452	75.758	105	105	94	110	90,44
	4.2. Kontribusi sektor pariwisata rupiah (juta rupiah)				4.306.824,0	5.168.188,0	6.201.826,0	7.442.191,0	8.930.630,0	2.700.784,3	2.993.846,7	3.303.341,2	3.704.531,4	4.250.000	63	58	53	50	47,58

Tabel II. 4  
(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	(18)	(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BELANJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	66.556.105.511	53.177.413.343	60.268.821.466	53.858.275.677	140.230.437.515	61.454.102.327	48.138.570.675	55.749.944.417	50.454.117.736	110.502.091.836	92,33	90,52	92,50	93,68	78,80	74.818.210.702,4	65.259.765.398,2
BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.816.760.872	20.482.971.855	19.572.892.966	20.206.439.345	22.408.773.882	18.568.559.746	19.392.909.084	19.320.270.378	19.990.165.290	19.325.735.029	93,70	94,68	98,71	98,93	86,24	20.497.567.784	19.319.527.905,4
Belanja Pegawai	19.816.760.872	20.482.971.855	19.572.892.966	20.206.439.345	22.408.773.882	18.568.559.746	19.392.909.084	19.320.270.378	19.990.165.290	19.325.735.029	93,70	94,68	98,71	98,93	86,24	20.497.567.784	19.319.527.905,4
BELANJA LANGSUNG	46.739.344.639	32.694.441.488	40.695.928.500	33.651.836.332	117.821.663.633	42.885.542.581	28.745.661.591	36.429.674.039	30.463.952.446	91.176.356.807	91,75	87,92	89,52	90,53	77,39	54.320.642.918,4	45.940.237.492,8
Belanja Pegawai	4.139.944.069	3.362.228.000	2.272.013.090	2.452.641.812	2.881.707.988	3.768.169.800	3.148.171.394	2.193.143.600	2.333.765.000	2.487.744.869	91,02	93,63	96,53	95,15	86,33	3.021.706.991,8	2.786.198.932,6
Belanja Barang dan Jasa	36.978.783.570	26.515.026.965	31.900.489.810	28.737.824.520	60.542.721.645	33.672.047.281	22.843.896.197	28.108.039.439	25.820.277.446	45.328.953.798	91,06	86,15	88,11	89,85	74,87	36.934.969.302	31.154.642.832,2
Belanja Modal	5.620.617.000	2.817.186.523	6.523.425.600	2.461.370.000	54.397.234.000	5.445.325.500	2.753.594.000	6.128.491.000	2.309.910.000	43.359.658.140	96,88	97,74	93,95	93,85	79,71	14.363.966.624,6	11.999.395.728

Berdasarkan tabel T-C.24 menunjukkan tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Rasio antara realisasi dan anggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) maka serapan total anggaran yang tertinggi pada tahun 2016 sebesar 93,68% dan rasio terendah pada tahun 2017 sebesar 78,80%. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran berdasarkan anggaran belanja langsung, belanja tertinggi pada tahun 2013 sebesar 91,75% dan rasio terendah pada tahun 2017 sebesar 77,39%.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

### 2.4.1 Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah Renstra Kementerian Pariwisata dalam membangun pariwisata sampai tahun 2019 adalah mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan pariwisata pada kementerian adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing dipasar internasional. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif sehingga kinerja pemasaran pariwisata mencapai produktifitas maksimal. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal

Rencana strategis kementerian pariwisata menjadi acuan dalam bidang pariwisata Provinsi Aceh. Arah rencana strategis pengembangan pariwisata Indonesia secara umum yaitu melakukan penguatan dan diversifikasi ekonomi kreatif pada tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia dengan harapan hal ini

---

mampu mewujudkan produk unggulan pariwisata di masing-masing daerah. Cara untuk mewujudkan arah pembangunan strategis tersebut maka arah kebijakan pariwisata nasional berdasarkan rentra K/L yaitu mengembangkan destinasi pariwisata nasional dengan mewujudkan destinasi pariwisata, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional daerah dan masyarakat.

Sedangkan analisis rencana strategis yang dimiliki oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang membawahi urusan budaya. Kebijakan diarahkan pada pelestarian terhadap kebudayaan Indonesia dengan melakukan berbagai tindakan antara lain peningkatan kapasitas dan peran insan budaya yang kuat dan tangguh dalam melestarikan kebudayaan. Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian nilai sejarah dan warisan budaya benda dan tak benda merupakan kebijakan yang kedua dilakukan. Meningkatnya inovasi dan kreatifitas serta apresiasi atas karya budaya, peningkatan apresiasi dan kebanggaan terhadap keberagaman serta peran aktif dalam caturan budaya dunia, peningkatan sistem informasi kebudayaan, peningkatan sarana, dan prasarana penunjang pelestarian budaya, penyediaan dana serta penguatan tata kelola yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolanya.

Sementara Rencana Strategis Provinsi Aceh pada kewenangan kebudayaan menempatkan dan berorientasi pada tiga kebijakan utama yakni perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pada seni budaya, sejarah purbakala dan benda cagar budaya. Hal ini berarti bahwa dalam aspek kebudayaan, semua aset harus mendapatkan perlindungan secara maksimal sebagai bagian dari upaya-upaya melestarikan keberadaan dari seni budaya, sejarah purbakala dan benda cagar budaya. Kemudian terkait dengan kebijakan pengembangan, menunjukkan sejauh mana keberadaan aset kebudayaan dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi dan memiliki nilai dan daya tarik pariwisata.

Aspek pemanfaatan menunjukkan keberadaan aset kebudayaan dapat memberi manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kepariwisataan telah menjadi prioritas skala provinsi di masa yang akan datang dengan mengutamakan kualitas agar berdaya saing yang didasari oleh pemahaman

---

bahwa pembangunan kepariwisataan sebagai salah satu sektor pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang diarahkan kepada pembangunan yang kreatif dan inovatif serta berbasis pada budaya dan kearifan lokal.

Kewenangan pariwisata di level Provinsi Aceh memberikan arahan dan kebijakan bahwa pembangunan pariwisata meliputi 4 cakupan komponen yaitu:

1. Destinasi Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, pembangunan fasilitas umum, pembangunan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat, secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Pemasaran Pariwisata, berkaitan dengan pemasaran pariwisata bersama terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
3. Industri Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan struktur (fungsi, hirarki, hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Kelembagaan Kepariwisata, berkaitan dengan pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Dalam merencanakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Aceh menggunakan konsep Sustainable Tourism Development sebagai paradigma pembangunan kepariwisataan Aceh. Konsep *Sustainable Tourism Development* pada intinya menekankan pada 4 (empat) prinsip yakni: berwawasan lingkungan, diterima secara sosial dan budaya, layak secara ekonomi, dan memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, meningkatkan kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan, meningkatkan dan menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang serta meningkatkan keseimbangan dalam pembangunan. Dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan didasari oleh 3 (tiga) aspek penting yakni:

---

*communitybased tourism, good tourism governance, green tourism* dan *borderless tourism*.

#### 2.4.2 Telaah RTRW dan Peluang terhadap Pengembangan Dinas

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang erat kaitannya dengan bidang kebudayaan dan pariwisata ialah peruntukan dan pembangunan kawasan yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi dari usaha pelestarian sejarah, seni, dan budaya serta pengembangan pariwisata kreatif di Provinsi Aceh. Kawasan pengembangan wisata dalam qanun RTRW Aceh yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan adalah kawasan Banda Aceh dan sekitarnya sebagai kawasan wisata sejarah, budaya, dan religi. Kawasan Pulau Weh dan sekitarnya sebagai kawasan wisata bahari (taman laut). Sementara pengembangan kawasan untuk ke depan adalah penguatan kedua kawasan di atas yang diprogramkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya direncanakan sebagai pengembangan kawasan agro dan ekowisata. Kawasan pengembangan agro dan ekowisata juga akan direncanakan sebagai program pengembangan pariwisata di 17 (tujuhbelas) kabupaten/kota dan tidak termasuk ke dalam lokasi pusat *agroindustry*. Kawasan Pulau Simeulue dan sekitarnya juga menjadi pusat perhatian pemerintah. Hanya saja, aksesibilitas menuju lokasi perlu mendapat perhatian besar karena kawasan tersebut sangat cocok dikembangkan sebagai wisata bahari dan juga baik untuk berselancar.

Proses perencanaan strategis, melakukan analisis terkait dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Provinsi Aceh maupun RTRW Provinsi Aceh merupakan hal penting untuk dilakukan. Dengan demikian, diharapkan ada keterpaduan dan *linkage* dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kebudayaan dan pariwisata pada 5 (lima) tahun mendatang.

Arahan pembangunan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi menempatkan posisi kebudayaan dan pariwisata pada zona atau kawasan budidaya dengan arahan pengembangan pada kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata budaya. Adapun strategi pengembangannya dilaksanakan melalui upaya-upaya

---

melestarikan objek wisata, memanfaatkan objek wisata secara bijaksana, mengembangkan obyek wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya serta menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai dan memadai.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan ketentuan pelarangan pendirian bangunan.

Gambaran RTRW Provinsi Aceh di atas merupakan peluang bagi pengembangan pelestarian sejarah dan budaya Aceh. Selain itu, potensi pengembangan destinasi objek wisata baik wisata alam, agro, maupun kampung-kampung wisata dapat dijadikan sebagai andalan wisata Aceh untuk dikembangkan. Namun, peluang-peluang tersebut terkadang mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengembangan pelestarian sejarah dan budaya Aceh. Hambatan tersebut juga dirasakan dalam pengembangan industri pariwisata, misalnya isu strategisnya adalah:

1. Objek-objek wisata dan cagar budaya yang terdapat di Aceh banyak yang belum terhubung dan terkoneksi oleh jaringan jalan, telekomunikasi, dan jaringan air bersih sehingga dalam pengembangan objek wisata dan cagar budaya menjadi terkendala sehingga perlu dilakukan pemetaan terhadap objek wisata dan cagar budaya yang belum termasuk dalam rencana struktur ruang Aceh.
2. Dalam pemanfaatan hutan lindung sering terjadi pertentangan dengan BKSDA dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya pada pengelolaan Taman Wisata Alam yang berada di bawah BKSDA sehingga sering terjadi tumpang tindih peraturan.
3. Masih terdapat kawasan dan objek wisata serta cagar budaya yang belum tertampung dalam RTRW. Hal ini dikarenakan belum lengkapnya data-data dan informasi mengenai objek wisata dan cagar budaya sehingga perlu adanya pembaharuan data.
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang baik di kawasan pengembangan wisata dan budaya. Untuk itu perlu dipikirkan sarana dan

prasarana yang harus dibangun dan lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pembangunan dengan melihat kepada jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung.

5. Dalam RTRW telah ditetapkan kawasan-kawasan yang menjadi pengembangan kawasan strategis yang menjadi tanggung jawab dinas kebudayaan dan pariwisata yaitu kawasan agrowisata, kawasan situs sejarah dan kawasan Lhok Nga, namun untuk kawasan tersebut masih sedikit pendukung yang dilakukan oleh dinas sehingga perlu dilakukan perencanaan dan program-program untuk mendukung kawasan strategis tersebut.

Pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam pengembangan pariwisata akan menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan wisata seperti kerusakan terhadap keanekaragaman hayati, limbah, kepemilikan lahan dan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat serta pengaruh budaya. Selain dampak negatif, pengembangan pariwisata juga akan memberikan dampak positif berupa perlindungan terhadap lingkungan sehingga akan memberikan nilai jual, peningkatan lapangan pekerjaan dan terkenalnya budaya tradisional masyarakat.

Dalam pengembangan kawasan cagar budaya juga akan menimbulkan efek pada lingkungan dan masyarakat sekitar dimana akan terjadi pembatasan terhadap suatu kawasan dimana juga akan membatasi aktivitas masyarakat sehingga akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat baik berupa kepemilikan lahan dan aktivitas di kawasan tersebut. Dalam hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat negatif maka dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan melibatkan masyarakat khususnya yang berada dan beraktivitas dalam kawasan yang menjadi wilayah pengembangan pariwisata.

#### 2.4.3 Macam Pelayanan, Perkiraan Kebutuhan Pelayanan dan Arahannya Lokasi Pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah penggabungan 2 (*dua*) dinas teknis yaitu Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Provinsi Nanggroe

---

Aceh sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun fungsi dinas dalam melaksanakan tugasnya adalah:

1. Pelayanan administrasi atau pelayanan umum berupa pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, serta penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di daerah.
2. Pelayanan jasa atau teknis berupa pembinaan teknis, pemberian rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata lintas kabupaten/kota. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum, pengawasan dan pengendalian, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (*UPTD*), dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Berdasarkan analisis sumberdaya manusia yang mendukung pelayanan dinas tersebut menunjukkan bahwa bidang teknis kebudayaan dan pariwisata masih diperlukan untuk penguatan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Berdasarkan persentasi keahlian dari tenaga ahli dinas menunjukkan belum adanya keseimbangan keahlian staf dalam menunjang pelayanan dinas. Dua bidang teknis yang utama di dalam dinas yaitu kebudayaan sebanyak 10% sementara pariwisata hanya 1%. Untuk pengembangan pelayanan ke depan memerlukan penjaringan pegawai berdasarkan keahlian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dinas.

---

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh**

Menyasar pada tujuan umum pembangunan nasional dan daerah agar meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, serta dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan RPJM Aceh 2017-2022 bidang kebudayaan dan pariwisata khususnya, yakni: memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah dan akhlak, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk hingga terbangunnya bank data terintegrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terus berbenah dan melakukan langkah-langkah terstruktur mulai dari menganalisis permasalahan, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan kedinasan, melalui evaluasi kinerja yang tertuang dalam dokumen renstra sebelumnya, guna menemukan masalah-masalah yang ingin diperbaiki. Analisis kemudian diorientasikan pada tujuan-tujuan yang mungkin dimunculkan bila perbaikan permasalahan yang ada diselesaikan, termasuk agar dapat ditemukannya alternatif pendekatan yang memberi peluang keberhasilan pelaksanaannya serta wujud kolaborasi yang perlu dikembangkan ke depan.

Beberapa permasalahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang teridentifikasi dalam evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, yakni:

1. Semakin mudarnya ciri kehidupan budaya masyarakat aceh yang berdampak pada semakin rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal, termasuk di dalamnya:
  - a. berkurangnya penutur bahasa ibu atau ragam bahasa asli daerah di Aceh;
  - b. terbatasnya keterjangkauan pemerintah atas penguatan kesenian maupun wujud warisan budaya lainnya yang memiliki nilai kesejarahan dan kebudayaan yang tinggi;
  - c. kehidupan sosial kemasyarakatan serta silaturahmi yang tidak lagi arif berpegang pada keistimewaan nilai adat dan norma kebudayaan Aceh; serta

- d. semakin langkanya tauladan kepemimpinan maupun kelola kelembagaan yang selaras dengan keistimewaan Aceh sebagai sebuah peradaban yang islami, damai serta mensejahterakan umat.
2. Terbatasnya sumber daya manusia kreatif dalam mengisi kebutuhan yang semakin meningkat untuk upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh, baik untuk kualifikasi peneliti dan pendidik bidang kebudayaan dalam upaya perlindungannya, serta penyaji, pencipta dan pengelola dalam upaya pelestarian dan kreatifitas pengembangan industri kepariwisataan berbasis budaya; yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni serta teknologi termutakhir.

Selain permasalahan secara umum pada bidang kebudayaan dan kepariwisataan, pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi dalam evaluasi pelaksanaan tupoksi, yaitu:

1. Kurangnya fasilitas, baik sarana maupun prasarana penunjang industri pariwisata berbasis budaya, secara kualitas maupun kuantitas, atas sumber daya budaya yang telah ada dan terlacak untuk kemudian dapat terus dikembangkan sebagai potensi pengembangan kepariwisataan yang lebih unggul dalam persaingan industri pariwisata dunia. Di antara fasilitas, baik sarana maupun prasarana yang belum tergarap secara optimal adalah pemanfaatan teknologi informasi yang terus tumbuh dan berkembang menjangkau segala aspek yang dibutuhkan bagi promosi kepariwisataan atau sarana akomodasi dan transportasi yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan masa tinggal wisatawan di Aceh.
2. Kurangnya kerjasama dan sinergisitas kerja tata kelola budaya dan kepariwisataan, baik antar satuan kerja perangkat daerah lintas bidang maupun kedinasan serta dengan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata secara luas, baik dalam skala kerja daerah tingkat I maupun tingkat II, maupun dengan masyarakat wisata dan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia, bahkan dengan masyarakat wisata dan pemerintah negara-negara internasional. Optimalisasi kerjasama kelola budaya dan wisata ini kiranya akan berdampak signifikan dalam capaian perluasan pasar pariwisata, termasuk potensi penggalangan investasi kepariwisataan yang menguntungkan sekaligus berkelanjutan.

Tabel III.1

(T-B.35) Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Semakin mudarnya ciri kehidupan budaya masyarakat Aceh dan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berkurangnya penutur bahasa ibu atau ragam bahasa asli daerah di Aceh;</li> <li>ii. Terbatasnya keterjangkauan pemerintah atas penguatan kesenian maupun wujud warisan budaya lainnya yang memiliki nilai kesejarahan dan kebudayaan;</li> <li>iii. Kehidupan sosial kemasyarakatan serta silaturahmi yang tidak lagi arif berpegang pada keistimewaan nilai adat dan norma kebudayaan Aceh; serta</li> <li>iv. Semakin langkanya tauladan kepemimpinan maupun kelola kelembagaan yang selaras dengan keistimewaan Aceh sebagai sebuah peradaban yang Islami, damai serta mensejahterakan umat.</li> </ul>	Dari sisi masyarakat, ketahanan terhadap bahasa sebagai identitas diri tergerus arus globalisasi/modernisasi. Dari sisi pemerintah, pemerintah belum menemukan formula yang tepat untuk menahan arus globalisasi/modernisasi.
2	Terbatasnya sumber daya manusia kreatif dalam mengisi kebutuhan yang semakin meningkat untuk upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh,	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sedikitnya hasil-hasil penelitian terkait penggalan potensi sumber daya budaya serta pengembangan industri kepariwisataan di Aceh;</li> <li>ii. Ketersediaan perangkat pembelajaran bidang kebudayaan dan pariwisata untuk segala jenjang pendidikan formal di Aceh masih belum memadai, mulai dari tenaga pendidik, kurikulum hingga sumber dan media pembelajarannya.</li> <li>iii. Belum terlindunginya aset-aset kebudayaan yang potensial untuk dijadikan sumber pengembangan industri pariwisata.</li> <li>iv. Kurangnya sumber daya penyaji, pencipta dan pengelola terlatih untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya pelestarian dan kreatifitas pengembangan industri kepariwisataan.</li> </ul>	Terbatasnya dukungan atas kegiatan-kegiatan eksplorasi kebudayaan serta peningkatan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni serta teknologi termutakhir di dalam bidang kebudayaan dan pariwisata.
3	Kurangnya fasilitas, baik sarana maupun prasarana penunjang industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Rendahnya nilai jual sebagian aset kepariwisataan di Aceh.</li> <li>ii. Lemahnya efektivitas daya promosi atas nilai dari ragam potensi destinasi wisata di Aceh yang mampu meningkatkan kunjungan wisnus dan wisman.</li> </ul>	Perencanaan dan perancangan sarana/ prasarana belum berkelanjutan ( <i>sustainable</i> ) serta penganggaran yang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	berbasis budaya, secara kualitas maupun kuantitas, termasuk pemanfaatan sumber daya budaya yang telah ada dan terlacak untuk kemudian dapat terus dikembangkan sebagai potensi pengembangan kepariwisataan yang lebih unggul dalam persaingan industri pariwisata dunia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. Jumlah pilihan destinasi (<i>Marine Tourism, Eco Tourism, Adventure Tourism, Heritage and Pilgrim Tourism, Culinary and Shopping Tourism, City and Village Tourism, Mice and Event Tourism, Sport Tourism, and Integrated Area Tourism</i>) yang belum berimbang dengan target optimalisasi kunjungan wisnus dan wisman.</li> <li>iv. Lemahnya daya kompetisi pemanfaatan teknologi informasi yang terus tumbuh dan berkembang menjangkau segala aspek yang dibutuhkan bagi promosi kepariwisataan</li> <li>v. Kurangnya sarana akomodasi dan transportasi yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan masa tinggal wisatawan di Aceh.</li> </ul>	belum optimal.
4	Kurangnya kerjasama dan sinergisitas kerja tata kelola budaya dan kepariwisataan, baik antar satuan kerja perangkat daerah lintas bidang maupun kedinasan serta dengan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata secara luas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Data-data tidak terintegrasi dengan pengelolaan yang akurat, baik dan benar.</li> <li>ii. Pembangunan infrastruktur pariwisata tidak utuh dan menyeluruh.</li> <li>iii. Pengembangan program-program kepariwisataan yang tidak mengikuti pesatnya perkembangan pariwisata dunia.</li> <li>iv. Minimnya investasi di bidang kebudayaan dan kepariwisataan</li> </ul>	Rendahnya kompetensi sumber daya manusia pengelola kepariwisataan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan tersebut di atas, yakni:

1. Proses pembelajaran sejarah dan kehidupan kebudayaan Aceh tidak terkawal secara tepat dan merata, baik melalui lembaga/institusi pendidikan formal atau nonformal lintas jenjang usia di Aceh, maupun melalui pemanfaatan program dan kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swadaya

---

masyarakat, atas wawasan pengetahuan, keilmuan dan keterampilan yang berorientasi pada keistimewaan sejarah serta kekayaan dan keragaman budaya di Aceh. Pesatnya arus informasi global dalam berbagai wujud, isi dan medianya adalah faktor lainnya yang juga memberi pengaruh terhadap persepsi dan ketahanan budaya masyarakat di Aceh, baik dalam kesehariannya berbahasa, gaya hidup, berkesenian, hingga dalam saat memilih profesi/pekerjaan sebagai sumber mata pencahariannya.

2. Minat masyarakat serta dorongan pemerintah umumnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia kreatif, untuk ketekunan bidang-bidang pekerjaan kebudayaan dan pariwisata khususnya, masih kurang dalam sistematika perencanaan yang bersifat strategis dan berkesinambungan. Hal ini juga dipengaruhi oleh lemahnya daya pengetahuan masyarakat umumnya oleh keterbatasan keterjangkauan informasi serta pengetahuan atas perkembangan keilmuan, keahlian dan keterampilan bidang budaya dan pariwisata, termasuk yang terfasilitasi dalam pembelajaran kependidikan formal maupun informal. Di sisi lain, keterbatasan peluang dan intensitas keikutsertaan para pelaku budaya maupun pelaku industri pariwisata yang terkait dengan pengembangan keahlian dan karier dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, baik dalam lingkup global, nasional dan bahkan internasional adalah faktor lainnya yang menghambat berkembangnya sumber daya manusia kreatif untuk mampu mengisi kebutuhan yang semakin meningkat, baik untuk upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh maupun tuntutan kreatifitas tata kelola pariwisata yang menuntut kreatifitas serta daya inovasi yang tinggi.
3. Dalam hal fasilitas, baik sarana maupun prasarana penunjang industri pariwisata berbasis budaya selain permasalahan dana, faktor yang mempengaruhi lainnya adalah masih lemahnya daya keberlanjutan (*sustainable*) atas perencanaan yang disiapkan, termasuk pemeliharannya serta pengembangannya. Fasilitas industri pariwisata, baik yang berbasis alam (*nature*), budaya (*culture*) dan buatan manusia (*Man Made*), tidak hanya diharapkan komprehensif untuk mengantisipasi kebutuhan konsep dan implementasi kepariwisataan yang terus berkembang, baik dari segi fungsi dan intensitas pemanfaatannya (*Marine Tourism, Eco Tourism, Adventure Tourism, Heritage and Pilgirm Tourism, Culinary and Shopping Tourism, City and Village Tourism, Mice and Event Tourism, Sport Tourism, and*

*Integrated Area Tourism*), maupun target optimal wisatawan yang dihadirkan (*Personal, Business, and International*).

4. Kerjasama dan sinergistas kerja tata kelola budaya dan kepariwisataan, baik antar satuan kerja perangkat daerah lintas bidang maupun kedinasan serta dengan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata secara luas baik dalam skala kerja daerah tingkat I maupun tingkat II maupun dengan masyarakat wisata dan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia masih kurang. Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat wisata dan pemerintah negara-negara internasional. Optimalisasi kerjasama kelola budaya dan wisata ini kiranya akan berdampak signifikan dalam capaian perluasan pasar pariwisata, termasuk potensi penggalangan investasi kepariwisataan yang menguntungkan sekaligus berkelanjutan.

Berpedoman pada identifikasi pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka prioritas dan sasaran pembangunan Aceh di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
2. Pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan dan pariwisata
3. Pengembangan destinasi pariwisata
4. Perluasan pemasaran pariwisata
5. Peningkatan sistem informasi terintegrasi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, industri budaya, dan kepariwisataan.

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan di Aceh. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. H. Nova Iriansyah, MT yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (*Pilkada*) yang demokratis pada tanggal 15 Februari 2017 telah menetapkan Visi Pemerintah Aceh Periode 2017-2022 yaitu: **"TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI"**. Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut:

**1). Aceh yang Damai**

Bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memmanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan;

**2). Aceh yang Sejahtera**

Bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak;

**3). Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani**

Bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Aceh Periode 2017-2022. Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Aceh tersebut akan ditempuh melalui 10 (*sepuluh*) Misi Pembangunan Aceh sebagai berikut :

**1). Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.**

Melalui Misi 1 ini akan tercipta pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar, serta merubah paradigma birokrasi bahwa aparatur adalah pelayan bagi masyarakat. Menempatkan aparatur pemerintah sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana reformasi birokrasi.

**2). Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hukum Mashab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mashab yang lain.**

Melalui Misi 2 ini akan mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dan membangun kembali nilai-nilai budaya dan sejarah ke-Acehan yang islami dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah. Disamping itu, Pemerintah Aceh akan meningkatkan kualitas SDM disektor yang mendukung wisata budaya yang bersendikan kekayaan khazanah budaya yang bersendikan kekayaan khazanah budaya dan nilai-nilai islami.

**3). Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.**

Melalui Misi 3 ini akan menguatkan pelaksanaan UUPA sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan menciptakan situasi aman dan damai yang berkelanjutan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan masyarakat.

**4). Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional.**

Melalui Misi 4 ini akan melahirkan Anak Aceh Cerdas (AAC) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi ditingkat nasional dan regional. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan mengurangi gap antara kebutuhan pembangunan daerah dengan output pendidikan dan menjadikan anak Aceh yang cerdas dan mampu bersaing serta siap menghadapi dunia kerja. Melalui Misi 4 ini juga akan mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan Aceh ditingkat nasional, regional dan internasional.

**5). Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi.**

Melalui Misi 5 ini akan tercipta pemenuhan akses layanan kesehatan yang gratis, lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat Aceh. Pemerintah Aceh memberikan jaminan sosial bagi setiap rakyat Aceh, meningkatkan pengarusutamaan gender, dan meningkatkan kualitas pelayanan khusus disabilitas. Di samping itu, seluruh masyarakat Aceh hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.

**6). Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.**

Melalui Misi 6 ini akan tercipta pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh, menjamin ketersediaan dan pemerataan pangan, serta membangun pertanian dan ekonomi maritim.

**7). Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.**

Melalui Misi 7 ini akan tercipta pemenuhan energi listrik yang bersih dan terbarukan bagi rakyat Aceh dan industri. Pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

**8). Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.**

Melalui Misi 8 ini akan mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi, industri dan pariwisata sesuai dengan potensi sumberdaya daerah, dan membangun basis industri sebagai bagian menghadapi berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh. Pemerintah Aceh merangsang tumbuhnya *entrepreneur* yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, ketrampilan dan pasar disektor pertanian, perikanan, perkebunan dan sektor-sektor strategis lainnya.

**9). Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.**

Melalui Misi 9 ini akan dikembangkan sistem informasi dan *database* Aceh yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan Aceh.

**10). Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.**

Melalui Misi 10 ini akan dibangun dan dikembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi diseluruh sektor-sektor pembangunan Aceh.

Dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Aceh Periode 2017-2022, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menggagaskan 15 Program Unggulan Aceh Hebat sebagai berikut :

- 1). Aceh Seujahtra JKA Plus, program ini mendukung Misi 5.
- 2). Aceh Siat, program ini mendukung Misi 9.
- 3). Aceh Carong, program ini mendukung Misi 4.
- 4). Aceh Energi, program ini mendukung Misi 7.
- 5). Aceh Meugoe dan Meulaot, program ini mendukung Misi 6.
- 6). Aceh Troe, program ini juga mendukung Misi 6.
- 7). Aceh Kreatif, program ini mendukung Misi 8.
- 8). Aceh Kaya, program ini juga mendukung Misi 8.
- 9). Aceh Peumulia, program ini mendukung Misi 1.
- 10). Aceh Dame, program ini mendukung Misi 3.
- 11). Aceh Meuadab, program ini mendukung Misi 2.
- 12). Aceh Teuga, program ini juga mendukung Misi 4.

- 13). Aceh Green, program ini mendukung Misi 10.
- 14). Aceh Seumeugot, program ini juga mendukung Misi 10.
- 15). Aceh Seuninya, program ini juga mendukung Misi 10.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang Kebudayaan dan Kepariwisataan terdapat 3 (tiga) Misi yang berkaitan dengan Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu : Misi 2, Misi 8 dan Misi 9 .

Dalam tahapan pelaksanaannya, Pemerintah Aceh telah menetapkan isu strategis pembangunan Aceh yang akan dihadapai setiap tahunnya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik;
2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan;
3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan;
4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan;
5. Pengembangan pertanian dan perikanan;
6. Pengembangan Industri, dan Koperasi dan UMKM;
7. Pengembangan pariwisata;
8. Ketenagakerjaan;
9. Ketersediaan dan ketahanan energy;
10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi;
11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni;
13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan;
14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga;
15. Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan;
16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.

Isu strategis bidang kebudayaan dan pariwisata berhubungan dengan isu strategis Pembangunan Aceh nomor 2 (Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan), nomor 7 (Pengembangan pariwisata) dan nomor 10 (Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi).

---

Dalam pencapaian visi, misi dan program unggulan gubernur tersebut, tentu memiliki dorongan dan hambatan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dorongan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan yang terhambat oleh kurangnya SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang berlatar belakang ilmu kebudayaan dan kepariwisataan serta SDM kreatif (pewaris budaya, peneliti, pengelola, pendidik, dan penggiat seni) yang dapat berperan serta untuk melestarikan dan mengembangkan sumberdaya budaya yang berlandaskan adat dan kebudayaan Aceh umumnya
2. Dorongan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang terhambat oleh minimnya pengembangan potensi sumberdaya budaya (*tangible dan intangible*), termasuk untuk pengembangan jumlah produksi dan industri pariwisata
3. Dorongan untuk perluasan kawasan wisata yang terhambat oleh pengadaan infrastruktur (terutama berbenturan dengan KLHS) pariwisata
4. Dorongan meningkatkan wisnus dan wisman yang terhambat oleh keterbatasan keuangan sehingga menyebabkan minimnya jejaring diplomasi dan promosi kebudayaan serta pemasaran pariwisata Aceh baik dalam skala lokal, interregional, nasional dan internasional
5. Dorongan saling koordinasi antar SKPA dan instansi terkait pada kabupaten/kota (lingked) yang terhambat oleh masih kurang efisiennya tata kelola dan perencanaan pengembangan pariwisata Aceh dalam efektifitas pelayanan serta produktivitas penyelenggaraan program/kegiatan dinas yang terintegrasi dengan SKPA lainnya dan Dinas terkait di kabupaten/kota seluruh Aceh.

Untuk penyelesaian hambatan dalam pencapaian visi, misi dan program unggulan gubernur tersebut, diuraikan secara lengkap pada strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Dalam rangka mencapai keberhasilan maksud dan tujuan serta sasaran dari rencana strategis pembangunan organisasi dan masyarakat, maka diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang dirancang secara profesional dan proporsional dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan

---

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah Daerah selaku pengemban amanat masyarakat harus dapat mempersiapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat melalui penyiapan rencana strategis, khususnya rencana strategis bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam melaksanakan tugas pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata perlu selalu melakukan koordinasi dan komunikasi antar berbagai stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh baik di tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Pusat melalui kementerian atau lembaga (*K/L*), khususnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam penyusunan anggaran yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (*APBN*) perlu merancang program dan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata dengan mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Nasional melalui Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (*RKP*) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

### 3.3.1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

#### a. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (*Renstra*) Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, juga arahan Presiden mengenai Semboyan Trisakti yang mencakup kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan serta

---

Nawa Cita (9 agenda perubahan) terutama Cita ke-9 yaitu Memperteguh kebhinekaan dan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015-2019 sangat penting dan strategis sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015-2019 merupakan kesinambungan dari Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2010-2014. Penyusunan Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019 dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Kemendikbud, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini. Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan mengacu pada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 yaitu **“TERBENTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**.

Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015-2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015-2019, serta merupakan dasar dan acuan bagi unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang kebudayaan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Mendasarkan pada rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 tersebut diatas, maka dirumuskan Visi pembangunan Kebudayaan di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu: **“TERBENTUKNYA INSAN DAN EKOSISTEM KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER DENGAN**

**BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**“. Rumusan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**INSAN BUDAYA:**

Seluruh pemangku kepentingan bidang kebudayaan yang meliputi : Pelaku Budaya, Pengelola Budaya dan Masyarakat

**EKOSISTEM KEBUDAYAAN:**

(1) Warisan dan karya budaya; (2) Masyarakat; (3) Industri; (4) Organisasi Profesi; (5) Pemerintah; (6) Keluarga; (7) Pelaku budaya; (8) Pengelola budaya; (9) Institusi Pendidikan; (10) Sarana prasarana budaya; (11) Tata kelola; (12) Media.

**BERKARAKTER:**

Memiliki 8 (delapan) nilai :

- 1) Memiliki integritas
- 2) Kreatif dan Inovatif
- 3) Inisiatif
- 4) Pembelajar
- 5) Menjunjung Meritokrasi
- 6) Terlibat Aktif
- 7) Tanpa Pamrih
- 8) Apresiatif

**BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

Mewujudkan sikap dan semangat kebersamaan oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong.

Berdasarkan Visi Pembangunan Kebudayaan yang telah dijelaskan diatas, selanjutnya Misi Pembangunan Kebudayaan dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Insan Budaya Yang Kuat, Tangguh dan Berkarakter
2. Mewujudkan Pelestarian Nilai Sejarah dan Warisan Budaya Yang Berkelanjutan

3. Mewujudkan Inovasi dan Kreatifitas Karya Budaya Yang Berdaya Saing
4. Mewujudkan Diplomasi Budaya Yang Efektif dan Produktif
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Serta Peningkatan Efektifitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

b. Arah Kebijakan dan Strategi.

Arah Kebijakan dan Strategi untuk mencapai sasaran Strategis pada setiap Tujuan Strategis dalam mendukung agenda/Misi 1. **Mewujudkan insan budaya yang kuat, tangguh dan berkarakter.**

Arah kebijakan yang diperlukan adalah :

1. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis dan berorientasi iptek melalui strategi :
  - a. Pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal.
  - b. Penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap perpu.
  - c. Pemahaman tentang nilai – nilai kesejahteraan dan wawasan kebangsaan.
  - d. Perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khazanah budaya bangsa.
  - e. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya.
  - f. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas layanan masyarakat pendukung terhadap warisan budaya dan karya budaya
  - g. Peningkatan sensor film dan media informasinya.
2. Melakukan penguatan perilaku pelaku budaya yang mandiri dan berkepribadian melalui strategi :
  - a. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas layanan pelaku budaya terhadap warisan budaya dan karya budaya;
  - b. Meningkatkan mutu karya dan pelaku budaya dalam pelestarian warisan budaya dan karya budaya.

- c. Memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian kebudayaan.
3. Melakukan penguatan kapasitas pengelola budaya melalui strategi :
  - a. Peningkatan kompetensi bidang pengelolaan cagar budaya, permuseuman, kesejahteraan, kesenian, kepercayaan, tradisi, dan diplomasi budaya.
  - b. Peningkatan apresiasi pengelola budaya dalam pelestarian kebudayaan.

Arah Kebijakan dan Strategi untuk mencapai sasaran Strategis pada setiap Tujuan Strategis dalam mendukung agenda/Misi 2. **Mewujudkan pelestarian nilai sejarah dan warisan budaya yang berkelanjutan.**

Arah kebijakan yang diperlukan adalah :

1. Melakukan perlindungan warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*) melalui strategi :
  - a. Pelestarian peninggalan purbakala di darat dan di bawah air.
  - b. Pencatatan dan penetapan warisan budaya tak benda.
  - c. Penguatan sistem registrasi dan penetapan cagar budaya yang terstruktur, akurat dan terintegrasi.
  - d. Peningkatan sosialisasi dan advokasi nilai positif warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia.
  - e. Sinergisitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan warisan budaya.
  - f. Pengembangan sistem informasi geospasial cagar budaya.
2. Melakukan perlindungan warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*) melalui strategi :
  - a. Sinergisitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan warisan budaya.
  - b. Penguatan penelitian/kajian warisan budaya (benda/tak benda).
  - c. Adaptasi warisan budaya sesuai konteks kebutuhan kekinian.
  - d. Revitalisasi warisan budaya.
3. Meningkatkan akses dan promosi warisan budaya (benda dan tak benda) untuk pendidikan, penelitian dan rekreasi melalui strategi :

- 
- a. Pengembangan peninggalan purbakala dan permuseuman sebagai sarana edukasi, penelitian dan rekreasi.
  - b. Sinergisitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan warisan budaya.
  - c. Pengembangan promosi warisan budaya dan karya budaya melalui media digital.
  - d. Penguatan muatan budaya lokal untuk mendukung kegiatan pendidikan.
4. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap nilai sejarah dalam memperkuat ketahanan budaya dan karakter bangsa melalui strategi :
    - a. Penguatan basis data, informasi dan referensi tentang nilai sejarah
    - b. Perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai-nilai sejarah untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan.
    - c. Penguatan pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang bersifat lintas generasi yang dilandasi nilai-nilai sejarah.

Arah Kebijakan dan Strategi untuk mencapai sasaran Strategis pada setiap Tujuan Strategis dalam mendukung agenda/Misi **3. Mewujudkan inovasi dan kreativitas karya budaya yang berdaya saing.**

Arah kebijakan yang diperlukan adalah :

1. Melakukan Peningkatan Kemampuan Penciptaan dan Kualitas Karya Budaya melalui strategi :
  - a. Peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang diinisiasi oleh masyarakat.
  - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan pameran, dan pagelaran seni dan karya budaya.
  - c. Pembinaan pengembangan kesenian (tradisional dan non tradisional) dan perfilman.
  - d. Pemberian fasilitasi, pendukung dan penghargaan kepada pelaku budaya dalam rangka pengembangan kreatifitas dan produktifitas
  - e. Pencanangan dan pendukung inisiasi percontohan komunitas berkarakter.

2. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas melalui strategi.
  - a. Penghargaan kepada tokoh-tokoh pelaku budaya (*maestro*) yang menjadi *role model* dalam revolusi mental.
  - b. Peningkatan apresiasi dan promosi karya seni dan karya budaya lainnya melalui berbagai media.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran strategis pada setiap tujuan strategis dalam mendukung agenda/misi **4. Mewujudkan diplomasi budaya efektif dan produktif.**

Arah kebijakan yang diperlukan adalah :

1. Meningkatkan apresiasi dan promosi keragaman budaya indonesia melalui strategi :
  - a. Peningkatan kerjasama antar daerah di bidang kebudayaan.
  - b. Promosi budaya untuk peningkatan apresiasi dan kebanggaan budaya/muatan lokal.
2. Meningkatkan kerjasama antar negara dan partisipasi indonesia dalam kancah internasional melalui strategi :
  - a. Peningkatan penominasian warisan budaya benda dan tak benda ke UNESCO.
  - b. Penguatan *soft power* Indonesia dalam hubungan internasional melalui diplomasi budaya (*event*, forum, misi kebudayaan).
  - c. Peningkatan kerjasama kebudayaan antar negara.
  - d. Pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri.
  - e. Peningkatan promosi budaya Indonesia ke mancanegara.
  - f. Peningkatan informasi dan publikasi budaya indonesia melalui berbagai media di kancah internasional.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran strategis pada setiap tujuan strategis dalam mendukung agenda/misi **5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik.**

Arah kebijakan yang diperlukan adalah :

1. Memperkuat sistem regulasi dan pranata kebudayaan melalui strategi:
  - a. Penguatan regulasi dalam memperkuat upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan karya budaya (termasuk HAKI).
  - b. Peningkatan pelayanan publik berbasis pelayanan terpadu.
2. Memperkuat kerjasama lintas pemangku kepentingan pembangunan kebudayaan melalui strategi :
  - a. Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya
3. Memperkuat sistem informasi dan sarana prasarana kebudayaan melalui strategi:
  - a. Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan
  - b. Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi
  - c. Peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi kebudayaan
  - d. Penguatan sistem informasi kebudayaan
  - e. Peningkatan kapasitas kualitas sarana prasarana kebudayaan
4. Memperkuat manajemen kinerja pembangunan melalui strategi:
  - a. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara
  - b. Penguatan implementasi manajemen kinerja pembangunan
  - c. Penguatan pengendalian kinerja pembangunan kebudayaan meliputi pemantauan, evaluasi dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan
  - d. Dukungan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam manajemen kinerja pembangunan kebudayaan

### 3.3.2 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

#### a. Rencana Strategis Tahun 2014-2019

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**.

---

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya terkandung agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni:

***“MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DIPASAR INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA DAPAT MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA”.***

Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing dipasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan visi Kementerian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar internasional; dan

4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memaksimalkan produktifitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif;
4. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien dan mencapai produktifitas maksimal.

Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata memiliki 11 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015-2019. Adapun sasaran strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata;
2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;
3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional;
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional;
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman);
6. Meningkatkan jumlah penerimaan devisa;
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus);

8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;
  9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata;
  10. Terlaksananya/Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
  11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata;
- b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-2019

Pola pengembangan pariwisata 2015-2019 didasarkan atas paradigma berkelanjutan dan peningkatan daya saing, di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan empat pilar kepariwisataan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, meningkatkan devisa pariwisata, meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, meningkatkan investasi bidang pariwisata dan meningkatkan citra pariwisata Indonesia dimata dunia. Sehingga tujuan dari pembangunan kepariwisataan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mengetahui, mengontrol dan mencapai target dari sasaran strategis pembangunan kepariwisataan, Kementerian Pariwisata akan melakukan mekanisme kontrol dan evaluasi baik secara internal (melalui Rapim, audit internal dll) maupun secara eksternal (evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan dan Bappenas).

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan ini meliputi: industri pariwisata; destinasi pariwisata; pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 merupakan amanat dari UU No. 10/Th. 2009 tentang kepariwisataan yang mengatur pembangunan kepariwisataan Indonesia.

Wilayah pengembangan destinasi pariwisata nasional diarahkan pada 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KPPN menunjukkan kawasan pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk DPN dan KSPN. DPN merupakan destinasi pariwisata berskala nasional, sedangkan KSPN kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

Arah kebijakan dihubungkan dengan program pembangunan pariwisata yang digariskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), yang fokus pada program kegiatan pengembangan terhadap empat pilar pengembangan kepariwisataan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata
2. Pengembangan industri pariwisata
3. Pengembangan pemasaran pariwisata
4. Pengembangan kelembagaan pariwisata

Beberapa agenda strategis Pemerintahan Republik Indonesia periode 2015-2019, Agenda prioritas NAWACITA, yang terkait pariwisata diantaranya adalah butir keenam yang menyebutkan “Kami akan meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim dan pariwisata. Atas dasar pemikiran itulah bahwa kepariwisataan Indonesia dapat meningkatkan daya saing Indonesia di mancanegara terutama dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum terkelola dengan baik yakni potensi maritim untuk mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis kurun waktu tahun

2015-2019, Kementerian Pariwisata mengembangkan kerangka strategi makro yang akan menjadi dasar pijak atau payung dalam perumusan fokus strategi dan program dari masing-masing bidang ke deputian didalam struktur Kementerian Pariwisata. Kerangka strategi yang dimaksud meliputi kerangka strategi pada tingkat nasional yang mengangkat *GREAT SPIRIT (Indonesia Bekerja-Wonderful Indonesia)* dan *GRAND STRATEGY (Mencakup: Directional Strategy, Portofolio Strategy dan Parenting Strategy)*; serta Kerangka strategy dalam konteks Industri yaitu *BUSINESS STRATEGY* yang didalamnya meliputi: *Comporative Strategy, Competitive Strategy dan Cooperative Strategy*).

Lebih lanjut, arah kebijakan Kementerian Pariwisata dalam mencapai sasaran-sasaran strategis kurun waktu tahun 2015-2019 adalah menjalankan PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN INDONESIA dengan didukung kegiatan-kegiatan berikut ini:

#### **I. PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA**

Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata, melalui

- 1). Pembangunan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata: (1). Perancangan destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional, (2) Peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas dan ekosistem pariwisata;
- 2). Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan: (1) Pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata pedesaan dan perkotaan, (2) Pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan pertualangan, kawasan pariwisata terpadu, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi;
- 3). Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat: (1) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata; (2) Pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi peningkatan sadar

---

wisata dan pengembangan potensi usaha masyarakat di bidang pariwisata;

- 4). Pengembangan industri pariwisata: (1). Peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata; (2) Pengembangan standar dan sertifikasi usaha pariwisata; (3) Peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata.

Beberapa kegiatan strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata meliputi:

- a. Pengembangan infrastruktur dan ekosistem melalui penyusunan *masterplan* dan rencana detail KSPN/KPPN (dekonsentrasi); koordinasi strategis lintas sektor pembangunan KSPN serta sinergi program dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah, pengembangan kawasan ekonomi khusus zonasi pariwisata melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Dewan KEK Nasional dalam mempersiapkan proposal penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Zonasi Pariwisata; koordinasi lintas sektor pendukung infrastruktur aksesibilitas dan amenities pariwisata dengan Kementerian terkait;
- b. Pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan melalui pengembangan wisata kuliner dan spa, pengembangan wisata sejarah dan religi, pengembangan wisata tradisi dan seni budaya, pengembangan wisata perdesaan dan perkotaan, pengembangan kawasan wisata dan pengembangan wisata konvensi, olahraga dan rekreasi.
- c. Pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan organisasi pengelola destinasi (*Destination Managemet Organisation/BMO*), penguatan kelompok sadar wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, serta internalisasi sadar wisata dan sapta pesona.
- d. Peningkatan kemitraan industri pariwisata melalui penerapan pedoman green hotel, penyusunan SNI usaha jasa dan usaha sarana pariwisata, fasilitasi investasi usaha pariwisata, pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal dalam bidang pariwisata.

## II. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA

Pemasaran Pariwisata Mancanegara diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara melalui promosi dan pengelolaan segmen pasar yang terfokus, mencakup pada: 1) meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; 2) mengembangkan strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata sesuai fokus pasar berdasarkan wilayah (Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika); 3) meningkatkan promosi produk wisata tematik (wisata alam, budaya, buatan) sesuai fokus pasar.

Beberapa kegiatan strategis pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, antara lain:

- 1). Branding Wonderful Indonesia sebagai destinasi utama wisata dunia melalui media elektronik, digital/non-digital serta social media untuk pasar mancanegara antara lain: *Discovery Channel*, Fox, MNC, Google Indonesia, *Trip Advisor*, *Amazing Race*;
- 2). Perumusan isi pesan (content) promosi pariwisata terintegrasi antara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 3). Pemasaran pariwisata dengan pendekatan BAS, DOT dan POS:

- a) BAS

Pendekatan B-A-S (*branding, advertising, selling*) digunakan dalam pemasaran pariwisata sebagai bagian dari strategi komunikasi pemasaran dengan melakukan: (1) *publication dan brand activation* untuk mengoptimalkan branding; (2) optimalisasi terhadap *marketing communication portofolio*; dan (3) melakukan aktivitas promosi dan even-even penjualan.

- b) DOT

Strategi dengan melakukan identifikasi terhadap D-O-T (*destination, origin dan time*) yang terfokus dan teridentifikasi dari beberapa pasar utama kawasan asal wisman antara lain: Asia Tenggara, Asia-Pasifik, Eropa, Timur-Tengah dan Afrika melalui identifikasi terhadap segmen pasar yang akan secara spesifik mempunyai karakteristik strategi komunikasi pemasaran yang berbeda.

## c) POSE

Pendekatan P-O-S-E (*Paid Media, Owned Media, Social Media, Endorser*) digunakan dalam setiap aktivitas B-A-S yang difokuskan untuk melakukan kegiatan promosi yang dapat membangun *awareness, interest, desire dan action* (AIDA) dari calon wisatawan yang mempunyai potensi untuk melakukan kunjungan ke Indonesia dengan mengoptimalkan penggunaan *promotion channel* yang sesuai.

### III. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA

Pemasaran Pariwisata Nusantara diarahkan untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan di nusantara dengan pendekatan segmen pasar personal, segmen pasar bisnis dan pemerintah, melalui promosi yang mencakup 3 (tiga) produk utama : 1) wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi dan wisata pertualangan; 2) wisata budaya yang terdiri dari wisata *heritage* dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan 3) wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu. Pengembangan strategi pemasaran pariwisata nusantara dikembangkan melalui strategi yang terfokus yang mengintegrasikan antara aspek pemasaran (DOT), aspek promosi (BAS), dan aspek media (POS).

Kegiatan strategis dalam kerangka pengembangan pemasaran pariwisata nusantara meliputi:

1. *Branding Pesona Indonesia* terintegrasi dengan semua stakeholder pusat dan daerah melalui media elektronik, digital dan social media antara lain: Metro, Kompas Group, MNC, serta melibatkan partisipasi BUMN/BUMD dan private sektor;
2. Promosi event-event daerah sebagai bagian dari pengembangan destinasi pariwisata tersebut, meliputi: **Wisata Alam**, antara lain: Festival Danau Toba, Festival Danau Sentani, Festival Raja Ampat; **Wisata Budaya**, antara lain: Festival Keraton Ambon, Festival Kuliner Nusantara di beberapa ibukota provinsi; **Wisata**

**Buatan**, antara lain: *Tour de Singkarak* (Tds) di Sumatera Barat, Jakarta Maraton; **Wisata Bahari**, antara lain: Festival Bahari Tambora, Sail Karimata, Peringatan Hari Nusantara, dsb.

3. Kampanye Budaya Maritim dan menjadikan Peringatan Hari Nusantara sebagai puncak acara;
4. Pekan Wisata Maritim di Kawasan Tengah atau Timur Indonesia;
5. Pekan Wisata Kuliner Nusantara dan Regional;
6. Promosi wisata pertemuan, konvensi perjalanan insentif dan pameran serta wisata olahraga;
7. Pendataan dan Pengembangan Strategi Pemasaran Segmen Pasar Wisatawan Nusantara.

#### IV. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata diarahkan untuk membangun organisasi kepariwisataan berikut SDM nya yang kompeten, kredibel dan inovatif serta komunikatif, melalui:

- a. Optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pijakan arah kebijakan kepariwisataan;
- b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi;
- c. Pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan ditingkat nasional dan internasional;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan perguruan tinggi pariwisata;
- e. Peningkatan kompetensi SDM aparatur kepariwisataan;
- f. Pendirian lembaga diklat pariwisata;
- g. Akselerasi transformasi kelembagaan kepariwisataan yang terkendali dan dinamis.

Kegiatan strategis dalam kerangka pengembangan kelembagaan pariwisata meliputi:

- a. *Pilot project* revolusi mental dan restorasi sosial masyarakat di 10 daerah potensial untuk destinasi wisata; dan,

- 
- b. *Pilot project* sosial pembangunan karakter pelaku usaha dan pekerja jasa pariwisata di 5 daerah.

## V. PENGEMBANGAN DUKUNGAN MANAJEMEN

- a. Peningkatan kualitas layanan pusat informasi dan peningkatan aktivasi saluran media sosial (*social media*), seperti: Facebook, Twitter, Instagram, Path dan Youtube;
- b. Peningkatan kualitas kinerja pengelolaan APBN Kementerian Pariwisata menuju status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);
- c. Peningkatan sarana dan prasarana Kementerian Pariwisata.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan Ruang Wilayah Aceh sebagaimana yang tercantum dalam Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 bertujuan: (a) memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat Aceh secara adil, merata, produktif dan inovatif, berasaskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh; (b) menciptakan fungsi-fungsi kawasan strategis yang mendukung posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera; (c) mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut dan ruang udara di wilayah Aceh, termasuk ruang didalam bumi; (d) mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor dalam wilayah Aceh; (e) mewujudkan penataan ruang wilayah perbatasan, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang berkelanjutan; (f) mewujudkan penurunan risiko bencana; dan (g) memanfaatkan potensi jasa lingkungan untuk meningkatkan percepatan perkembangan ekonomi Aceh.

Dalam penataan ruang wilayah terdapat dua kerangka tata ruang wilayah yaitu perencanaan struktur ruang dan pola ruang. Dalam perencanaan struktur ruang merupakan kerangka tata ruang wilayah yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Dalam RTRW Aceh terdapat perencanaan pengembangan jalan dan jembatan yang mencakup seluruh

---

wilayah kabupaten/kota di Aceh, pembangunan pelabuhan dan jaringan air, listrik dan telekomunikasi yang dapat mendukung pengembangan pariwisata Aceh.

Strategi dalam pengembangan struktur ruang yang terkait dengan bidang kebudayaan dan pariwisata adalah: (a) mengembangkan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Takengon, Langsa, Meulaboh, Blang Pidie dan Singkil sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, ITC (Information Technology Center) dan Aceh digital; dan poin (c) meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat-pusat kegiatan yang mewadahi aktivitas perdagangan, jasa, industri dan pariwisata berskala regional, nasional dan internasional dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung. Dalam hal kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang difokuskan pada pengembangan beberapa daerah sebagai pintu gerbang utama pulau sumatera dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kapasitas dan intensitas kegiatan.

Bidang kebudayaan dan pariwisata dalam pola ruang wilayah aceh terdapat pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan kebudayaan dan pariwisata meliputi:

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan disekitarnya merupakan kawasan hutan lindung (HL) seluas 1.790.626 Ha (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh enam hektar) yang tersebar di kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe.
- (2) Kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud termasuk Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) dengan luas 695 Ha di Kabupaten Aceh Besar dan hutan lindung mangrove yang terletak di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue.
- (3) Cagar Alam Serbajadi dengan luas 300 Ha terletak di Kabupaten Aceh Timur;
- (4) Suaka Margasatwa (SM) dengan luas 97.210 Ha
- (5) Taman Nasional Gunung Leuser Aceh (TNGLA) dengan luas sekitar 624.651 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Tamiang;
- (6) Taman Wisata Alam (TWA) dengan luas 241.106 Ha

- (7) Taman Hutan Raya (Tahura) dengan luas 8.623 Ha
- (8) Kawasan cagar budaya.
- (9) Kawasan lindung lainnya.
- (10) Kawasan perlindungan setempat.

Dalam pemanfaatan kawasan lindung untuk menjadi kawasan wisata dalam tata ruang terdapat arahan pemanfaatan ruang yaitu:

- (1) Pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, pariwisata, jasa lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dan sumber plasmanutfah;
- (2) Pemanfaatan dilakukan dengan pelestarian terhadap kawasan lindung tersebut.
- (3) Pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
- (4) Pendirian bangunan hanya untuk penunjang kegiatan tersebut diatas.

Selain berada dalam kawasan lindung untuk bidang kebudayaan dan pariwisata dalam pola ruang terdapat dalam kawasan budidaya. Untuk kawasan budidaya Aceh terdiri atas: (a) kawasan permukiman; (b) kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa; (c) kawasan industri dan pergudangan; (d) kawasan hutan produksi; (e) Kawasan pertanian; (f) kawasan pertambangan; (g) kawasan wisata; (h) kawasan pertahanan dan keamanan; dan (i) kawasan budidaya rawan bencana.

Untuk kawasan pengembangan wisata dalam qanun RTRW Aceh meliputi:

- (1) Kawasan Banda Aceh dan sekitarnya sebagai kawasan wisata sejarah, budaya dan religi;
- (2) Kawasan Pulau Weh dan sekitarnya sebagai Kawasan wisata bahari (taman laut);
- (3) Kawasan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai kawasan agro dan ekowisata;
- (4) Kawasan Pulau Simeulue, Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Selatan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata bahari (selancar);
- (5) Kawasan situs tsunami meliputi Museum Tsunami, PLTD Kapal Apung, kapal di atas rumah Lampulo, Mesjid Ulee Lheue dan kuburan massal Ulee Lheue di Kota Banda Aceh, Kuburan Massal Siron, Kuburan massal Lhoknga, Mesjid Rahmatullah Lampuuk dan Kubah Mesjid Gurah di Kabupaten Aceh Besar, kantor bupati lama Calang di Aceh Jaya sebagai kawasan wisata sejarah tsunami;

- (6) Kawasan situs alam (*geopark*);
- (7) Kawasan wisata gerilya; dan
- (8) Kawasan wisata lainnya.

Dalam pengembangan kawasan wisata dalam RTRW terdapat arahan peraturan zonasi kawasan wisata meliputi:

- (1) Memadukan unsur situs sejarah, adat dan budaya, pesona alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta manajemen kepariwisataan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pemugaran, pemeliharaan dan perlindungan terhadap bangunan atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau diintegrasikan dengan konsep perencanaan dan pengembangan wisata;
- (3) Kegiatan wisata harus menerapkan standar keselamatan pekerja, pengunjung dan penduduk sekitar lokasi kepariwisataan dan didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap;
- (4) Kegiatan wisata pantai harus menyediakan rambu-rambu arahan/peringatan, jalur evakuasi, menara pemantau dan pengawas pantai; dan
- (5) Pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan kegiatan wisata.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kawasan Wisata diatur dalam Peraturan Gubernur. Dalam perencanaan tata ruang yang terdapat dalam Qanun RTRW terdapat kegiatan unggulan yang berada dalam Kawasan Andalan Aceh yang meliputi daratan dan lautan. Kawasan Andalan Aceh (KAA) Daratan untuk bidang pariwisata dengan objek wisata alam, budaya dan gabungan berupa kegiatan pengembangan objek wisata (alam, budaya), peningkatan pemasaran dan produktivitas kegiatan pariwisata meliputi:

- a. KAA – WP Basajan
- b. KAA – WP Tengah 1
- c. KAA – WP Tengah 2
- d. KAA – WP Barat 1
- e. KAA – WP Barat 2
- f. KAA – WP Barat 3
- g. KAA – WP Barat 4

Kawasan Andalan Laut Aceh (KALA) untuk bidang pariwisata berupa pariwisata alam laut/bahari di permukaan dan bawah permukaan berupa kegiatan pengembangan kegiatan pariwisata alam laut atau bahari beserta atraksinya meliputi:

- (1) KALA Selat Malakan
- (2) KALA Laut Andaman
- (3) KALA Samudera Hindia

Dalam pengembangan Kawasan Andalan Aceh (KAA) Daratan wilayah yang saat ini telah menjadi prioritas dan telah berkembang adalah wilayah KAA – WP Basajan, sedangkan wilayah KAA lain belum dilakukan pengembangan objek wisata secara menyeluruh. Untuk pengembangan objek wisata dan atraksi wisata mulai diprioritaskan untuk wilayah tengah dan barat. Prioritas pengembangan kedua wilayah ini untuk memperbanyak jenis dan daerah objek wisata serta untuk memperbanyak wilayah kunjungan wisata.

Untuk Kawasan Andalan Laut Aceh (KALA) wilayah telah menjadi pengembangan wisata adalah KALA Selat Malaka dan KALA Laut Andaman namun hanya meliputi wilayah Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kab. Aceh Besar, sedangkan untuk KALA Samudera Hindia yang meliputi Kab. Simuelue dan Kab. Aceh Singkil baru dikembangkan secara parsial. Untuk KALA Samudera Hindia menjadi prioritas pengembangan dikarenakan mulai berkembangnya kegiatan wisata yang berada di Kab. Simeulue dan Kab. Aceh Singkil. Selain itu untuk pemerataan pembangunan objek wisata laut di Aceh.

Selain termasuk dalam kawasan pengembangan wisata, beberapa kawasan wisata juga termasuk dalam rencana pengembangan kawasan strategis Aceh. Rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang termasuk dalam bidang kebudayaan dan pariwisata meliputi:

- (1) Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agroindustri;
 

Karakter pengembangan kawasan agrowisata meliputi:

  - a) Kawasan yang memiliki sumber daya air yang bisa dimanfaatkan untuk sumber air minum, air irigasi dan pengembangan mini *hidropower*;
  - b) Kawasan yang memiliki panorama alam yang indah; dan
  - c) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan

- (3) Kawasan khusus Karakter kawasan khusus sebagaimana dimaksud adalah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang bersifat khusus bagi kepentingan Aceh, meliputi:
- a) Kawasan Darud dunia (Pendopo, Keraton, Makam Sultan Iskandar Muda, Taman Sari, Masjid Raya Baiturrahman, Krueng Daroy, Taman Ghayrah; Taman Budaya, Kerkhof, Lapangan Blang Padang, Gunongan, Museum Aceh, Peuniti, Blower, dan Neusu) sebagai kawasan wisata situs sejarah di BandaAceh;
  - b) Kawasan Istana Wali Nanggroe sebagai pusat kegiatan peradaban Aceh;
  - c) Kawasan Mata Ie Japakeh dan sekitarnya sebagai kawasan sumber mata air dan merupakan situs budaya;
  - d) Kawasan Blang Sala Tiro dan sekitarnya sebagai kawasan taman safari dan wisata peternakan;
  - e) Kawasan Lhoknga dan sekitarnya sebagai Kawasan wisata terpadu.

Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis Aceh sesuai dengan bentuk kawasan sebagai berikut:

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan agrowisata meliputi:
- a) pemanfaatan ruang yang memiliki potensi sumber daya air yang bisa dimanfaatkan untuk sumber air minum dan pengembangan *hidropower*;
  - b) pemanfaatan ruang sejumlah 6.800 hektar, tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat *agroindustri*;
  - c) pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak termasuk lahan untuk sumber air minum dan pengembangan *hidro power* yang berdampingan dengannya;
  - d) pemanfaatan ruang untuk pengembangan komoditi pertanian unggulan yang diintegrasikan dengan peternakan, penelitian, pendidikan dan wisata untuk mendukung pengembangan kawasan ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*);
  - e) penyediaan sarana dan prasarana pokok dan penunjang yang ramah lingkungan serta berteknologi;
  - f) penerapan standar keselamatan pekerja, pengunjung dan penduduk sekitar lokasi agrowisata;
  - g) pengembangan akses transportasi yang menghubungkan kawasan agrowisata dengan *outlet*; dan

- h) pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak daya dukung lingkungan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka meliputi:
- a) penggalian dan penelusuran, inventarisasi dan perlindungan situs sejarah terkait lahirnya MoUHelsinki;
  - b) penyediaan sarana dan prasarana pokok serta penunjang; dan
  - c) pemanfaatan ruang sebagai objek wisata budaya dan wisata gerilya serta sumber pembelajaran penyelesaian konflik dan perdamaian bagi seluruh dunia.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan khusus meliputi:
- a) pengembangan kawasan sesuai dengan karakteristik dan fungsi kawasan;
  - b) penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik dan fungsi kawasan; dan
  - c) pengendalian pengembangan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata dalam kaitan dengan RTRW Aceh terdapat beberapa isu strategis yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai berikut:

- (1) Struktur ruang dalam RTRW belum mengakomodir objek-objek wisata dan cagar budaya Aceh.

Objek-objek wisata dan cagar budaya yang terdapat di Aceh banyak yang belum terhubung dan terkoneksi oleh jaringan jalan, telekomunikasi dan jaringan air bersih sehingga dalam pengembangan objek wisata dan cagar budaya menjadi terkendala sehingga perlu dilakukan pemetaan terhadap objek wisata dan cagar budaya yang belum termasuk dalam rencana struktur ruang Aceh.

- (2) Pemanfaatan Kawasan Lindung.

Dalam pemanfaatan hutan lindung sering terjadi pertentangan dengan BKSDA dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya pada pengelolaan Taman Wisata Alam yang berada di bawah BKSDA, sehingga sering terjadi tumpang tindih peraturan.

- (3) Masih terdapat kawasan dan objek wisata serta cagar budaya yang belum tertampung dalam RTRW.

Dalam RTRW sudah dimasukkan kawasan pengembangan wisata namun masih banyak terdapat objek-objek wisata dan cagar budaya yang belum masuk kedalam

---

RTRW hal ini dikarenakan belum lengkapnya data-data dan informasi mengenai objek wisata dan cagar budaya sehingga perlu adanya data yang lengkap mengenai objek wisata dan cagar budaya tersebut.

- (4) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang baik di kawasan pengembangan wisata dan budaya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh objek wisata dan cagar budaya yang terdapat di Aceh adalah belum cukupnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia, sehingga sering menimbulkan rasa kecewa dalam diri wisatawan yang berkunjung. Untuk itu perlu dipikirkan sarana dan prasarana yang harus dibangun dan lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pembangunan dengan melihat kepada jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung.

- (5) Belum adanya kegiatan pendukung untuk kawasan-kawasan strategis Aceh yang berhubungan dengan pariwisata dan budaya.

Dalam RTRW telah ditetapkan kawasan-kawasan yang menjadi pengembangan kawasan strategis yang menjadi tanggung jawab dinas kebudayaan dan pariwisata yaitu kawasan agrowisata, kawasan situs sejarah dan kawasan Lhoknga, namun untuk kawasan tersebut masih sedikit pendukung yang dilakukan oleh dinas sehingga perlu dilakukan perencanaan dan program-program untuk mendukung kawasan strategis tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan perlu adanya peninjauan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pengembangan pariwisata akan menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan wisata seperti kerusakan terhadap keanekaragaman hayati, limbah, kepemilikan lahan dan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat serta pengaruh budaya. Selain dampak negatif, pengembangan pariwisata juga akan memberikan dampak positif berupa perlindungan terhadap lingkungan, sehingga akan memberikan nilai jual, peningkatan lapangan pekerjaan dan terkenalnya budaya tradisional masyarakat.

Dalam pengembangan kawasan cagar budaya juga akan menimbulkan efek pada lingkungan dan masyarakat sekitar dimana akan terjadi pembatasan terhadap suatu kawasan dimana juga akan membatasi aktivitas masyarakat, sehingga akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat baik berupa kepemilikan lahan dan aktivitas di kawasan tersebut.

Dalam hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat negatif maka dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan, perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan keterlibatan masyarakat khususnya yang berada dan beraktivitas dalam kawasan yang menjadi wilayah pengembangan.

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah dijabarkan di atas, beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang mempengaruhi dari implikasi RTRW dan KLHS adalah:

1. Dorongan untuk perluasan destinasi wisata terhambat oleh struktur ruang dalam RTRW (Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh Tahun 2013-2023) yang masih kurang mengakomodir objek-objek wisata dan cagar budaya Aceh.
2. Dorongan perluasan wisata alam terhambat dengan sering terjadinya tumpang tindih peraturan dan pertentangan dengan BKSDA
3. Dorongan untuk meningkatkan wisnus dan wisman yang terhambat oleh ketersediaan sarana dan prasarana di kawasan pengembangan wisata dan budaya.
4. Dorongan untuk perencanaan dan program-program yang mendukung kawasan strategis Aceh yang terhambat dengan kurangnya kegiatan pendukung untuk kawasan-kawasan strategis Aceh yang berhubungan dengan pariwisata dan budaya.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis di bidang kebudayaan dan pariwisata Aceh yang dianggap perlu diperhatikan, diantaranya:

1. **Belum kokohnya marwah keistimewaan Aceh sebagai daerah yang kaya ragam bahasa dan budaya yang bernilai syariat.**

Aceh memiliki bahasa dan budaya yang beragam. Ada beberapa bahasa selain bahasa Aceh dan Gayo yang lebih umum dikenal selama ini di Aceh dan umumnya di Indonesia. Bahasa merupakan identitas diri bagi tetap terpeliharanya peradaban suatu budaya. Bahasa dan budaya di Aceh yang beragam tersebut perlu terus dipertahankan dan dipelihara untuk menjamin budaya-budaya di Aceh terus

---

eksisten. Keistimewaan Aceh berkenaan dengan bahasa dan budaya yang beragam tersebut tetap dalam frame Syariat Islam.

**2. Masih minimnya pertumbuhan perilaku budaya masyarakat Aceh yang sesuai dengan nilai, adat istiadat dan budaya Aceh yang bersifat Islami.**

Perilaku yang berbudaya di dalam kehidupan masyarakat di Aceh masih perlu untuk dikembangkan sesuai dengan nilai, adat istiadat dan budaya Aceh yang mencerminkan syariat Islam.

**3. Kurangnya jumlah penutur bahasa ibu yang bersumber dari keberagaman etnik di Aceh.**

Jumlah penutur bahasa ibu sesuai dengan keberagaman etnik di Aceh perlu mendapatkan perhatian khusus guna memelihara bahasa-bahasa ibu dari keberagaman di Aceh. Hal tersebut perlu dilakukan agar tetap terjaga eksistensi bahasa-bahasa ibu (bahasa asli di Provinsi Aceh) yang menjadi ciri khas/tanda keunikan tersendiri.

**4. Lemahnya koordinasi yang terpadu dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang kebudayaan antara provinsi dan kabupaten/kota.**

Perlunya kesinambungan dalam merencanakan pembangunan bidang kebudayaan dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap capaian-capaian yang telah dan belum dilakukan. Hal tersebut seharusnya dilakukan dengan melibatkan setiap kabupaten/kota yang berkoordinasi secara intens dan terukur dengan provinsi.

**5. Rendahnya kinerja pengelolaan warisan budaya untuk penguatan destinasi di semua wilayah di Aceh.**

Rendahnya kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan warisan budaya yang ada selama ini perlu mendapat perhatian tersendiri. Pengelolaan warisan budaya diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan nilai jual destinasi-destinasi baik yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan ataupun diciptakan di seluruh wilayah Aceh.

**6. Masih minimnya perhatian terhadap aset budaya secara optimal bagi aktifitas pagelaran budaya dan kesenian.**

---

Perhatian yang masih belum cukup optimal terhadap aset-aset budaya di Aceh menjadi poinnya, usaha yang dilakukan selama ini masih perlu ditingkatkan terutama bagi aktifitas budaya dan kesenian yang mampu mengeksplorasi kekayaan aset-aset budaya yang beragam.

**7. Masih kurangnya kualifikasi SDM dalam pengelolaan peninggalan sejarah keurbakalaan dan budaya lokal.**

Pengelolaan peninggalan sejarah keurbakalaan dan budaya lokal sebaiknya dikelola dengan profesional. Perlu penanganan lebih dengan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Harapannya mampu mendongkrak sejarah keurbakalaan dan budaya lokal yang selama ini belum tergali dengan mendalam.

**8. Belum optimalnya pemanfaatan cagar budaya untuk pengembangan program kegiatan lainnya yang terintegrasi.**

Dalam pemanfaatan cagar budaya di Aceh masih belum berjalan dengan optimal, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan situs-situs dan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah/budaya dan arkeologis telah berdampak pada kerusakan dan kehancuran. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan program-program kegiatan eksisting dan juga menciptakan program-program kegiatan baru yang terintegrasi secara holistik. Harapannya program-program kegiatan tersebut nantinya mampu mendongkrak nilai dari cagar budaya di Aceh.

**9. Tidak terintegrasinya database berbasis online terkait promosi dan pemasaran industri wisata.**

Berkaitan dengan promosi dan pemasaran yang berbasis online selama ini sudah memanfaatkan beberapa media sosial berbasis android maupun os lainnya serta situs resmi milik pemerintah Aceh maupun swasta yang telah dilakukan. Hal tersebut sudah baik, namun begitu tetap harus terus dikembangkan mengikuti hal terbaru mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat. Poin terpenting database berbasis online tersebut harus terintegrasi secara menyeluruh sehingga mampu menyajikan informasi yang semestinya tersampaikan dan dibutuhkan oleh industri wisata.

---

**10. Kurangnya referensi khazanah pengetahuan sejarah perkembangan peradaban, adat dan budaya Aceh.**

Referensi khazanah pengetahuan sejarah perkembangan peradaban, adat dan budaya di Aceh masih sangat sedikit. Perlu usaha yang didasari dengan penelitian/kajian/studi mendalam dalam segi kuantitas maupun kualitas guna memperkaya pengetahuan tentang sejarah perkembangan peradaban, adat dan budaya Aceh. Hal tersebut penting dilakukan karena akan membangun sebuah peradaban sejarah, adat dan budaya Aceh yang semakin hebat serta mampu disejajarkan dengan peradaban-peradaban bangsa di dunia.

**11. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan para pendidik, peneliti, dan penggiat seni umumnya dalam kualitas apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan budaya terutama berbasis kearifan lokal.**

Pendidik, peneliti dan penggiat seni perlu mendapat kesempatan dalam melakukan kegiatan dan menghasilkan karya seni budaya khususnya yang berbasis kearifan lokal. Dengan mendapatkan kesempatan para pendidik, peneliti dan penggiat seni, akan menambah frekuensi yang produktif dalam menghasilkan sebuah karya seni dan budaya yang akan semakin berkualitas dan dikenal serta diapresiasi oleh masyarakat dan stakeholder lainnya.

**12. Masih minim dan stagnannya pertumbuhan karya-karya seni dan kreasi budaya yang berbasis kearifan lokal yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termutakhir.**

Proses pembelajaran sumber daya manusia kreatif dalam upaya pelestarian dan pengembangan karya-karya seni yang bersumber pada sumber daya budaya lokal belum terpola dengan baik, baik yang bersifat formal maupun informal.

**13. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kepariwisataan, khususnya dalam usaha pelayanan dan pengelolaan pariwisata.**

Pemenuhan standar dalam usaha pelayanan dan pengelolaan industri pariwisata, seperti perhotelan, biro perjalanan wisata, pramuwisata, restoran hingga fasilitas pendukung lainnya (termasuk toilet, kios dan lainnya) perlu dievaluasi yang ada selama ini dan dibenahi sesuai dengan harapan dan kebutuhan wisatawan menuju

---

pengelolaan pariwisata secara profesional. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan professional sangat diperlukan dalam rangka menghadapi persaingan global di industri pariwisata.

#### **14. Minimnya keterlibatan masyarakat (sadar wisata).**

Pariwisata Aceh masih *trial error* didalam banyak hal, salah satunya masih belum sinkronnya antara persepsi ditengah masyarakat sendiri. Perbedaan persepsi/cara pandang terhadap wisata masih menimbulkan miskomunikasi yang berujung terjadinya disharmoni antara yang pro dan kontra terhadap wisata di Aceh. Industri pariwisata adalah sebuah keniscayaan, keberadaannya saat ini bagai buah simalakama. Menyatukan persepsi antara prinsip-prinsip syariat Islam di Aceh dan wisata masih menemukan kendala-kendala di lapangan yang tak jarang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Persepsi dan komitmen bersama untuk memajukan pariwisata Aceh melalui prinsip yang berpihak terhadap syariat Islam, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan sangat penting diwujudkan. Harapannya pengembangan wisata Aceh akan memiliki arah dan sasaran sesuai harapan bersama yang berdampak positif.

Wisata Aceh sebaiknya mampu tumbuh selaras dalam memelihara dan melestarikan kekayaan seni budaya Aceh yang Islami. Dengan demikian akan mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh melalui peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang tentunya akan memberi dampak ekonomi lainnya (*economic benefits*). Program kegiatan sosialisasi/kampanye sadar wisata melalui kegiatan seminar, workshop, rakor/raker, FGD, pelatihan dan lain sebagainya seharusnya melibatkan semua elemen/pihak yang berkompeten/berkepentingan untuk mewujudkan kesadaran wisata di Aceh yang tidak menabrak prinsip syariah dengan kacamata yang lebih moderat. Ini penting dan strategis dalam rangka menyatukan visi dan misi serta langkah bersama dalam memajukan pariwisata Aceh.

#### **15. Kurangnya peran serta komunitas wisata.**

Kehadiran komunitas-komunitas membawa peran yang mampu membantu memajukan pariwisata Aceh. Komunitas yang telah ada masih perlu mendapat peran yang signifikan agar mampu dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan wisata.

---

Bila komunitas-komunitas ini diarahkan ke dalam bagian strategi pemasaran wisata, tentunya akan memberikan keuntungan-keuntungan tersendiri.

**16. Optimalisasi yang masih minim berkenaan dengan kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public, private, partnership*).**

Kemitraan dan kerjasama antar pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota maupun antara pemerintah dan swasta (industri pariwisata) serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan di Aceh. Pengembangan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif dan efisien dalam upaya mendukung pembangunan kepariwisataan Aceh perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan lagi.

**17. Tidak adanya pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata.**

Pemahaman dan keterlibatan masyarakat sekitar terhadap sarana dan prasarana wisata selama ini masih belum menunjukkan perubahan perlakuan yang lebih baik. Masih adanya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pariwisata dalam kondisi rusak, terabaikan manajemen pengelolaannya dan belum berfungsi secara maksimal dalam memberikan kenyamanan dan pelayanan prima kepada wisatawan yang berkunjung. Masih kurangnya rasa “memiliki” oleh masyarakat dan pelaku pariwisata menyebabkan pemeliharaan terhadap sarana/prasarana dan fasilitas pendukung pariwisata masih menjadi catatan negatif dalam kemajuan wisata Aceh. Masih banyak kritikan yang mencuat dan belum ada penanganan yang tepat untuk mengatasinya. Masyarakat diharapkan dapat turut serta dan berperan aktif dalam upaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang telah dibangun, sekaligus memberi pelayanan prima kepada wisatawan. Perlu dicari solusi yang tepat dengan formula yang sesuai dengan masyarakat dan pelaku pariwisata serta wisatawan itu sendiri dalam menjaga serta memelihara sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung pariwisata.

---

**18. Masih minim sekali minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor wisata.**

Isu-isu negatif yang berkembang diluar Aceh tentang keamanan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah berdampak pada kesalahpahaman atau “*misunderstanding*” tentang pelaksanaan syariat Islam yang sebenarnya. Kesalahpahaman ini juga telah berdampak pada minat para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Aceh. Upaya-upaya strategis dalam rangka meyakinkan para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Aceh perlu didorong dengan melibatkan semua pihak, sekaligus memberikan berbagai kemudahan dan insentif kepada investor untuk bersedia melakukan kegiatan investasi di Aceh dengan penuh keyakinan dan percaya diri.

**19. Kurangnya pertumbuhan diversifikasi baru kepariwisataan yang selaras dengan keistimewaan Aceh.**

Diversifikasi atau keberagaman baru di dalam dunia kepariwisataan Aceh seharusnya terus digali dan diciptakan yang sesuai dengan keistimewaan Aceh itu sendiri. Untuk itu perlu diusahakan hal-hal kreatif guna menemukannya dan tercipta dengan tetap menjadikan kekhasan sebagai sesuatu yang baru. Daya cipta yang baik dan diusahakan dengan terencana akan melahirkan serta menumbuhkan kembangkan diversifikasi baru kepariwisataan di Aceh.

**20. Belum berkembangnya konsep wisata halal dalam rangka penyetaraan industri pariwisata secara global.**

Konsep wisata halal yang belakangan ini menjadi tren di beberapa negara dan mulai mendunia, mendapat tempat ditengah-tengah masyarakat Aceh dan juga dunia. Namun pariwisata Aceh belum menemukan formula yang sesuai dalam mengadopsi konsep tersebut untuk diimplementasikan pada pariwisata di Aceh selama ini. Mengingat kehadiran konsep wisata halal masih baru, perlu dilakukan studi mendalam dan terukur agar menemukan konsep yang tepat bagi perkembangan wisata Aceh yang berada dalam koridor syariat Islam. Untuk mengaplikasikan wisata halal tidak mudah namun konsep ini dianggap sesuai dan mulai diterima ditengah-tengah persaingan wisata global yang cukup ketat. Kekhasan dan keunikan wisata kita yang memiliki kekayaan seni, adat dan budaya di Aceh yang bernafaskan Islam diharapkan mampu menciptakan konsep wisata

---

halal tersendiri, dengan demikian Aceh mampu memberikan sajian yang lain bagi industri wisata dunia.

**21. Belum optimalnya usaha pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian khazanah seni tradisional dan sastra budaya serta patenisasi seni budaya Aceh.**

Masih belum optimalnya perhatian dan keseriusan berbagai pihak terutama pemerintah dan masyarakat terkait dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keberagaman warisan budaya dan sejarah masa lalu (*cultural heritage*), budaya benda (*tangible*), maupun budaya tak benda (*intangible*). Perhatian serius sangat dibutuhkan dari pemerintah dan para pelaku budaya seperti seniman, sastrawan, sejarawan dan pelaku lainnya perlu dilakukan dalam rangka mendukung penguatan, pengembangan dan pelestarian khazanah seni tradisional dan sastra budaya serta hak paten dari seni budaya Aceh.

**22. Lemahnya sinergisitas secara terpadu dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang pariwisata antara provinsi dan kabupaten/kota.**

Untuk mengembangkan dan mempromosikan pariwisata Aceh di daerah-daerah baik strategis maupun tidak, perlu perencanaan dan perancangan yang sinergi agar dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang pariwisata mampu profesional dan juga proporsional dengan memberdayakan seluruh stakeholder di kabupaten/kota. Sinergitas terpadu antar provinsi dan kabupaten/kota harus berpedoman pada Qanun Aceh tentang Kepariwisata Aceh serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Aceh (RIPPDA).

**23. Belum optimalnya sektor promosi kepariwisataan, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional untuk lintas segmentasi usia, pendidikan, ketrampilan dan profesi.**

Sektor promosi kepariwisataan merupakan hal penting dalam pemasaran pariwisata. Promosi yang dilakukan selama ini sudah cukup baik namun masih terbatas. Perlu strategi yang lebih kreatif dan lebih luas untuk mempromosikan pariwisata Aceh dengan target regional, nasional maupun internasional. Diharapkan segmentasinya menjangkau lintas usia, pendidikan, keterampilan dan profesi.

---

**24. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata.**

Perlu peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih optimal sebagai alat pemasaran dalam mempromosikan wisata Aceh. Di zaman sekarang, teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan cukup pesat. Perlu penyesuaian dan penyegaran terhadap alat-alat pendukungnya agar mampu optimal dalam pemanfaatannya.

**25. Masih stagnan dan sempitnya pasar bagi pelaku industri kreatif dalam memasarkan produknya dan melakukan mitra kerja dengan pelaku industri yang terkait dengan sektor kepariwisataan.**

Pelaku industri kreatif masih terbilang minim dan terbatas jumlahnya. Perlu penguatan bagi pelaku industri kreatif dalam memperluas pasarnya sehingga tidak lagi stagnan. Pelaku industri kreatif perlu melakukan kerjasama dengan mitra kerja sesama pelaku industri terkait sektor kepariwisataan. Dengan begitu industri kreatif mampu berkembang dan memasarkan produknya secara lebih luas tentunya dengan standar yang baik.

**26. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana pariwisata.**

Masyarakat memiliki peran yang cukup besar jika ingin memajukan pariwisata Aceh. Keterlibatan masyarakat yang selama ini dijalankan perlu dievaluasi, guna mendapatkan formula yang cocok dalam usaha memelihara sarana pariwisata yang ada. Membangun sarana dan prasarana pariwisata membutuhkan biaya yang tidak sedikit yang dalam perencanaannya ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Untuk itu masyarakat seharusnya lebih intens dilibatkan dengan keterlibatan yang tepat tentunya.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Pemerintah Aceh. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2017-2022 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Misi Kedua RPJMA:** Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke-Acehan dan kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.

Tujuannya adalah:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif (pewaris budaya, peneliti, pengelola, pendidik dan penggiat seni) untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya budaya yang berlandaskan adat dan kebudayaan Aceh umumnya.

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya penutur bahasa asli dan kesusastraan 9 etnik group di Aceh;
2. Meningkatnya tata kelola permuseuman, taman seni dan budaya, situs sejarah dan cagar budaya;
3. Bertambahnya variasi produksi dan industri seni kreatif yang berlandaskan nilai dan norma adat masyarakat Aceh;
4. Revitalisasi peralatan tradisional khas Aceh yang nyaris punah;
5. Pemberdayaan pengrajin peralatan tradisional khas Aceh;
6. Penguatan literasi yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh.

**Misi Kedelapan RPJMA:** Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.

Tujuannya adalah:

1. Pengembangan potensi sumber daya budaya (*tangible* dan *intangible*) untuk mengembangkan serta meningkatkan nilai dan jumlah, baik produksi maupun industri pariwisata di Aceh;
2. Penguatan infrastruktur, jejaring diplomasi dan promosi kebudayaan, serta pemasaran pariwisata Aceh baik dalam skala lokal, interregional, nasional dan internasional.

Sasarannya adalah:

1. Tumbuhnya komunitas/kelompok usaha masyarakat kecil dan menengah yang berorientasi pada industri pariwisata baik skala nasional dan internasional;
2. Mengembangkan infrastruktur kawasan wisata;
3. Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara;
4. Peningkatan lama kunjungan;
5. Perluasan pasar negara pengunjung wisatawan di Aceh;
6. Meningkatkan minat beli bagi wisatawan.

**Misi Kesembilan RPJMA:** Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Tujuannya adalah:

1. Efisiensi tata kelola dan perencanaan pengembangan pariwisata Aceh dalam efektifitas pelayanan serta produktivitas penyelenggaraan program/kegiatan dinas yang terintegrasi dengan SKPA lainnya.

Sasarannya adalah:

1. Bertambahnya dokumen dalam Sistem informasi yang terintegrasi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan;
2. Terintegrasinya program/kegiatan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Aceh tersebut dan mengacu kepada arahan teknis operasional dokumen RPJMA 2017-2022 maka tujuan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata untuk 5 (lima) tahun kedepan dijabarkan dalam tabel T-C.25 berikut ini:

Tabel IV.1

(T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2018 s/d 2022				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penguatan SDM kreatif (pewaris budaya, peneliti, pengelola, pendidik, dan penggiat seni) dan tata kelola untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya budaya yang berlandaskan adat dan kebudayaan Aceh umumnya	Meningkatnya penutur bahasa asli dan kesusasteraan 9 etnik group di Aceh	Terciptanya buku bahasa dan kesusasteraan daerah (buku)	1	2	2	2	2
			Bertambahnya ikon kepariwisataan (kegiatan)	5	5	5	5	5
			Bertambahnya karya kreatif, inovatif kekinian (buah)	9	9	9	9	9
		Meningkatnya tata kelola permuseuman, taman seni dan budaya, situs sejarah dan cagar budaya	Peningkatan pengelola cagar budaya (kegiatan)	2	2	2	2	2
			Peningkatan pelestarian dan, pengembangan (unit)	23	25	25	27	29
			Bertambahnya jumlah cagar budaya yang mendapat pengakuan (buah)	7	7	8	8	8
			Jumlah kegiatan peningkatan nilai sejarah (kegiatan)	5	4	4	4	5
			Peningkatan pemanfaatan gedung/fasilitas seni, budaya dan olahraga (kegiatan)	6	6	6	6	6
			Peningkatan kuantitas dan kualitas pernaskahan di museum (buah)	9	9	9	9	9
			Bertambahnya variasi produksi dan industri seni	Jumlah penciptaan karya seni baru (buah)	5	5	5	5

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2018 s/d 2022				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kreatif yang berlandaskan nilai dan norma adat masyarakat Aceh	Jumlah perangkat pembelajaran (buah)	1	2	3	4	5
		Revitalisasi peralatan tradisional khas Aceh yang nyaris punah	Jumlah peralatan tradisional khas Aceh (buah)	2	2	2	2	2
		Pemberdayaan pengrajin peralatan tradisional khas Aceh	Jumlah usaha pengrajin peralatan tradisional (usaha)	4	4	4	4	4
		Penguatan literasi yang berkaitan dgn peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh.	Jumlah buku hasil penelitian (buah)	0	1	2	2	2
2	Pengembangan potensi sumberdaya alam, budaya dan buatan untuk mengembangkan serta meningkatkan nilai/jumlah produksi maupun industri pariwisata di Aceh.	Tumbuhnya komunitas/ kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang berorientasi pada industri pariwisata baik skala nasional dan internasional	Jumlah kelompok usaha masyarakat kecil dan menengah (buah)	5	6	8	10	10
			Bertambahnya jumlah objek wisata (buah)	4	5	5	5	5
		Mengembangkan kawasan wisata	Menciptakan penzoningan / masterplan kawasan / objek wisata (dokumen)	1	1	1	1	1
			Bertambahnya infrastruktur kepariwisataan (aksesibilitas, sarana atraksi dan amenities) (objek)	10	10	10	10	10

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2018 s/d 2022				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Bertambahnya jumlah kawasan strategis (kawasan perkabupaten/kota)	1	1	1	1	1
3	Penguatan infrastruktur, jejaring diplomasi dan promosi kebudayaan, serta pemasaran pariwisata Aceh baik dalam skala lokal, interregional, nasional dan internasional	Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara	Peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara (orang)	2.719.040	2.990.944	3.290.039	3.619.043	3.980.947
		Peningkatan lama kunjungan	Meningkatkan lama kunjungan (hari)	3	3	3	3	3
		Perluasan pasar wisatawan	Jumlah promosi pariwisata dan budaya (kegiatan)	15	15	15	15	15
		Meningkatkan minat beli bagi wisatawan	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh (persentase)	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
4	Efisiensi tata kelola dan perencanaan pengembangan pariwisata Aceh dalam efektifitas pelayanan serta produktivitas penyelenggaraan program/kegiatan dinas yang terintegrasi dgn SKPA lainnya	Bertambahnya dokumen dalam Sistem informasi yang terintegrasi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan	Jumlah dokumen sistem informasi yang bersinergi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Lintas Sektoral (buah)	0	1	0	0	0
		Terintegrasinya program/kegiatan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan	Bertambahnya program/kegiatan yang bersinergi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Lintas Sektoral (buah)	0	1	1	1	1

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran dalam RPJMA. Strategi memuat rumusan tindak yang lebih taktis dan pragmatis dalam menerjemahkan sasaran dalam RPJMA. Sementara arah kebijakan memuat panduan tindak yang lebih konkret yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Arah kebijakan juga bersifat pentahapan yaitu tahapan pembangunan setiap tahun dalam periode RPJMA.

Dalam menjabarkan visi dan misi Pemerintah Aceh dirumuskan sejumlah tujuan, program dan sasaran yang mendasari masing-masing strategi dan arah kebijakan. Misi utama Pemerintah Aceh tersebut adalah:

1. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dan kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
2. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
3. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan Misi Pemerintah Aceh, selanjutnya disusun tujuan, program, dan sasaran untuk menentukan strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut:

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2 (Kedua)

Misi 2 (kedua) Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan dalam RPJMA yaitu "Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dan kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain".

Secara umum misi ini terkait dengan "Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah dan akhlak". Menjabarkan misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menentukan tujuan I (pertama) yaitu: **"Penguatan SDM kreatif (pewaris budaya, peneliti, pengelola, pendidik, dan penggiat seni) untuk melestarikan dan mengembangkan sumberdaya budaya yang berlandaskan adat dan kebudayaan Aceh umumnya"**.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menetapkan program **”Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya”** dan **”Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan”** dengan menetapkan 6 (enam) sasaran untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya penutur bahasa asli dan kesusasteraan 9 etnik group di Aceh;
2. Meningkatnya tata kelola permuseuman, taman seni dan budaya, sejarah dan cagar budaya;
3. Bertambahnya variasi produksi dan industri seni kreatif yang berlandaskan nilai dan norma adat masyarakat Aceh;
4. Revitalisasi peralatan tradisional khas Aceh yang nyaris punah;
5. Pemberdayaan pengrajin peralatan tradisional khas Aceh;
6. Penguatan literasi yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh.

#### 5.1.1 Meningkatnya penutur bahasa asli dan kesusasteraan 9 etnik group di Aceh

Dalam mencapai Sasaran “Meningkatkan jumlah penutur bahasa asli dan kesusasteraan 9 etnik group di Aceh” maka ditetapkan indikator tujuan/sasaran: i) Terciptanya buku bahasa dan kesusasteraan 9 etnik/suku, ii) Tumbuhnya icon/icon kepariwisataan Aceh berbasis etnik/suku, bahasa dan kesusasteraan Aceh dengan penyetaraan pemahamannya secara internasional (translasi bahasa), dan iii) Lahirnya karya-karya kreatif, inovatif dan mengandung unsur kekinian yang bersumber dari bahasa dan kesusasteraan dari 9 etnik group di Aceh, maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

##### a. Strategi

- 1) Menggiatkan kelompok penulis/peneliti bahasa dan kesusasteraan 9 etnik/suku;
- 2) Mengembangkan program wisata kreatif berbasis 9 etnik/suku untuk menambah daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Melahirkan karya kreatif, inovatif yang berbasis teknologi yang bersumber dari bahasa dan kesusasteraan 9 etnik group di Aceh.

---

b. Arah Kebijakan

- 1) Memperkokoh marwah keistimewaan Aceh sebagai daerah yang kaya ragam bahasa dan budaya yang bernilai syariat;
- 2) Menumbuhkan perilaku budaya masyarakat Aceh yang sesuai dengan nilai, adat istiadat dan budaya Aceh yang bersifat Islami;
- 3) Meningkatkan jumlah penutur bahasa ibu yang bersumber dari keberagaman etnik di Aceh.

5.1.2 Meningkatkan tata kelola permuseuman, taman seni dan budaya, sejarah dan cagar budaya

Dalam mencapai sasaran “Meningkatkan tata kelola permuseuman, taman Seni dan budaya, sejarah dan cagar budaya” maka ditetapkan indikator tujuan/sasaran: I) Terorganisirnya pengelola-pengelola cagar budaya baik status negeri maupun swasta, II) Meningkatkan pelestarian, pengembangan museum, kawasan yang mengandung nilai sejarah dan cagar budaya, III) Bertambahnya jumlah daftar cagar budaya tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan dunia melalui kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikannya, IV) Meningkatnya nilai sejarah dan budaya Aceh, V) Meningkatnya kegiatan kebudayaan dan seni yang mengoptimalkan pemanfaatan gedung Tgk Chik Di Tiro, gedung Taman Seni dan Budaya, Museum serta lapangan golf, dan VI) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pernaskahan di museum. Maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

a. Strategi

- 1) Melakukan kerjasama pengelola cagar budaya baik dari provinsi, lintas sektoral dan *stakeholder* terkait;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan pengelola agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan dalam mendukung pelestarian cagar budaya;
- 3) Membangun fasilitas pendukung baik di museum, kompleks bangunan, situs, maupun kawasan cagar budaya yang bersinergi dengan SKPA, lintas sektoral dan masyarakat sekitar cagar budaya;
- 4) Melakukan konservasi permuseuman, cagar budaya yang telah terdaftar dengan melibatkan komunitas dan masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya;

- 5) Menciptakan fungsi-fungsi baru bagi pemanfaatan bangunan cagar budaya yang sudah terbengkalai;
  - 6) Meningkatkan basis data berbasis *online* untuk menarik daya minat wisata minat khusus secara nasional dan internasional;
  - 7) Melakukan evaluasi dan perawatan secara berkala terhadap program pelestarian museum, kawasan bersejarah dan cagar budaya yang sudah dikembangkan;
  - 8) Mengembangkan program wisata kreatif, edukatif pada daya tarik wisata warisan budaya;
  - 9) Meningkatkan inventarisasi cagar budaya di seluruh Aceh melalui laporan-laporan masyarakat;
  - 10) Penyusunan Pergub dan Qanun tentang cagar budaya;
  - 11) Menguatkan kecintaan masyarakat terhadap cagar budaya khususnya yang ada di lingkungan mereka;
  - 12) Meningkatkan kerjasama dengan komunitas pencinta cagar budaya untuk mendaftarkan cagar budaya sebagai warisan budaya di tingkat kabupaten, provinsi dan dunia;
  - 13) Menguatkan nilai sejarah dan budaya dijadikan sebagai identitas dan jati diri masyarakat Aceh;
  - 14) Menggiatkan kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan partisipasi lintas disiplin ilmu, profesi dan kelembagaan bidang kebudayaan dan seni;
  - 15) Menambah sumberdaya dan layanan pernaskahan untuk memenuhi kecukupan dan ketersediaan sumberdaya dan layanan perpustakaan di museum;
  - 16) Melakukan restorasi terhadap naskah klasik;
- b. Arah Kebijakan
- 1) Menguatnya koordinasi yang terpadu dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang kebudayaan antara provinsi dan kabupaten/kota;
  - 2) Meningkatkan kinerja pengelola warisan budaya untuk penguatan destinasi di semua wilayah di Aceh;
  - 3) Termanfaatkannya aset budaya secara optimal bagi aktifitas pagelaran budaya dan kesenian;

- 4) Meningkatkan kualifikasi SDM dalam pengelolaan peninggalan sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal;
- 5) Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk pengembangan program kegiatan lainnya yang terintegrasi;
- 6) Terintegrasinya basis data berbasis *online* terkait promosi dan pemasaran industri wisata;
- 7) Penguatan rencana serta penataan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pendataan situs dan cagar budaya Aceh, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi melalui Tim Cagar Budaya untuk pengesahan cagar budaya di tingkat kabupaten dan provinsi;
- 8) Memperdalam khazanah pengetahuan sejarah perkembangan peradaban, adat serta budaya Aceh.

#### 5.1.3 Bertambahnya variasi produksi dan industri seni kreatif yang berlandaskan nilai dan norma adat masyarakat Aceh

Dalam mencapai Sasaran “Bertambahnya variasi produksi dan industri seni kreatif yang berlandaskan nilai dan norma adat masyarakat Aceh” maka ditetapkan indikator tujuan/sasaran: i) Berkembangnya penciptaan karya-karya seni baru dari beragam media (rupa, pertunjukan, film, animasi, desain, kriya dan busana) yang bersumber dari nilai kesejarahan, adat dan kebudayaan 8 etnik group di Aceh, dan ii) Berkembangnya perangkat pembelajaran yang berorientasi pada nilai kearifan lokal dan kebudayaan masyarakat Aceh. Maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

##### a. Strategi

- 1) Menggiatkan kelompok-kelompok pelaku seni dalam menciptakan karya-karya baru dari beragam media yang berbasis 8 etnik/suku;
- 2) Mengembangkan program kemitraan dengan lintas sektoral yang berkaitan berorientasi pada pemanfaatan nilai-nilai kebudayaan dalam perangkat pembelajaran.

##### b. Arah Kebijakan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan sebanyak-banyaknya pendidik, peneliti, dan penggiat seni umumnya dalam meningkatkan kualitas apresiasi

---

masyarakat terhadap karya seni dan budaya terutama yang berbasis kearifan lokal;

- 2) Bertumbuh dan bertambahnya karya-karya seni dan kreasi budaya yang berbasis kearifan lokal, serta bersanding dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termutakhir.

#### 5.1.4 Revitalisasi peralatan tradisional khas Aceh yang nyaris punah

Dalam mencapai sasaran “Revitalisasi peralatan tradisional khas Aceh yang nyaris punah” maka ditetapkan indikator tujuan/sasaran ”Bertambahnya peralatan tradisional khas Aceh”, dengan strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

##### b. Strategi

- 1) Menginventarisir eksistensi pembuat/pengrajin peralatan tradisional khas Aceh;
- 2) Merumuskan konsep, teknik dan konstruksi peralatan tradisional khas Aceh sebagai panduan/modul untuk mereproduksi peralatan yang dimaksud dalam jumlah besar.

##### c. Arah Kebijakan

Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana pariwisata.

#### 5.1.5 Pemberdayaan pengrajin peralatan tradisional khas Aceh

Dalam mencapai sasaran “Pemberdayaan pengrajin peralatan tradisional khas Aceh” dengan indikator tujuan/sasaran ”Meningkatkan usaha pengrajin peralatan tradisional khas Aceh melalui penciptaan komunitas pengrajin”, maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

##### a. Strategi

- 1) Mengembangkan industri peralatan tradisional khas Aceh berkualitas;
- 2) Menciptakan peluang pemasaran peralatan tradisional khas Aceh secara luas.

##### b. Arah Kebijakan

- 1) Reproduksi, *branding*/promosi dan pemasaran;
- 2) Partnership (kemitraan usaha lokal, regional dan internasional).

### 5.1.6 Penguatan literasi yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh

Dalam mencapai sasaran “Pemberdayaan pengrajin peralatan tradisional khas Aceh” dengan indikator tujuan/sasaran ”Meningkatkan usaha pengrajin peralatan tradisional khas Aceh melalui penciptaan komunitas pengrajin”, maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

- a. Strategi
  - 1) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian khususnya terkait dengan sejarah/asal usul, fungsi dan pemanfaatan;
  - 2) Memfasilitas/menghimpun calon-calon peneliti untuk melahirkan karya atau yang berkaitan dengan perlengkapan tradisional khas Aceh
- b. Arah Kebijakan
  - 1) Pendidikan dan pelatihan kemampuan literasi dan kreatifitas menulis tentang peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh;
  - 2) Pendidikan dan pelatihan kemampuan literasi dan kreatifitas menulis tentang peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh.

## 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 8 (Kedelapan)

Misi 8 (kedelapan) Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan dalam RPJMA yaitu ”Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif”. Secara umum misi ini terkait dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menjabarkan misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menentukan 2 (dua) tujuan yaitu I (pertama) ”**Pengembangan potensi sumberdaya budaya (*tangible dan intangible*) untuk mengembangkan serta meningkatkan nilai dan jumlah, baik produksi maupun industri pariwisata di Aceh**” dan II (kedua) ”**Penguatan infrastruktur, jejaring diplomasi dan promosi kebudayaan serta pemasaran pariwisata Aceh baik dalam skala lokal, interregional, nasional dan internasional**”.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menetapkan program ”**Pengembangan Destinasi Pariwisata**” dan ”**Pemasaran Pariwisata**” dengan menetapkan 6 (enam) sasaran untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

1. Tumbuhnya komunitas/kelompok usaha masyarakat kecil dan menengah yang berorientasi pada industri pariwisata baik skala nasional dan internasional;
2. Mengembangkan infrastruktur kawasan wisata;
3. Meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara;
4. Peningkatan lama kunjungan;
5. Perluasan pasar negara pengujung wisatawan di Aceh;
6. Meningkatkan minat beli bagi wisatawan.

#### 5.2.1 Tumbuhnya komunitas/kelompok usaha masyarakat kecil dan menengah yang berorientasi pada industri pariwisata baik skala nasional dan internasional

Dalam mencapai Sasaran “Tumbuhnya komunitas/kelompok usaha masyarakat kecil dan menengah yang berorientasi pada industri pariwisata baik skala nasional dan internasional” ditetapkan indikator tujuan/sasaran: i) Berkembangnya kelompok usaha masyarakat kecil dan menengah yang berorientasi pada penambahan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, dan ii) Bertambahnya objek-objek wisata yang berskala nasional dan internasional yang terlindungi secara hukum, maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

##### a. Strategi

- 1) Mengembangkan kawasan ekowisata alam, pariwisata pendidikan dan sejarah, pariwisata belanja dan kuliner kreatif, pariwisata warisan budaya, pariwisata budaya tradisional, pariwisata konvensi dan olahraga;
- 2) Mengembangkan program-program kerjasama secara nasional dan internasional untuk perlindungan seluruh aset wisata di Aceh baik yang berbasis budaya maupun industri ekonomi kreatif kepariwisataan.

##### b. Arah Kebijakan

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepariwisataan, khususnya dalam usaha pelayanan dan pengelolaan pariwisata;
- 2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat (Sadar Wisata);
- 3) Meningkatkan peran komunitas wisata;
- 4) Semakin optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public, private, partnership*).

### 5.2.2 Mengembangkan infrastruktur kawasan wisata.

Dalam mencapai Sasaran “Mengembangkan infrastruktur kawasan wisata” dengan indikator tujuan/sasaran: i) Menciptakan penzoningan/masterplan kawasan objek wisata, ii) Bertambahnya infrastruktur kepariwisataan dan iii) Berkembangnya jumlah kawasan pariwisata strategis provinsi, maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

#### a. Strategi

- 1) Membangun sarana, prasarana dan fasilitas pendukung pariwisata yang sinergis antara lintas SKPA dan lintas sektoral;
- 2) Membuka peluang investasi bidang pariwisata seluas-luasnya yang bersifat perseorangan, lembaga maupun perusahaan oleh sumber daya investor asing maupun lokal dan nasional;
- 3) Mengembangkan program dalam usaha meningkatkan kawasan pariwisata strategis provinsi.

#### b. Arah Kebijakan

- 1) Meningkatnya pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;
- 2) Semakin tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor wisata;
- 3) Tumbuhnya diversifikasi baru kepariwisataan yang selaras dengan keistimewaan Aceh.

### 5.2.3 Meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara

Dalam mencapai Sasaran “Meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara” dengan indikator tujuan/sasaran: ”Meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara melalui konsep 3A (atraksi, aksesibilitas dan amenitas), maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

#### a. Strategi

- 1) Mempersiapkan program/kegiatan promosi dan pemasaran yang berskala nasional dan internasional;

- 2) Membina kerjasama penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan baik ditingkat regional, nasional dan internasional, dalam hal standarisasi/sertifikasi, serta pengembangan industri pariwisata dunia.

b. Arah Kebijakan

- 1) Berkembangnya konsep wisata halal dalam rangka penyetaraan industri pariwisata secara global;
- 2) Mengoptimalkan usaha pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian khazanah seni tradisional dan sastra budaya serta patenisasi seni budaya Aceh.

#### 5.2.4 Peningkatan lama kunjungan

Dalam mencapai Sasaran “Peningkatan lama kunjungan” dengan indikator tujuan/sasaran: ”Meningkatkan lama kunjungan melalui atraksi, keunikan masyarakat dan keunggulan-keunggulan budaya”, maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

a. Strategi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana prasarana baik utama maupun pendukung yang menjadi kebutuhan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di Aceh.
- 2) Memperkuat identitas kearifan lokal serta sinergisitas masyarakat setempat yang menjadi destinasi kepariwisataan dengan pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata lainnya di Aceh.

b. Arah Kebijakan

Menguatkan sinergisitas secara terpadu dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang pariwisata antara provinsi dan kabupaten/kota.

#### 5.2.5 Perluasan pasar negara pengunjung wisatawan di Aceh

Dalam mencapai Sasaran “Perluasan pasar negara pengunjung wisatawan di Aceh” dengan indikator tujuan/sasaran: ”Perluasan media promosi pariwisata dan budaya Aceh melalui pemanfaatan teknologi multi media”, maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

- a. Strategi
  - 1) Mengoptimalkan jejaring media penyiaran, media sosial dan *cyber* resmi pemerintahan dan lembaga negara serta komunitas penyiaran dan *cyber* swasta/independen untuk menunjang promosi budaya dan kepariwisataan Aceh;
  - 2) Mempersingkat layanan informasi, persiapan kunjungan serta menetapkan pilihan-pilihan beragam paket wisata yang dapat memperkaya pilihan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;
  - 3) Turut andil dalam pelaksanaan pameran yang dapat memberikan efek besar untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
- b. Arah Kebijakan
  - 1) Memperluas seluruh sektor promosi kepariwisataan, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional untuk lintas segmentasi usia, pendidikan, ketrampilan dan profesi.
  - 2) Semakin optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technology/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata

#### 5.2.6 Meningkatkan minat beli bagi wisatawan

Dalam mencapai Sasaran “Meningkatkan minat beli bagi wisatawan” dengan indikator tujuan/sasaran: ”Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh”, maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

- a. Strategi
  - 1) Meningkatkan nilai ekonomi dari produk industri kreatif baik yang berskala kecil maupun besar yang dapat dijadikan produk unggulan kepariwisataan Aceh;
  - 2) Melakukan kerjasama pengembangan produk-produk industri kreatif dengan stake holder terkait
- b. Arah Kebijakan
 

Membuka pasar selebar-lebarnya kepada pelaku industri kreatif dalam memasarkan produknya dan melakukan mitra kerja dengan pelaku industri yang terkait dengan sektor kepariwisataan.

### 5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 9 (Kesembilan)

Misi 9 (kesembilan) Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan dalam RPJMA yaitu ”Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan”. Secara umum misi ini terkait dengan membangun bank data terintegrasi. Menjabarkan misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menentukan tujuannya yaitu **”Efisiensi tata kelola dan perencanaan pengembangan pariwisata Aceh dalam efektifitas pelayanan serta produktivitas penyelenggaraan program/kegiatan dinas yang terintegrasi dengan SKPA lainnya”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menetapkan 2 (dua) sasaran untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

1. Bertambahnya dokumen dalam sistem informasi yang terintegrasi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan;
2. Terintegrasinya program/kegiatan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan.

#### 5.3.1 Bertambahnya dokumen dalam sistem informasi yang terintegrasi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan

Dalam mencapai Sasaran “Bertambahnya dokumen dalam Sistem informasi yang terintegrasi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan” dengan indikator tujuan/sasaran: Melahirkan dokumen-dokumen dalam sistem informasi yang bersinergi antara provinsi dengan kabupaten/kota dan lintas sektoral, maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

##### a. Strategi

Menginisiasi kerjasama lintas sektoral terkait perencanaan, pengembangan serta pengawasan pembangunan ekonomi industri budaya dan kepariwisataan;

##### b. Arah Kebijakan

Koordinasi teknis yang bersinergi antar provinsi, kabupaten/kota, dan lintas sektoral untuk peningkatan sistem informasi yang terintegrasi.

#### 5.3.2 Terintegrasinya program/kegiatan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan

---

Dalam mencapai Sasaran “Terintegrasinya program/kegiatan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan” dengan indikator tujuan/sasaran: Menciptakan program/kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan yang bersinergi antara provinsi dengan kabupaten/kota, maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

a. Strategi

Pelibatan pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata secara nasional maupun internasional dalam memunculkan serta memperbaharui program/kegiatan yang bernilai ekonomi tinggi dalam industri budaya dan pariwisata Aceh.

b. Arah Kebijakan

Koordinasi teknis yang bersinergi antar provinsi, kabupaten/kota, dan lintas sektoral untuk peningkatan sistem informasi yang terintegrasi.

Tabel V.1

(T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

**Visi** : Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani**Misi 2** : Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keAcehan dan kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Penguatan SDM kreatif (pewaris budaya, peneliti, pengelola, pendidik, dan penggiat seni) untuk melestarikan dan mengembangkan sumberdaya budaya yang berlandaskan adat dan kebudayaan Aceh umumnya.	1.1. Meningkatkan jumlah penutur bahasa asli daerah di seluruh provinsi Aceh	1.1.1. Menggiatkan kelompok penulis/peneliti bahasa dan kesusastraan 12 etnik/suku	1.1.1.1 Memperkokoh marwah keistimewaan Aceh sebagai daerah yang kaya ragam bahasa dan budaya yang bernilai syariat.
		1.1.2. Mengembangkan program wisata kreatif berbasis 12 etnik/suku untuk menambah daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, ilmu pengetahuan dan teknologi	1.1.2.1. Menumbuhkan Perilaku budaya masyarakat Aceh yang sesuai dengan nilai, adat istiadat dan budaya Aceh yang bersifat Islami.
		1.1.3. Melahirkan karya kreatif, inovatif yang berbasis teknologi yang bersumber dari bahasa dan kesusastraan 9 etnik group di Aceh	1.1.3.1. Meningkatkan jumlah penutur bahasa ibu yang bersumber dari keberagaman etnik di Aceh
	1.2. Meningkatkan tata kelola permuseuman, Taman Seni dan Budaya, Sejarah dan cagar budaya	1.2.1 Melakukan kerjasama pengelola cagar budaya baik dari provinsi, lintas sektoral dan stakeholder terkait	1.2.1.1. Menguatnya koordinasi yang terpadu dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang kebudayaan antara provinsi dan kabupaten/kota.
		1.2.2 Meningkatkan kesejahteraan pengelola agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan	1.2.2.1 Meningkatkan kinerja pengelola warisan budaya untuk penguatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dalam mendukung pelestarian cagar budaya	destinasi di semua wilayah di Aceh
		1.2.3 Membangun fasilitas pendukung baik di museum, kompleks bangunan, situs, maupun kawasan cagar budaya yang bersinergi dengan skpa, lintas sektoral dan masyarakat sekitar cagar budaya.	1.2.3.1. Termanfaatkannya aset budaya secara optimal bagi aktifitas pagelaran budaya dan kesenian
		1.2.4 Melakukan konservasi permuseuman, cagar budaya yang telah terdaftar dengan melibatkan komunitas dan masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya.	1.2.4.1. Meningkatnya kualifikasi SDM dalam pengelolaan peninggalan sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal
		1.2.5 Menciptakan fungsi-fungsi baru bagi pemanfaatan bangunan cagar budaya yang sudah terbengkalai.	1.2.5.1 Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk pengembangan program kegiatan lainnya yang terintegrasi
		1.2.6 Meningkatkan database berbasis online untuk menarik daya minat wisata minat khusus secara nasional dan internasional	1.2.6.1. Terintegrasinya database berbasis online terkait promosi dan pemasaran industri wisata
		1.2.7 Melakukan evaluasi dan perawatan secara berkala terhadap program pelestarian museum, kawasan bersejarah dan cagar budaya yang sudah dikembangkan.	1.2.7.1. Terintegrasinya database berbasis online terkait promosi dan pemasaran industri wisata
		1.2.8 Mengembangkan program wisata kreatif,	1.2.8.1. Terintegrasinya database berbasis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>edukatif pada daya tarik wisata warisan budaya.</p> <p>1.2.9 Meningkatkan inventarisasi cagar budaya di seluruh Aceh melalui laporan-laporan masyarakat.</p> <p>1.2.10 Penyusunan Pergub dan Qanun tentang Cagar Budaya</p> <p>1.2.11 Menguatkan kecintaan masyarakat terhadap cagar budaya khususnya yang ada di lingkungan mereka.</p>	<p>online terkait promosi dan pemasaran industri wisata</p> <p>1.2.9.1. Penguatan rencana serta penataan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pendataan situs dan cagar budaya Aceh, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi melalui Tim Cagar Budaya untuk pengesahan cagar budaya di tingkat kabupaten dan provinsi</p> <p>1.2.10.1. Penguatan rencana serta penataan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pendataan situs dan cagar budaya Aceh, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi melalui Tim Cagar Budaya untuk pengesahan cagar budaya di tingkat kabupaten dan provinsi</p> <p>1.2.11.1. Penguatan rencana serta penataan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pendataan situs dan cagar budaya Aceh, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi melalui Tim Cagar Budaya untuk pengesahan cagar budaya di tingkat kabupaten dan provinsi</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>1.2.12 Meningkatkan kerjasama dengan komunitas pencinta cagar budaya untuk mendaftarkan cagar budaya sebagai warisan budaya di tingkat kab, prov dan dunia</p> <p>1.2.13 Menguatkan nilai sejarah dan budaya dijadikan sebagai identitas dan jati diri masyarakat Aceh</p> <p>1.2.14 Menggiatkan kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan partisipasi lintas disiplin ilmu, profesi dan kelembagaan bidang kebudayaan dan seni</p> <p>1.2.15 Menambah sumberdaya dan layanan pernaskahan untuk memenuhi kecukupan</p>	<p>1.2.12.1. Penguatan rencana serta penataan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pendataan situs dan cagar budaya Aceh, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi melalui Tim Cagar Budaya untuk pengesahan cagar budaya di tingkat kabupaten dan provinsi</p> <p>1.2.13.1. Penguatan rencana serta penataan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pendataan situs dan cagar budaya Aceh, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi melalui Tim Cagar Budaya untuk pengesahan cagar budaya di tingkat kabupaten dan provinsi</p> <p>1.2.14.1. Penguatan rencana serta penataan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pendataan situs dan cagar budaya Aceh, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi melalui Tim Cagar Budaya untuk pengesahan cagar budaya di tingkat kabupaten dan provinsi</p> <p>1.2.15.1. Memperdalam khazanah pengetahuan sejarah perkembangan peradaban,</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan ketersediaan sumberdaya dan layanan perpustakaan di museum.	adat serta budaya Aceh
	1.3.Meningkatkan tata kelola permuseuman, Taman Seni dan Budaya, Sejarah dan cagar budaya	1.2.16 Melakukan restorasi terhadap naskah klasik.	1.2.16.1. Memperdalam khazanah pengetahuan sejarah perkembangan peradaban, adat serta budaya Aceh
		1.3.1. Menggiatkan kelompok-kelompok pelaku seni dalam menciptakan karya-karya baru dari beragam media yang berbasis 8 etnik/suku	1.3.1.1. Meningkatkan kesejahteraan sebanyak-banyaknya pendidik, peneliti dan penggiat seni umumnya dalam meningkatnya kualitas apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan budaya yang terutama yang berbasis kerarifan lokal
		1.3.2. Mengembangkan program kemitraan dengan lintas sektoral yang berkaitan berorientasi pada pemanfaatan nilai-nilai kebudayaan dalam perangkat pembelajaran	1.3.2.1. Bertumbuh dan bertambahnya karya-karya seni dan kreasi budaya yang berbasis kearifan lokal, serta bersanding dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termutakhir
	1.4.Revitalisasi peralatan tradisional khas Aceh yang nyaris punah	1.4.1. Menginventarisir eksistensi pembuat/pengrajin peralatan tradisional khas Aceh	1.4.1.1. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana pariwisata
		1.4.2. Merumuskan konsep, teknik dan kontruksi peralatan tradisional khas Aceh sebagai panduan/modul untuk mereproduksi peralatan yang dimaksud	1.4.2.1. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>1.5.Pemberdayaan pengrajin peralatan tradisional khas Aceh</p> <p>1.6.Penguatan literasi yang berkaitan dengan Peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh</p>	<p>dalam jumlah besar</p> <p>1.5.1. Mengembangkan industri peralatan tradisional khas Aceh berkualitas</p> <p>1.5.2. Menciptakan peluang pemasaran peralatan tradisional khas Aceh secara luas</p> <p>1.6.1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian khususnya terkait dengan: sejarah/asal usul, fungsi dan pemanfaatan</p> <p>1.6.2. Memfasilitas/menghimpun calon-calon peneliti untuk melahirkan karya dalam atau yang berkaitan dengan perlengkapan tradisional khas Aceh</p>	<p>1.5.1.1. Reproduksi, branding/promosi, dan pemasaran</p> <p>1.5.2.1. Partnership (kemitraan usaha lokal, regional dan internasional)</p> <p>1.6.1.1. Pendidikan dan pelatihan kemampuan literasi dan kreatifitas menulis tentang peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh</p> <p>1.6.2.1. Pendidikan dan pelatihan kemampuan literasi dan kreatifitas menulis tentang peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh</p>

**Misi 8** : Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pengembangan potensi sumberdaya budaya (tangible dan intangible) untuk mengembangkan serta meningkatkan nilai dan jumlah, baik produksi maupun industri pariwisata di Aceh.	1.1. Tumbuhnya komunitas/ kelompok usaha masyarakat kecil dan menengah yang berorientasi pada industri pariwisata baik skala nasional dan internasional	1.1.1. Mengembangkan kawasan Ekowisata Alam, pariwisata Pendidikan dan Sejarah, pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif, pariwisata Warisan Budaya, pariwisata budaya tradisional, pariwisata Konvensi dan Olahraga  1.1.2. Mengembangkan program-program kerjasama secara nasional dan internasional untuk perlindungan seluruh aset wisata di Aceh baik yang berbasis budaya maupun industri ekonomi kreatif kepariwisataan	1.1.1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kepariwisataan, khususnya dalam usaha pelayanan dan pengelolaan pariwisata  1.1.1.2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat (sadar wisata)  1.1.1.3. Meningkatkan peran komunitas wisata  1.1.2.1. Semakin optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (public, private, partnership)
	1.2. Mengembangkan infrastruktur kawasan wisata	1.2.1. Membangun sarana, prasarana dan fasilitas pendukung pariwisata yang sinergis antara lintas SKPA dan lintas sektoral  1.2.2. Membuka peluang investasi bidang pariwisata seluas-luasnya yang bersifat perseorangan, lembaga maupun perusahaan oleh sumber daya investor	1.2.1.1. Meningkatnya pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata  1.2.2.1. Semakin tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor wisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>2. Penguatan infrastruktur, jejaring diplomasi dan promosi kebudayaan, serta pemasaran pariwisata Aceh baik dalam skala lokal, interregional, nasional dan internasional</p>	<p>2.1. Jumlah wisnus dan wisman</p> <p>2.2. Peningkatan lama kunjungan</p>	<p>asing maupun lokal dan nasional</p> <p>1.2.3. Mengembangkan program dalam usaha meningkatkan kawasan pariwisata strategis provinsi</p> <p>2.1.1. Mempersiapkan program/kegiatan promosi dan pemasaran yang berskala nasional dan internasional.</p> <p>2.1.2. Membina kerjasama penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan baik ditingkat regional, nasional dan international, dalam hal standarisasi/sertifikasi, serta pengembangan industri pariwisata dunia.</p> <p>2.2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana prasarana baik utama maupun pendukung yang menjadi kebutuhan wisatawan wisnus dan wisman di Aceh</p> <p>2.2.2. Memperkuat identitas kearifan lokal serta sinergisitas masyarakat setempat yang menjadi destinasi kepariwisataan dengan pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata lainnya di Aceh</p>	<p>1.2.3.1. Tumbuhnya diversifikasi baru kepariwisataan yang selaras dengan keistimewaan Aceh</p> <p>2.1.1.1. Berkembangnya konsep wisata halal dalam rangka penyeteraan industri pariwisata secara global</p> <p>2.1.2.1. Mengoptimalkan usaha Pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian khazanah seni tradisional dan sastra budaya serta patenisasi seni budaya Aceh.</p> <p>2.2.1.1. Menguatkan sinergisitas secara terpadu dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang pariwisata antara provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>2.2.2.1. Menguatkan sinergisitas secara terpadu dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang pariwisata antara provinsi dan kabupaten/kota</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>2.3. Perluasan pasar negara pengunjung wisatawan di Aceh</p> <p>2.4. Meningkatkan minat beli bagi wisatawan</p>	<p>2.3.1. Mengoptimalkan jejaring broadcasting, media sosial dan cyber resmi pemerintahan dan lembaga negara serta komunitas broadcasting dan cyber swasta/independen untuk menunjang promosi budaya dan kepariwisataan Aceh</p> <p>2.3.2. Mempersingkat layanan informasi, persiapan kunjungan serta menetapkan pilihan-pilihan beragam paket wisata yang dapat memperkaya pilihan wisnus dan wisman</p> <p>2.3.3. Turut andil dalam pelaksanaan pameran yang dapat memberikan efek besar untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara</p> <p>2.4.1. Meningkatkan nilai ekonomi dari produk industri kreatif baik yang berskala kecil maupun besar yang dapat dijadikan produk unggulan kepariwisataan Aceh</p>	<p>2.3.1.1. Memperluas seluruh sektor promosi kepariwisataan, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional untuk lintas segmentasi usia, pendidikan, ketrampilan dan profesi.</p> <p>2.3.2.1. Semakin optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (Information and Communication Teknologi/ICT) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata</p> <p>2.3.3.1. Semakin optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (Information and Communication Teknologi/ICT) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata</p> <p>2.4.1.1. Membuka pasar selebar-lebarnya kepada pelaku industri kreatif dalam memasarkan produknya dan melakukan mitra kerja dengan pelaku industri yang terkait dengan sektor kepariwisataan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2.4.2. Melakukan kerjasama pengembangan produk-produk industri kreatif dengan stake holder terkait	2.4.2.1. Membuka pasar selebar-lebarnya kepada pelaku industri kreatif dalam memasarkan produknya dan melakukan mitra kerja dengan pelaku industri yang terkait dengan sektor kepariwisataan

**Misi 9** : Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Efisiensi tata kelola dan perencanaan pengembangan pariwisata Aceh dalam efektifitas pelayanan serta produktivitas penyelenggaraan program/kegiatan dinas yang terintegrasi dengan SKPA lainnya	1.1. Bertambahnya dokumen dalam Sistem informasi yang terintegrasi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan  1.2. Terintegrasinya program/kegiatan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan	1.1.1. Menginisiasi kerjasama lintas sektoral terkait perencanaan, pengembangan serta pengawasan pembangunan ekonomi industri budaya dan kepariwisataan  1.2.1. Pelibatan pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata secara nasional maupun internasional dalam memunculkan serta memperbaharui program/kegiatan yang bernilai ekonomi tinggi dalam industri budaya dan pariwisata Aceh.	1.1.1.1. Koordinasi teknis yang bersinergi antar provinsi, kabupaten/kota, dan lintas sektoral untuk peningkatan sistem informasi yang terintegrasi  1.2.1.1. Koordinasi teknis yang bersinergi antar provinsi, kabupaten/kota, dan lintas sektoral untuk pengembangan program perekonomian dan pariwisata

---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk tahun 2017–2022 dapat dijelaskan bahwa program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022. Secara keseluruhan pada Program/Kegiatan pada setiap SKPA terdapat 4 Program dan 18 Kegiatan, sedangkan pada Program/kegiatan spesifik terdapat 10 (sepuluh) program dan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan mulai dari Tahun 2018-2022.

Adapun program kegiatan tersebut adalah:

#### A. Program Pengembangan Nilai Budaya

1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah  
Kelompok Sasaran : Masyarakat Luas
2. Pagelaran, Pameran Seni se-Sumatera (PPSS)  
Kelompok Sasaran : Pekerja Seni
3. Pagelaran dan Pameran Seni Temu Taman Budaya se-Indonesia  
Kelompok Sasaran : Pekerja Seni
4. Pameran bersama tingkat nasional dan regional, pameran keliling dan temporer  
Kelompok Sasaran : Masyarakat Luas

#### B. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1. Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno  
Kelompok Sasaran : Museum Aceh
2. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah  
Kelompok Sasaran : Masyarakat Luas
3. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air  
Kelompok Sasaran : Dinas Kab/Kota dan pengelola situs
4. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata  
Kelompok Sasaran : Masyarakat Luas
5. Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah  
Kelompok Sasaran : Museum dan Taman Budaya Didaerah

- 
6. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program  
Kelompok Sasaran : Dinas Budpar Kab/Kota dan Stakeholder
  7. Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana Taman Ratu Safiatuddin  
Kelompok Sasaran : Taman Ratu Safiatuddin
  8. Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya Peninggalan Sejarah  
Kelompok Sasaran : Cagar Budaya
  9. Penulisan/ penerbitan buku, kamus dan karya sastra lainnya  
Kelompok Sasaran : Masyarakat
- C. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1. Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal  
Kelompok Sasaran : Masyarakat
  2. Pembinaan dan Evaluasi Sanggar-sanggar Kesenian, Pagelaran dan Festival Tingkat Nasional  
Kelompok Sasaran : Seniman dan Sanggar Seni
  3. Rapat Koordinasi Kebudayaan  
Kelompok Sasaran : Dinas Budpar Kab/Kota dan Stake Holder
  4. Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara  
Kelompok Sasaran : Pelajar/Mahasiswa dan Masyarakat
  5. Festival seni dan pagelaran budaya  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
  6. Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
  7. Partisipasi museum aceh di luar dan dalam daerah  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
- D. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
1. Pengadaan alat-alat kesenian Tradisional  
Kelompok Sasaran : Sanggar Seni
  2. Pengadaan alat-alat kesenian  
Kelompok Sasaran : Sanggar Seni
  3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Museum Aceh  
Kelompok Sasaran : Museum Aceh
-

- 
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Taman Budaya  
Kelompok Sasaran : Taman Seni dan Budaya
  5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Museum Tsunami  
Kelompok Sasaran : Museum Tsunami
  6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Taman Ratu Safiatuddin  
Kelompok Sasaran : Taman Ratu Safiatuddin
- E. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
1. Pengumpulan dan Ganti Rugi Koleksi Museum  
Kelompok Sasaran : Koleksi Museum dan Masyarakat Luas
  2. Survey dan perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno  
Kelompok Sasaran : Naskah Kuno
  3. Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara  
Kelompok Sasaran : Pelajar/Mahasiswa dan Masyarakat
  4. Festival seni dan pagelaran budaya  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
  5. Partisipasi adat dan budaya Dalam dan Luar Negeri  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
  6. Partisipasi bahasa dan seni Dalam dan Luar Negeri  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
  7. Partisipasi museum dalam dan luar negeri  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
  8. Pelatihan Kesenian  
Kelompok Sasaran : Guru dan pelatih sanggar
  9. Pelestarian Bahasa dan Karya Sastra  
Kelompok Sasaran : Masyarakat
  10. Pelestarian Fisik Koleksi Museum dan Buku Pustaka  
Kelompok Sasaran : Museum Aceh
  11. Pelestarian Sejarah dan Budaya Aceh  
Kelompok Sasaran : Masyarakat Luas
  12. Pembinaan Sanggar dan Komunitas Kesenian  
Kelompok Sasaran : Seniman dan Sanggar Seni

- 
13. Pengelolaan Museum Aceh  
Kelompok Sasaran : Museum Aceh
  14. Pengelolaan Museum Tsunami  
Kelompok Sasaran : Museum Tsunami
  15. Pengelolaan Taman Budaya  
Kelompok Sasaran : Taman Budaya
  16. Pengelolaan, Pemugaran Situs Sejarah dan Cagar Budaya  
Kelompok Sasaran : Cagar Budaya dan Pengelola Situs
  17. Penyebarluasan nilai budaya Aceh  
Kelompok Sasaran : Masyarakat Luas
  18. Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh  
Kelompok Sasaran : Dinas Budpar Kab/Kota, Sanggar Seni dan Komunitas Budaya, Wisman/Wisnus
  19. Penyelenggaraan Event Adat dan Budaya  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
  20. Penyelenggaraan Event Bahasa dan Seni  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
  21. Preparasi dan Edukasi Museum Tsunami  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
- F. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database  
Kelompok Sasaran : Dinas Budpar Kab/Kota dan Instansi Terkait
  2. Perencanaan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata  
Kelompok Sasaran : Dinas Budpar Kab/Kota, Instansi Terkait dan Stake Holder
  3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan  
Kelompok Sasaran : Program/Kegiatan
- G. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
  2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
-

- 
3. Pelatihan pemandu wisata terpadu  
Kelompok Sasaran : Pemandu Wisata
- H. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1. Pengembangan objek pariwisata unggulan  
Kelompok Sasaran : Pengelola objek wisata
  2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata  
Kelompok Sasaran : Objek wisata
  3. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus, Komunitas dan Masyarakat
  4. Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi  
Kelompok Sasaran : Masyarakat
  5. Penataan kawasan wisata  
Kelompok Sasaran : Kawasan Wisata
  6. Pembuatan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata  
Kelompok Sasaran : Kawasan Wisata
  7. Pembinaan kelompok sadar wisata  
Kelompok Sasaran : Masyarakat
  8. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata  
Kelompok Sasaran : Masyarakat dan Dunia Usaha
  9. Pelatihan pemandu wisata terpadu  
Kelompok Sasaran : Pemandu Wisata
  10. Pengembangan cinderamata khas daerah  
Kelompok Sasaran : Masyarakat Kreatif
  11. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata  
Kelompok Sasaran : Masyarakat
  12. Perencanaan Destinasi Pariwisata  
Kelompok Sasaran : Kawasan Wisata
  13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata  
Kelompok Sasaran : Objek wisata
  14. Pengembangan Atraksi Pariwisata Unggulan  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus, Komunitas dan Masyarakat Luas

- I. Program Pengembangan Kemitraaan
1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database  
Kelompok Sasaran : Dinas Budpar Kab/Kota dan Instansi Terkait
  2. Pembentukan Forum Komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya  
Kelompok Sasaran : Masyarakat
  3. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata  
Kelompok Sasaran : Masyarakat dan Dunia Usaha
  4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang pariwisata  
Kelompok Sasaran : Masyarakat
- J. Program Pemasaran Pariwisata
1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata  
Kelompok Sasaran : Luar Daerah dan Luar Negeri
  2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus
  3. Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata  
Kelompok Sasaran : Wisman/Wisnus

Untuk lebih rinci disajikan dalam Tabel VI.1 yang bersumber dari T-C.27. (Terlampir)

## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdapat 4 indikator kinerja utama dibidang kebudayaan dan 2 indikator utama dibidang pariwisata. Indikator Kinerja SKPA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA secara lengkap disajikan pada tabel 7.1. pada T-C.28.

Tabel VII.1  
(T-C.28) Indikator Kinerja SKPA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA	
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		Tahun 5
			2017	2018	2019	2020	2021		2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
<b>16.</b>	<b>Kebudayaan</b>								
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	30	20	25	28	32	35	140	
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	12	8	8	8	8	8	40	
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (buah)	6	6	6	6	6	6	30	
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (buah)				1	1	1	3	
<b>1</b>	<b>Pariwisata</b>								
1.1.	Kunjungan wisata (orang)	2.364.383	2.719.040	2.990.944	3.290.039	3.619.043	3.980.947	3.980.947	
	Wisatawan Nusantara (orang)	2.288.625	2.631.919	2.895.111	3.184.622	3.503.084	3.853.392	3.853.392	
	Wisatawan Mancanegara (orang)	75.758	87.122	95.834	105.417	115.959	127.555	127.555	
1.2.	Lama Kunjungan wisata (hari)	1,97	3	3	3	3	3	3	
	Wisatawan Nusantara (hari)	1,61	2	2	2	2	2	2	
	Wisatawan Mancanegara (hari)	2,33	4	4	4	4	4	4	

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijabar bahwa dibidang kebudayaan terdapat indikator kinerja penyelenggaraan festival seni dan budaya kondisi awal RPJMA adalah 30 kali dan ditargetkan pada kondisi akhir RPJMA adalah 140 kali, indikator kinerja Benda,

Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan kondisi awal RPJMA adalah 12 buah dan ditargetkan pada kondisi akhir RPJMA adalah 40 buah, indikator kinerja jumlah karya budaya yang direvitaliasi dan inventarisasi kondisi awal RPJMA adalah 6 buah dan ditargetkan pada kondisi akhir RPJMA adalah 30 buah telah direvitalisasi dan diinventarisasi, indikator kinerja jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu kondisi awal RPJMA adalah 0 buah dan ditargetkan kondisi akhir RPJMA adalah 3 buah cagar budaya yang telah dikelola secara terpadu. Sedangkan dibidang pariwisata terdapat indikator kinerja kunjungan wisata Nusantara kondisi awal RPJMA 2.288.625 orang dan ditargetkan kondisi akhir RPJMA adalah 3.853.392 orang dengan jumlah persentase kenaikan 15 % pada tahun pertama dan 10% pada setiap tahun berikutnya, sedangkan indikator kinerja lama kunjungan wisata Mancanegara kondisi awal RPJMA 75.758 orang dan ditargetkan kondisi akhir RPJMA adalah 127.555 orang dengan jumlah persentase kenaikan 15 % pada tahun pertama dan 10% pada setiap tahun berikutnya, indikator kinerja lama kunjungan wisata nusantara kondisi awal RPJMA 1,61 hari dan kondisi akhir RPJMA ditargetkan 2 hari sedangkan lama kunjungan wisata mancanegara kondisi awal RPJMA 2,33 hari dan kondisi akhir RPJMA ditargetkan 4 hari.

## BAB VIII PENUTUP

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan amanah PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017. PERMENDAGRI berisi tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana pembangunan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh merupakan pedoman kerja untuk Periode 5 (lima) tahun. Renstra mencakup materi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Selain itu juga berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah visi, misi dan program gubernur dan wakil gubernur Aceh, telaahan renstra K/L dan renstra provinsi. Telaahan RTRW dan KLHS tidak luput dari analisis Renstra, ditambah lagi penentuan isu-isu strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022 dan Visi/Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode Tahun 2017–2022.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2017-2022 ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Dalam pelaksanaannya diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya melalui dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2017-2022 perlu mendapat dukungan secara optimal. Kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun para pelaku pariwisata/budaya akademisi dan para tokoh masyarakat lainnya sangat diperlukan. Keterpaduan, kerjasama, keterbukaan, komitmen dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

# LAMPIRAN

Tabel T-C.27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

(Dalam Rupiah)

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			1.02.16.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH																		
				BELANJA				218,325,971,694.00	205,843,143,657		156,419,116,992		175,527,061,378.00		224,018,430,485.00		980,133,724,206.00					
				BELANJA TIDAK LANGSUNG													110,697,260,379.00					
			5.1.	Gaji dan Tunjangan	- Tersedianya Belanja Pegawai (Gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS)	Tahun		1	20,751,622,184.00	1	21,762,400,572	1	21,842,400,572	1	22,716,096,594.00	1	23,624,740,457.00	5	110,697,260,379.00	Budpar		
				BELANJA LANGSUNG				197,574,349,510.00	184,080,743,085		134,576,716,420		152,810,964,784		200,393,690,028		869,436,463,827					
			1.02.	Wajib Non Pelayanan Dasar																		
			1.02.16.	Kebudayaan																		
			1.02.16.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	%		100	3,978,435,000.00	100	5,548,037,000	100	5,556,777,370	100	6,112,455,107.00	100	6,723,700,616.00		27,919,405,093.00			
			1.02.16.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			02.16.01.0	1.001	- Tersedianya Jasa Surat Menyurat			1	66,800,000.00	1	81,800,000	1	82,618,000	1	90,879,800.00	1	99,967,780.00	5	422,065,580.00	Budpar		
			1.02.16.1.	02.16.01.0	1.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik																
					- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Thn		1	718,500,000.00	1	1,851,500,000	1	1,870,015,000	1	2,057,016,500.00	1	2,262,718,150.00	5	8,759,749,650.00	Budpar		
			1.02.16.1.	02.16.01.0	1.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor																
					- Tersedianya Alat Tulis Kantor	Thn		1	72,387,000.00	1	70,667,000	1	71,373,670	1	78,511,037.00	1	86,362,140.00	5	379,300,847.00	Budpar		
			1.02.16.1.	02.16.01.0	1.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan																
					- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Thn		1	42,905,000.00	1	85,905,000	1	86,764,050	1	95,440,455.00	1	104,984,500.00	5	415,999,005.00	Budpar		

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lo	Ka	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
			1.02.16.1.02.16.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1	107,250,000.00	1	150,250,000	1	151,752,500	1	166,927,750.00	1	183,620,525.00	5	759,800,775.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1	503,245,000.00	1	619,245,000	1	625,437,450	1	687,981,195.00	1	756,779,314.00	5	3,192,687,959.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman				1	159,900,000.00	1	180,200,000	1	182,002,000	1	200,202,200.00	1	220,222,420.00	5	942,526,620.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				1	557,220,000.00	1	508,470,000	1	513,554,700	1	564,910,170.00	1	621,401,187.00	5	2,765,556,057.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.01.022	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran				1	1,750,228,000.00	1	2,000,000,000	1	1,973,260,000	1	2,170,586,000.00	1	2,387,644,600.00	5	10,281,718,600.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	2,754,200,000.00	100	3,394,791,147	100	7,428,739,058	100	7,771,612,963.00	100	8,148,774,259.00		29,498,117,427.00					
			1.02.16.1.02.16.01.02.003	Pembangunan gedung kantor																			
			1.02.16.1.02.16.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional																			
			1.02.16.1.02.16.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor																			
								1	363,800,000.00	1	484,400,000	1	489,244,000	1	538,168,400.00	1	591,985,240.00	5	2,467,597,640.00	Budpar			

(1)	(2)	(3)	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lo	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
			1.02.16.1.02.16.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				1	183,200,000.00	1	250,000,000	1	252,500,000	1	277,750,000.00	1	305,525,000.00	5	1,268,975,000.00	Budpar		
			1.02.16.1.02.16.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				1	136,700,000.00	1	200,000,000	1	202,000,000	1	222,200,000.00	1	244,420,000.00	5	1,005,320,000.00	Budpar		
			1.02.16.1.02.16.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor				8	970,500,000.00	8	1,160,391,147	8	1,171,995,058	8	1,289,194,563.00	8	1,418,114,019.00	40	6,010,194,787.00	Budpar		
			1.02.16.1.02.16.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%		100	185,550,000.00		-	100	204,105,000	100	224,515,500.00	100	246,967,050.00		861,137,550.00			
			1.02.16.1.02.16.01.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				273	185,550,000.00			300	204,105,000	300	224,515,500.00	300	246,967,050.00	1173	861,137,550.00	Budpar		
			1.02.16.1.02.16.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	%		100	417,800,000.00	100	502,967,072	100	507,996,742	100	558,796,416.00	100	614,676,057.00		2,602,236,287.00			
			1.02.16.1.02.16.01.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal				1	328,400,000.00	1	252,967,072	1	255,496,742	1	281,046,416.00	1	309,151,057.00	5	1,427,061,287.00	Budpar		
			1.02.16.1.02.16.01.05.024	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan				1	89,400,000.00	1	250,000,000	1	252,500,000	1	277,750,000.00	1	305,525,000.00	5	1,175,175,000.00	Budpar		

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lo	Ka	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
			1.02.16.1.02.16.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menghargai Nilai Budaya	%		80	18,823,759,315.00		-		-		-		-		18,823,759,315.00				
			1.02.16.1.02.16.01.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah					16,180,659,315.00										16,180,659,315.00				
M2	T1	S3			- Terlaksananya Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke VII	Event		1	12,622,102,000.00									1	12,622,102,000.00	Budpar			
M2	T1	S3			- Terlaksananya event-event budaya	Event		5	3,558,557,315.00									5	3,558,557,315.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.15.009	Pagelaran, pameran seni Sumatera (PPSS)					200,000,000.00										200,000,000.00				
M8	T2	S1			- Jumlah keikutsertaa pada pagelaran, pameran seni se Sumatera	Orang		40	200,000,000.00									40	200,000,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.15.010	Pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se-Indonesia					2,247,400,000.00										2,247,400,000.00				
M8	T2	S1			- Jumlah keikutsertaa pada pagelaran, pameran seni se Indonesia	Orang		30	2,247,400,000.00									30	2,247,400,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.15.013	Pameran bersama tingkat nasional dan regional, pameran keliling dan temporer					195,700,000.00										195,700,000.00				
M8	T2	S3			- Jumlah keikutsertaa pada pameran bersama	Kali		15	195,700,000.00									15	195,700,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatkan Pengelolaan Cagar Budaya dan Nilai Sejarah	Buah		12	12,849,052,121.00		-		-		-		-		12,849,052,121.00				
			1.02.16.1.02.16.01.16.02	Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno					223,995,000.00										223,995,000.00				
M2	T1	S2			- Terawatnya benda-benda koleksi museum	Buah		1.600	223,995,000.00									1600	223,995,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.16.04	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah					243,924,000.00										243,924,000.00				
M2	T1	S3			- Terlaksananya sosialisasi/ Edukasi Nilai-nilai budaya Aceh	Orang		500	243,924,000.00									500	243,924,000.00	Budpar			

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			1.02.16.1.02.16.01.1.6.05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air			253,346,000.00										253,346,000.00					
M2	T1	S2			- Terpelihara dan terkelolanya situs peninggalan cagar budaya	Orang	100	253,346,000.00									100	253,346,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.1.6.006	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata			1,070,000,000.00										1,070,000,000.00					
M8	T2	S3			- Jumlah event seni budaya	event	2	1,070,000,000.00									2	1,070,000,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.1.6.011	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah			1,689,375,000.00										1,689,375,000.00					
M2	T1	S2			- Jumlah rehabilitasi museum dan taman budaya	Unit	6	1,689,375,000.00									6	1,689,375,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.1.6.018	Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program			455,320,000.00										455,320,000.00					
M9	S1	S2			- Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan	Kab/Kota	23	227,000,000.00									23	227,000,000.00	Budpar			
M9	S1	S2			- Terlaksananya evaluasi dan monitoring	Kab/Kota	23	228,320,000.00									23	228,320,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.1.6.018	Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman ratu safiatuddin			3,878,000,000.00										3,878,000,000.00					
M2	T1	S2			- Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana Taman Ratu Safiatuddin	Paket	1	3,878,000,000.00									1	3,878,000,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.1.6.021	Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya Peninggalan sejarah			4,786,242,121.00										4,786,242,121.00					
M2	T1	S2			- Terpugarnya benda-benda arkeologi dan benda cagar budaya peninggalan sejarah	Situs	8	4,786,242,121.00									8	4,786,242,121.00	Budpar			



Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			1.02.16.1.02.16.01.1.7.016.	Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri				1,029,187,000.00									1,029,187,000.00					
M8	T2	S3			- Terlaksananya pagelaran/partisipasi budaya daerah pada event dalam dan luar negeri	Kali		3	1,029,187,000.00								3	1,029,187,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.1.7.018.	Partisipasi museum aceh di luar dan dalam daerah				200,000,000.00										200,000,000.00				
M8	T2	S3			- Jumlah partisipasi pameran museum yang di ikuti	Kali		5	200,000,000.00								5	200,000,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.1.9.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Unit		442,120,000.00	4	68,930,310,000	4	15,797,250,000	4	16,682,475,000	4	18,350,722,500	4	120,202,877,500.00				
			1.02.16.1.02.16.01.1.9.003	Penyediaan alat-alat kesenian tradisional				442,120,000.00										442,120,000.00				
					- Jumlah alat alat kesenian yang disediakan	Unit		10	442,120,000.00								10	442,120,000.00	Budpar			
				Pengadaan alat-alat kesenian				-	425,000,000			429,250,000		472,175,000		519,392,500		1,845,817,500.00				
					- Jumlah alat alat kesenian yang disediakan	Unit			3	425,000,000	3	429,250,000	3	472,175,000.00	3	519,392,500.00	12	1,845,817,500.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.1.9.006	Pengembangan Sarana dan Prasarana Museum Aceh				-	2,800,000,000			3,720,000,000		3,110,800,000		3,421,880,000		13,052,680,000.00				
M2	T1	S2			- Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Aceh yang dikembangkan	UPTD			1	2,800,000,000	1	3,720,000,000	1	3,110,800,000.00	1	3,421,880,000.00	1	13,052,680,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.1.9.007	Pengembangan Sarana dan Prasarana Taman Budaya				-	1,800,000,000			1,818,000,000		1,999,800,000		2,199,780,000		7,817,580,000.00				
M2	T1	S2			- Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang dikembangkan	Kawasan			1	1,800,000,000	1	1,818,000,000	1	1,999,800,000.00	1	2,199,780,000.00	1	7,817,580,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.1.9.008	Pengembangan Sarana dan Prasarana Museum Tsunami				-	3,000,000,000			6,330,000,000		6,963,000,000		7,659,300,000		23,952,300,000.00				
M2	T1	S2			- Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Tsunami yang dikembangkan	UPTD			1	3,000,000,000	1	6,330,000,000	1	6,963,000,000.00	1	7,659,300,000.00	1	23,952,300,000.00	Budpar			

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			1.02.16.1.02.16.01.1.9.009	Pengembangan Sarana dan Prasarana Taman Ratu Safiatuddin				-	60,905,310,000		3,500,000,000		4,136,700,000		4,550,370,000		73,092,380,000.00					
M2	T1	S2			- Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Ratu Safiatuddin yang dikembangkan	Kawasan			1	60,905,310,000	1	3,500,000,000	1	4,136,700,000.00	1	4,550,370,000.00	1	73,092,380,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.	Program Pengelolaan Kekayaan dan keragaman Budaya	Meningkatkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman Budaya	Jumlah Kekayaan Budaya		-	21	27,312,579,296	21	33,438,603,988	21	40,826,964,386	21	70,709,660,823	21	172,287,808,493				
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.004	Pengumpulan dan Ganti Rugi Koleksi Museum				-	150,000,000		151,500,000		166,650,000		183,315,000		651,465,000.00					
M2	T1	S2			- Jumlah Koleksi Museum yang diganti rugi atau direplika	koleksi			7	150,000,000	7	151,500,000	7	166,650,000.00	7	183,315,000.00	28	651,465,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.006	Survey dan perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno				-	200,000,000		210,000,000		220,000,000		242,000,000		872,000,000.00					
M2	T1	S6			- Jumlah naskah yang digitalisasi	Judul Naskah			120	200,000,000	120	210,000,000.00	120	220,000,000.00	120	242,000,000.00	480	872,000,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.025	Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara				-	280,000,000		282,800,000		311,080,000		342,188,000		1,216,068,000.00					
M2	T1	S3			- Jumlah peserta Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara	Orang			120	280,000,000	120	282,800,000	120	311,080,000.00	120	342,188,000.00	480	1,216,068,000.00	Budpar			
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.026	Festival seni dan pagelaran budaya				-	3,084,341,296.00		3,086,384,708		3,395,023,178.00		5,734,525,495.00		15,300,274,677.00					
M2	T1	S2			- Jumlah pelatihan/workshop seni dan budaya	Kali			8	750,000,000	8	757,500,000	8	833,250,000.00	8	916,575,000.00	32	3,257,325,000.00	Budpar			
M2	T1	S2			- Jumlah pagelaran seni dan budaya	kali			10	1,900,341,296	10	1,890,544,708	10	2,079,599,178.00	20	4,287,559,095.00	50	10,158,044,277.00	Budpar			
M8	T2	S1			- Jumlah keikutsertaan pada pagelaran, pameran seni se-Sumatera	Orang			20	200,000,000	20	202,000,000	20	222,200,000.00	20	244,420,000.00	80	868,620,000.00	Budpar			
M8	T2	S1			- Jumlah keikutsertaan pada pagelaran, pameran seni se-Indonesia	Orang			20	234,000,000	20	236,340,000	20	259,974,000.00	20	285,971,400.00	80	1,016,285,400.00	Budpar			

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.029	Partisipasi Adat dan Budaya Aceh Dalam dan Luar Negeri			-		600,000,000.00		606,000,000.00		666,600,000.00		733,260,000.00		2,605,860,000.00					
M8	T2	S3			- Jumlah partisipasi pada event/expo Adat dan Budaya Aceh dalam dan luar negeri	kali		2	600,000,000	2	606,000,000	2	666,600,000.00	2	733,260,000.00	8	2,605,860,000.00	Budpar				
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.030	Partisipasi Bahasa dan Seni Dalam dan Luar Negeri			-		700,000,000.00		707,000,000.00		777,700,000.00		855,470,000.00		3,040,170,000.00					
M8	T2	S3			- Jumlah partisipasi pada event/expo Bahasa dan Seni dalam dan luar negeri	kali		2	700,000,000	2	707,000,000	2	777,700,000.00	2	855,470,000.00	8	3,040,170,000.00	Budpar				
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.031	Partisipasi Museum Dalam dan Luar Negeri			-		1,500,000,000.00		447,400,000.00		492,140,000.00		1,541,354,000.00		3,980,894,000.00					
M8	T2	S3			- Jumlah Partisipasi museum Aceh dalam dan luar negeri	Kali		12	1,500,000,000	4	447,400,000	4	492,140,000.00	6	1,541,354,000.00	26	3,980,894,000.00	Budpar				
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.032	Pelatihan Kesenian			-		203,110,000.00		500,000,000.00		550,000,000.00		605,000,000.00		1,858,110,000.00					
M2	T1	S3			- Jumlah pelatihan seni dan budaya Aceh	Orang		80	203,110,000	80	500,000,000	80	550,000,000.00	80	605,000,000.00	320	1,858,110,000.00	Budpar				
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.033	Pelestarian Bahasa dan Karya Sastra			-		1,100,000,000		1,111,000,000		1,222,100,000		1,344,310,000		4,777,410,000.00					
M2	T1	S1			- Jumlah lomba bahasa dan Sastra Aceh	event		1	200,000,000	1	127,000,000	1	139,700,000.00	1	153,670,000.00	4	620,370,000.00	Budpar				
M2	T1	S6			- Jumlah peserta rangkang literasi budaya	orang		30	300,000,000	30	228,000,000	30	250,800,000.00	30	275,880,000.00	120	1,054,680,000.00	Budpar				
M2	T1	S3			- Jumlah peserta seminar/FGD/pelatihan seni dan budaya	Orang		140	600,000,000	140	556,000,000	140	611,600,000.00	140	672,760,000.00	560	2,440,360,000.00	Budpar				
M2	T1	S4			- Jumlah Warisan Budaya yang Diusulkan	WB/BT				5	200,000,000	5	220,000,000.00	5	242,000,000.00	15	662,000,000.00	Budpar				
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.034	Pelestarian Fisik Koleksi Museum dan Buku Pustaka			-		150,000,000		151,500,000		166,650,000		183,315,000		651,465,000.00					
M2	T1	S2			- Jumlah Koleksi Benda di Museum yang dikonservasi	koleksi		50	50,000,000	50	50,500,000	50	55,550,000.00	50	61,105,000.00	200	217,155,000.00	Budpar				
M2	T1	S2			- Jumlah bahan pustaka yang dilestarikan	Buku		500	50,000,000	500	50,500,000	500	55,550,000.00	500	61,105,000.00	2000	217,155,000.00	Budpar				
M2	T1	S2			- Jumlah Kurator dan Petugas Museum yang di Latih	Orang		6	50,000,000	6	50,500,000	6	55,550,000.00	6	61,105,000.00	24	217,155,000.00	Budpar				

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			<b>1.02.16.1.02.16.01.2.1.035</b>	<b>Pelestarian Sejarah dan Budaya Aceh</b>				-	<b>700,000,000</b>		<b>737,000,000</b>		<b>810,700,000</b>		<b>891,770,000</b>		<b>3,139,470,000.00</b>					
M2	T1	S1			- Jumlah peserta seminar/FGD/dialog kebudayaan	Orang			100	200,000,000	100	232,000,000	100	255,200,000.00	100	280,720,000.00	400	967,920,000.00	Budpar			
M2	T1	S6			- Jumlah bahan literasi (cetak dan audio visual)	Bahan Publikasi			2	400,000,000	2	404,000,000	2	444,400,000.00	2	488,840,000.00	8	1,737,240,000.00	Budpar			
M2	T1	S3			- Jumlah pelatihan/partisipasi pameran adat dan budaya/ sejarah	kali			1	100,000,000	1	101,000,000	1	111,100,000.00	1	122,210,000.00	4	434,310,000.00	Budpar			
			<b>1.02.16.1.02.16.01.2.1.036</b>	<b>Pembinaan Sanggar dan Komunitas Kesenian</b>				-	<b>700,000,000</b>		<b>707,000,000</b>		<b>777,700,000</b>		<b>855,470,000</b>		<b>3,040,170,000.00</b>					
M2	T1	S2			- Jumlah pembinaan Sanggar Seni dan penghargaan seniman kreatif	Sanggar			40	700,000,000	40	707,000,000	40	777,700,000.00	40	855,470,000.00	160	3,040,170,000.00	Budpar			
			<b>1.02.16.1.02.16.01.2.1.037</b>	<b>Pengelolaan Museum Aceh</b>				-	<b>475,000,000</b>		<b>629,750,000</b>		<b>692,725,000</b>		<b>761,997,500</b>		<b>2,559,472,500.00</b>					
M2	T1	S2			- Terlaksananya Pengelolaan Museum Aceh	Tahun			1	475,000,000	1	629,750,000	1	692,725,000.00	1	761,997,500.00	4	2,559,472,500.00	Budpar			
			<b>1.02.16.1.02.16.01.2.1.038</b>	<b>Pengelolaan Museum Tsunami</b>				-	<b>1,767,998,000</b>		<b>1,801,837,980</b>		<b>1,982,021,778</b>		<b>2,180,223,955</b>		<b>7,732,081,713.00</b>					
M2	T1	S2			- Terlaksananya Pengelolaan Museum Tsunami	Tahun			1	1,767,998,000	1	1,601,837,980	1	1,762,021,778.00	1	1,938,223,955.00	4	7,070,081,713.00	Budpar			
M2	T1	S2			- Jumlah Koleksi Museum Tsunami yang di Ganti Rugi atau di Replika	koleksi					7	200,000,000	7	220,000,000.00	7	242,000,000.00	21	662,000,000.00	Budpar			
			<b>1.02.16.1.02.16.01.2.1.039</b>	<b>Pengelolaan Taman Budaya</b>				-	<b>650,000,000</b>		<b>651,380,000</b>		<b>716,518,000</b>		<b>788,169,800</b>		<b>2,806,067,800.00</b>					
M2	T1	S2			- Terlaksananya Pengelolaan Taman Budaya	Tahun			1	650,000,000	1	651,380,000	1	716,518,000.00	1	788,169,800.00	4	2,806,067,800.00	Budpar			

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			<b>1.02.16.1.02.16.01.2.1.040</b>	<b>Pengelolaan, Pemugaran Situs Sejarah dan Cagar Budaya</b>				-	<b>6,252,130,000</b>		<b>9,896,651,300</b>		<b>11,441,816,430</b>		<b>14,585,998,073</b>		<b>42,176,595,803.00</b>					
M2	T1	S2			- Jumlah SDM pada situs cagar budaya yang ditingkatkan kemampuannya	Orang			200	900,000,000	200	909,000,000	200	999,900,000.00	200	1,099,890,000.00	800	3,908,790,000.00	Budpar			
M2	T1	S2			- Jumlah Dokumen pengembangan cagar budaya	Dokumen			4	600,000,000	4	606,000,000	4	666,600,000.00	4	733,260,000.00	16	2,605,860,000.00	Budpar			
M2	T1	S2			- Jumlah pengembangan kawasan cagar budaya terpadu	kawasan					1	3,577,000,000	1	3,934,700,000.00	1	4,328,170,000.00	3	11,839,870,000.00	Budpar			
M2	T1	S2			- Jumlah cagar budaya yang terpuagar	situs			8	4,402,130,000	8	4,451,151,300	8	4,896,266,430.00	8	7,385,893,073.00	32	21,135,440,803.00	Budpar			
M2	T1	S2			- Jumlah Partisipasi pada kegiatan Permuseuman Dalam dan Luar Negeri	Kali							4	555,500,000.00	4	611,050,000.00	8	1,166,550,000.00	Budpar			
M2	T1	S2			- Jumlah cagar budaya yang terdaftar secara provinsi, nasional dan internasional	Situs			4	350,000,000	4	353,500,000	4	388,850,000.00	4	427,735,000.00	16	1,520,085,000.00	Budpar			
			<b>1.02.16.1.02.16.01.2.1.041</b>	<b>Penyebarluasan Nilai Budaya Aceh</b>				-	<b>2,000,000,000</b>		<b>2,146,000,000</b>		<b>2,360,600,000</b>		<b>2,596,660,000</b>		<b>9,103,260,000.00</b>					
M2	T1	S6			- Jumlah Publikasi dan penyusunan Buku berbasis kearifan Lokal Aceh	Bahan Publikasi			6	1,000,000,000	6	1,010,000,000	6	1,111,000,000.00	6	1,222,100,000.00	24	4,343,100,000.00	Budpar			
M2	T1	S3			- Jumlah Sosialisasi Nilai Kearifan Lokal Aceh	Kali			6	1,000,000,000	6	1,010,000,000	6	1,111,000,000.00	6	1,222,100,000.00	24	4,343,100,000.00	Budpar			
M2	T1	S3			- Jumlah Lomba Pelestarian kearifan lokal	Kali					3	126,000,000	3	138,600,000.00	3	152,460,000.00	9	417,060,000.00	Budpar			
			<b>1.02.16.1.02.16.01.2.1.042</b>	<b>Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh</b>				-	-		-		<b>2,000,000,000</b>		<b>20,000,000,000</b>		<b>22,000,000,000.00</b>					
M2	T1	S3			- Terlaksananya Roadshow dan Pekan Kebudayaan Aceh VIII	Event							1	2,000,000,000.00	1	20,000,000,000.00	2	22,000,000,000.00	Budpar			
			<b>1.02.16.1.02.16.01.2.1.043</b>	<b>Penyelenggaraan event adat dan budaya</b>				-	<b>3,500,000,000</b>		<b>3,535,000,000</b>		<b>3,888,500,000</b>		<b>5,277,350,000</b>		<b>16,200,850,000.00</b>					
M2	T1	S3			- Jumlah event adat dan budaya yang dilaksanakan	Event			7	3,500,000,000	7	3,535,000,000	7	3,888,500,000.00	9	5,277,350,000.00	30	16,200,850,000.00	Budpar			

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.044	Penyelenggaraan Event Bahasa dan Seni				-	3,300,000,000		4,833,000,000		6,816,300,000		8,497,930,000		23,447,230,000.00					
M2	T1	S3			- Jumlah event bahasa dan seni yang dilaksanakan	Event		7	3,300,000,000	10	4,833,000,000	10	6,816,300,000	12	8,497,930,000	39	23,447,230,000.00	Budpar				
			1.02.16.1.02.16.01.2.1.045	Preparasi dan Edukasi Museum Tsunami				-			1,247,400,000		1,372,140,000		2,509,354,000		5,128,894,000					
M2	T1	S2			- Tersedianya Bimbingan Edukatif dan Komunikasi kepada Masyarakat	Orang				900,240	800,000,000	990,264	880,000,000.00	1,089,290	968,000,000.00	2,979,794	2,648,000,000.00	Budpar				
M2	T1	S2			- Jumlah Partisipasi museum Tsunami pada Kegiatan Kebencanaan Dalam dan Luar Negeri	Kali				4	447,400,000	4	492,140,000.00	6	1,541,354,000.00	14	2,480,894,000.00	Budpar				
			1.02.16.1.02.16.01.2.2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Ekonomi Aceh	%		-	80	2,000,000,000	80	2,751,200,000	90	3,026,320,000	90	3,328,952,000		11,106,472,000.00				
			1.02.16.1.02.16.01.2.2.003	Pengembangan dan penguatan informasi dan database				-			600,000,000		637,200,000		700,920,000		771,012,000				2,709,132,000.00	
M9	T1	S1			- Tersedianya Informasi dan Database Kebudayaan dan Pariwisata	Tahun		1	600,000,000	1	637,200,000	1	700,920,000.00	1	771,012,000.00	4	2,709,132,000.00	Budpar				
			1.02.16.1.02.16.01.2.2.004	Perencanaan pembangunan kebudayaan dan Pariwisata				-			800,000,000		808,000,000		888,800,000		977,680,000				3,474,480,000.00	
M9	T1	S2			- Terlaksananya Sinkronisasi perencanaan kebudayaan dan pariwisata	%		100	800,000,000	100	808,000,000	100	888,800,000.00	100	977,680,000.00	400	3,474,480,000.00	Budpar				
			1.02.16.1.02.16.01.2.2.005	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan				-			600,000,000		1,306,000,000		1,436,600,000		1,580,260,000				4,922,860,000.00	
M9	T1	S2			- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Tahun		1	600,000,000	1	1,306,000,000	1	1,436,600,000.00	1	1,580,260,000.00	4	4,922,860,000.00	Budpar				

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Wisatawan	2,72 jt & 3 hari	4,569,240,685.00		-		-		-		-	4,569,240,685.00					
				Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata			590,260,000.00										590,260,000.00					
M8	T2	S3			- Tersebar nya informasi potensi pariwisata melalui media	Media	4	590,260,000.00									4	590,260,000.00	Budpar			
				Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri			2,923,000,685.00										2,923,000,685.00					
M8	T2	S3			- Terselenggaranya pameran promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri	Kali pameran	10	2,923,000,685.00									10	2,923,000,685.00	Budpar			
				Pelatihan pemandu wisata terpadu			1,055,980,000.00										1,055,980,000.00					
M8	T1	S1			- Terlaksananya Pelatihan pemandu wisata	Orang	150	1,055,980,000.00									150	1,055,980,000.00	Budpar			
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi	Kawasan	3	144,584,897,879.00	3	58,717,058,570	3	51,210,294,262	3	58,157,900,412	3	70,875,319,223	383,545,470,346.00					
			2.002.02.1.02.16.01.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan			1,601,560,000.00										1,601,560,000.00					
M8	T1	S1			- Jumlah objek pariwisata unggulan yang dikembangkan	Objek	37	1,601,560,000.00									37	1,601,560,000.00	Budpar			
			2.002.02.1.02.16.01.16.02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata			115,987,906,879		2,574,700,000		-		-		-		118,562,606,879.00					
M8	T1	S2			- Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	Objek	40	115,987,906,879.00	2	2,574,700,000							42	118,562,606,879.00	Budpar			
			2.002.02.1.02.16.01.16.03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan			19,656,378,000.00										19,656,378,000.00					
M8	T2	S1			- Terlaksananya event daya tarik pariwisata Aceh	Event	16	19,656,378,000.00									16	19,656,378,000.00	Budpar			

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.002.02.1.02.16.01.16.07	Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi			-		1,500,000,000		1,515,000,000		1,666,500,000		1,833,150,000		6,514,650,000.00					
M8	T1	S1			- Jumlah auditor (standarisasi/sertifikasi) pendukung program wisata halal	Orang			150	700,000,000							150	700,000,000.00	Budpar			
M8	T1	S1			- Jumlah usaha kepariwisataan yang terstandarisasi/ tersertifikasi	Usaha Pariwisata					20	707,000,000	20	777,700,000.00	20	855,470,000.00	60	2,340,170,000.00	Budpar			
M8	T1	S1			- Jumlah Pelaku Usaha Kepariwisata dan Instansi Terkait tersosialisasi	Orang			840	800,000,000	840	808,000,000	840	888,800,000.00	840	977,680,000.00	3,360	3,474,480,000.00	Budpar			
			2.002.02.1.02.16.01.16.07	Penataan kawasan wisata			7,150,000,000.00											7,150,000,000.00				
M8	T1	S2			- Jumlah sarana dan prasarana pariwisata	Kawasan		1	7,150,000,000.00								1	7,150,000,000.00	Budpar			
			2.002.02.1.02.16.01.16.09	Pembuatan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata			189,053,000.00											189,053,000.00				
M8	T1	S2			- Tersedianya Masterplan kawasan wisata	Dokumen		4	189,053,000.00								4	189,053,000.00	Budpar			
			2.002.02.1.02.16.01.16.12	Pembinaan kelompok sadar wisata			-		1,780,000,000		3,343,100,000		3,677,410,000		5,045,151,000		13,845,661,000.00					
M8	T1	S1			- Jumlah pelatihan desa wisata	Desa			10	1,580,000,000	10	1,595,800,000	10	1,755,380,000.00	10	2,930,918,000.00	40	7,862,098,000.00	Budpar			
M8	T1	S1			- Jumlah pelatihan kelompok sadar wisata	Pokdarwis			5	200,000,000	5	202,000,000	5	222,200,000.00	5	244,420,000.00	20	868,620,000.00	Budpar			
M8	T1	S1			- Jumlah SDM pengelola objek wisata	Orang					600	1,545,300,000	600	1,699,830,000.00	600	1,869,813,000.00	1800	5,114,943,000.00	Budpar			
			2.002.02.1.02.16.01.16.13	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata			-		2,900,000,000		2,987,500,000		3,286,250,000		4,614,875,000		13,788,625,000.00					
M8	T2	S3			- Jumlah FGD/Sosialisasi kemitraan pariwisata	Kali			4	1,000,000,000	4	1,068,500,000	4	1,175,350,000.00	4	1,292,885,000.00	16	4,536,735,000.00	Budpar			
M8	T2	S3			- Jumlah kerjasama kemitraan pariwisata	Kali			1	50,000,000	1	50,500,000	1	55,550,000.00	1	61,105,000.00	4	217,155,000.00	Budpar			
M8	T2	S3			- Jumlah keikutsertaan kegiatan kemitraan pariwisata nasional/internasional	kali			4	850,000,000	4	858,500,000	4	944,350,000.00	6	2,038,785,000.00	18	4,691,635,000.00	Budpar			

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
M8	T2	S3			- Jumlah Kegiatan Famtrip Stake Holder Pariwisata	kali			5	1,000,000,000	5	1,010,000,000	5	1,111,000,000.00	5	1,222,100,000.00	20	4,343,100,000.00	Budpar			
		2.002.02.1.02.16.01.16.16		Pelatihan pemandu wisata terpadu				-	1,500,000,000		1,515,000,000		1,666,500,000		1,833,150,000		6,514,650,000.00					
M8	T1	S1			- Jumlah Pemandu Wisata yang dilatih	Orang			300	1,500,000,000	300	1,515,000,000	300	1,666,500,000.00	300	1,833,150,000.00	1200	6,514,650,000.00	Budpar			
		2.002.02.1.02.16.01.16.17		Pengembangan cinderamata khas daerah				-	900,000,000		909,000,000		999,900,000		1,099,890,000		3,908,790,000.00					
M8	T2	S4			- Jenis Cinderamata Khas Aceh yang di kembangkan	Jenis			4	900,000,000	4	909,000,000	4	999,900,000.00	4	1,099,890,000.00	16	3,908,790,000.00	Budpar			
		2.002.02.1.02.16.01.16.18		Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata				-	3,495,294,210		1,984,947,152		2,183,441,867		2,401,786,053		10,065,469,282.00					
M8	T1	S1			- Jumlah SDM pengelola objek wisata	Orang			600	1,530,000,000							600	1,530,000,000.00	Budpar			
M8	T1	S1			- Jumlah SDM industri kreatif pariwisata	Orang			500	980,000,000	500	989,800,000	500	1,088,780,000.00	500	1,197,658,000.00	2000	4,256,238,000.00	Budpar			
M8	T2	S1			- Jumlah SDM pendukung wisata halal	Orang			500	985,294,210	500	995,147,152	500	1,094,661,867.00	500	1,204,128,053.00	2000	4,279,231,282.00	Budpar			
		2.002.02.1.02.16.01.16.19		Perencanaan Destinasi pariwisata				-	2,300,000,000		2,323,000,000		2,555,300,000		2,810,830,000		9,989,130,000.00					
M8	T1	S2			- Jumlah dokumen pengembangan objek wisata (studi)/perencanaan kawasan wisata	Dokumen			6	2,300,000,000	6	2,323,000,000	6	2,555,300,000.00	6	2,810,830,000.00	24	9,989,130,000.00	Budpar			
		2.002.02.1.02.16.01.16.20		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata				-	23,917,064,360		26,834,425,023		29,694,444,250		37,565,517,446		118,011,451,079.00					
M8	T1	S2			- Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dikembangkan	Objek			10	23,917,064,360	10	26,834,425,023	10	29,694,444,250.00	10	37,565,517,446.00	40	118,011,451,079.00	Budpar			

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.002.02.1.02.16.01.16.21	Pengembangan Atraksi Pariwisata Unggulan					-		17,850,000,000		9,798,322,087		12,428,154,295		13,670,969,724		53,747,446,106.00			
M8	T1	S1			- Jumlah kegiatan komunitas pada destinasi wisata	Event			3	750,000,000	3	757,500,000	3	833,250,000.00	3	916,575,000.00	12	3,257,325,000.00	Budpar			
M8	T2	S2			- Jumlah kegiatan pada destinasi wisata	Event			20	6,000,000,000	20	4,089,927,087	20	4,498,919,795.00	20	4,948,811,774.00	80	19,537,658,656.00	Budpar			
M8	T2	S2			- Jumlah atraksi keunikan baru di destinasi wisata	Event			3	10,600,000,000	3	4,445,895,000	3	6,540,484,500.00	3	7,194,532,950.00	12	28,780,912,450.00	Budpar			
M8	T2	S3			- Jumlah sayembara/lomba/konten promosi yang memanfaatkan media sosial	Event			1	500,000,000	1	505,000,000	1	555,500,000.00	1	611,050,000.00	4	2,171,550,000.00	Budpar			
			2.002.02.1.02.16.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	Terjalannya Kemitraan/Pengelolaan Pariwisata	Orang	1,200	5,938,970,000.00		-		-		-		-		5,938,970,000.00				
			2.002.02.1.02.16.01.17.001	Pengembangan dan penguatan informasi dan database			285,760,000.00											285,760,000.00				
M9	T1	S1			- Terlaksananya pengumpulan data perkembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata di kab./kota	Kab./Kota		23	285,760,000.00								23	285,760,000.00	Budpar			
			2.002.02.1.02.16.01.17.004	Pembentukan Forum Komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya			3,207,965,000.00											3,207,965,000.00				
M8	T1	S1			- Jumlah peserta pelatihan forum industri pariwisata dan budaya	Orang		500	3,207,965,000.00								500	3,207,965,000.00	Budpar			
			2.002.02.1.02.16.01.17.005	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan kemitraan pariwisata			1,644,000,000.00											1,644,000,000.00				
M8	T1	S1			- Terlaksananya koordinasi Pembangunan kemitraan pariwisata	Keg		3	1,644,000,000.00								3	1,644,000,000.00	Budpar			

Misi	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			2.002.02.1.02.16.01.17.007	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang pariwisata			801,245,000.00										801,245,000.00					
M8	T1	S1			Terlaksananya Pelatihan Pengembangan SDM Kepariwisata	Orang	700	801,245,000.00									700	801,245,000.00	Budpar			
			2.002.02.1.02.16.01.20.	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	-	2,99 jt & 3 hari	17,675,000,000	3,29 jt & 3 hari	17,681,750,000	3,62 Jt & 3 hari	19,449,925,000	3,98 jt & 3 hari	21,394,917,500		76,201,592,500.00					
			2.002.02.1.02.16.01.20.001	Analisa Pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata			-		750,000,000		757,500,000		833,250,000		916,575,000		3,257,325,000.00					
M8	T2	S2			- Jumlah dokumen Analisa pasar promosi dan pemasaran	Dokumen		1	750,000,000	1	757,500,000	1	833,250,000.00	1	916,575,000.00	4	3,257,325,000.00	Budpar				
			2.002.02.1.02.16.01.20.003	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri			-		13,425,000,000		13,359,250,000		14,695,175,000		16,164,692,500		57,644,117,500.00					
M8	T2	S1			- Jumlah promosi pada media cetak	Media		30	400,000,000	30	404,000,000	30	444,400,000.00	30	488,840,000.00	120	1,737,240,000.00	Budpar				
M8	T2	S3			- Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pemasaran/promosi kepariwisataan (nasional dan internasional)	Event		12	8,025,000,000	12	7,905,250,000	12	8,695,775,000.00	12	9,565,352,500.00	48	34,191,377,500.00	Budpar				
M8	T2	S3			- Jumlah promosi melalui media Digital, Luar Ruang dan Indoor di Dalam dan Luar Negeri	Tahun		1	5,000,000,000	1	5,050,000,000	1	5,555,000,000.00	1	6,110,500,000.00	4	21,715,500,000.00	Budpar				
			2.002.02.1.02.16.01.20.008	Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata			-		3,500,000,000		3,565,000,000		3,921,500,000		4,313,650,000		15,300,150,000.00					
M8	T2	S3			- Jumlah media informasi dan promosi potensi budaya dan pariwisata (paid media, sosial media, own media, dan endorse)	Media		4	2,500,000,000	4	2,555,000,000	4	2,810,500,000.00	4	3,091,550,000.00	16	10,957,050,000.00	Budpar				
M8	T2	S3			- Terlaksananya Strategi komunikasi pemasaran pariwisata	Kali		4	1,000,000,000	4	1,010,000,000	4	1,111,000,000.00	4	1,222,100,000.00	16	4,343,100,000.00	Budpar				